

Buku Induk
STATISTIK
Pekerjaan Umum



BUKU INDUK STATISTIK PEKERJAAN UMUM 2011

BIS-PU 2011



PEKERJAAN UMUM

<http://www.pu.go.id>

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

KATA PENGANTAR

Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi statistik infrastruktur PU dalam berbagai bentuk penyajian yang meliputi perkembangan kependudukan, ketenagakerjaan dan ekonomi, serta data pendukung lainnya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum, sangat diperlukan. Oleh sebab itu disusun Buku Induk Statistik Infrastruktur ke-PU-an yang selanjutnya disebut sebagai “Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU)”.

Data dan informasi yang disajikan diupayakan berupa data terpilah yang berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kementerian PU, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dalam Penyusunan BIS-PU ini, disajikan data dan informasi tingkat Nasional yang dirinci per Provinsi menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu. Bentuk penyajian dibuat sederhana, mudah dan menarik untuk dibaca serta informatif, sehingga dapat diketahui posisi, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki sebagai masukan dalam penyusunan program/ kegiatan berbagai bidang pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan BIS-PU ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pengguna buku ini sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2011

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan dan Manfaat	I-2
1.3 Ruang Lingkung Kegiatan	I-3
BAB II : KONDISI UMUM INDONESIA	
2.1 Wilayah Indonesia	II-1
2.1.1 Luas Wilayah	II-1
2.1.2 Wilayah Administrasi	II-2
2.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	II-2
2.2.1 Kependudukan	II-2
2.2.2 Ketenagakerjaan	II-6
2.3 Ekonomi	II-8
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)	II-8
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-9
BAB III : INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN	
3.1 Konstruksi	III-1
3.2 Potensi Lahan Sawah	III-3
3.3 Angkutan Darat (Transportasi)	III-4
3.4 Permukiman dan Lingkungan Permukiman	III-5
3.4.1 Permukiman	III-5

3.4.2 Lingkungan Permukiman	III-6
3.5 Bencana Alam	III-7
BAB IV : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	
4.1 Danau/ Situ	IV-2
4.2 Bendungan/ Waduk	IV-3
4.3 Bendung	IV-4
4.4 Rawa	IV-5
4.5 Embung dan Embung Potensi	IV-6
4.6 Air Baku dan Air Tanah	IV-7
4.7 Irigasi	IV-8
4.8 Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	IV-9
4.9 Analisis Statistik Bidang Sumber Daya Air	IV-11
BAB V : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA	
5.1 Jalan	V-1
5.2 Jalan Tol	V-4
5.3 Jembatan	V-5
5.4 Analisis Statistik Bidang Bina Marga	V-7
BAB VI : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	
6.1 Pengembangan Permukiman	VI-1
6.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan	VI-4
6.3 Pengembangan Air Minum	VI-5
6.4 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	VI-9
6.5 Analisis Statistik Bidang Cipta Karya	VI-12
BAB VII : INFORMASI STATISTIK BIDANG PENATAAN RUANG	
7.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	VII-1
7.2 Pengembangan Kawasan	VII-4

BAB VIII : DATA GENDER KEMENTERIAN PU

8.1 Perkembangan Jumlah Sumber Daya Manusia Kementerian PU	VIII-2
8.1.1 Analisis Perkembangan SDM Tahun 2008, 2010, dan 2011	VIII-2
8.1.2 Analisis Keseluruhan SDM PU Tahun 2011	VIII-6
8.2 Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PU	VIII-10

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB II : KONDISI UMUM INDONESIA	
Tabel 2.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Indonesia	II-11
Tabel 2.2 : Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa di Indonesia Tahun 2008-2010	II-12
Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk (ribu) Tahun 2010	II-13
Tabel 2.4 : Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2000 dan 2010.....	II-14
Tabel 2.5 : Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Tahun 2000 dan 2010	II-15
Tabel 2.6 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2008-2010	II-16
Tabel 2.7 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa) Tahun 2010	II-17
Tabel 2.8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Tahun 2008-2010	II-18
Tabel 2.9 : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2007-2011	II-19
Tabel 2.10 : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2007-2011	II-20
Tabel 2.11 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah) Tahun 2006-2009	II-21
Tabel 2.12 : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (miliar rupiah) Tahun 2006-2009	II-22

Tabel 2.13 : Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah) Tahun 2006-2009	II-23
Tabel 2.14 : Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (ribu rupiah) Tahun 2006-2009	II-24

BAB III : INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

Tabel 3.1 : Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2008-2010	III-1
Tabel 3.2 : Jumlah Perusahaan Konstruksi dan Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Tahun 2005-2009	III-2
Tabel 3.3 : Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2008 dan 2009	III-9
Tabel 3.4 : Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi dan Bidang Pekerjaan Tahun 2009	III-10
Tabel 3.5 : Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan (juta rupiah) Tahun 2008 dan 2009 ...	III-11
Tabel 3.6 : Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi (ha) Tahun 2004-2008	III-13
Tabel 3.7 : Luas Panen Padi Menurut Provinsi (ha) Tahun 2006-2010	III-14
Tabel 3.8 : Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) Tahun 2007-2009	III-15
Tabel 3.9 : Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2008	III-18
Tabel 3.10 : Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Tahun 2009	III-19
Tabel 3.11 : Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2009	III-21
Tabel 3.12 : Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan 2009/2010 dan Musim Hujan 2010/2011 (status 01 November 2009 – 31 Desember 2010)	III-22

BAB IV : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Tabel 4.1	: Jumlah Danau/ Situ di Indonesia Tahun 2011	IV-15
Tabel 4.2	: Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2011	IV-16
Tabel 4.3	: Jumlah Bendung Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2011	IV-17
Tabel 4.4	: Jumlah Rawa di Indonesia Tahun 2010-2011	IV-18
Tabel 4.5	: Jumlah Embung di Indonesia Tahun 2010-2011	IV-19
Tabel 4.6	: Jumlah Embung Potensi di Indonesia Tahun 2010-2011 ..	IV-20
Tabel 4.7	: Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tahun Anggaran 2010	IV-21
Tabel 4.8	: Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahun Anggaran 2010	IV-22
Tabel 4.9	: Jumlah Embung Sumur Air Tanah di Indonesia Tahun 2011	IV-23
Tabel 4.10	: Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi (ha) Tahun 2010	IV-25
Tabel 4.11	: Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dukungan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2011	IV-26
Tabel 4.12	: Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Pengendalian Banjir dan Abrasi Pantai Tahun 2010-2011..	IV-27
Tabel 4.13	: Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Penyediaan Air Baku Tahun 2010-2011	IV-28
Tabel 4.14	: Data Bencana (Banjir & Tanah Longsor) dan Bangunan SDA (Status Data Bencana 01 November 2009 - 31 Desember 2010)	IV-29

BAB V : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Tabel 5.1	: Progres Pembangunan Jalan Tol Tahun 2011	V-5
Tabel 5.2	: Korelasi Antara Panjang Jalan Dengan PDRB	V-8

Tabel 5.3	: Korelasi Antara Panjang Jalan Dengan PDRB (tanpa DKI Jakarta)	V-10
Tabel 5.4	: Jalan Nasional Bukan Jalan Tol (Menurut Kepmen PU No. 92 Tahun 2011)	V-11
Tabel 5.5	: Jalan Strategis Nasional Rencana (Menurut Kepmen PU No. 92 Tahun 2011)	V-12
Tabel 5.6	: Jalan Nasional Jalan Tol (Menurut Kepmen PU No. 92 Tahun 2011)	V-13
Tabel 5.7	: Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) Tahun 2007-2009	V-14
Tabel 5.8	: Kondisi Jalan Nasional Tahun 2010 (km) (Berdasarkan Survei IRI Akhir Desember 2010)	V-17
Tabel 5.9	: Kondisi Jalan Nasional Tahun 2010 (%) (Berdasarkan Survei IRI Akhir Desember 2010)	V-18
Tabel 5.10	: Kondisi Jalan Nasional (km) (Berdasarkan Data Survei SKJ/RCS Awal 2011 Yang Diinput Melalui SDM IRMS)	V-19
Tabel 5.11	: Kondisi Jalan Nasional (%) (Berdasarkan Data Survei SKJ/RCS Awal 2011 Yang Diinput Melalui SDM IRMS)	V-20
Tabel 5.12	: Kondisi Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan (Berdasarkan Data Survei SKJ/RCS Awal 2011 Yang Diinput Melalui SDM IRMS)	V-21
Tabel 5.13	: Jalan Tol Beroperasi	V-22
Tabel 5.14	: Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi (unit) Tahun Anggaran 2011	V-23
Tabel 5.15	: Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi (%) Tahun Anggaran 2011	V-24
Tabel 5.16	: Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi (m) Tahun Anggaran 2011	V-25
Tabel 5.17	: Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi (%) Tahun Anggaran 2011	V-26
Tabel 5.18	: PDRB dan Jalan Dalam Kondisi Mantap Menurut Provinsi Tahun 2010	V-27

BAB VI : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

Tabel 6.1	: Korelasi Antara Kapasitas Terpasang PDAM
-----------	--

	Dengan Jumlah Penduduk	VI-14
Tabel 6.2	: Korelasi Antara Kapasitas Produksi PDAM Dengan Jumlah SR	VI-15
Tabel 6.3	: Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-16
Tabel 6.4	: Capaian Pembangunan Cipta Karya Pengembangan Permukiman Tahun 2010	VI-18
Tabel 6.5	: Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-19
Tabel 6.6	: Capaian Pembangunan Cipta Karya Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Tahun 2010	VI-20
Tabel 6.7	: Prasarana dan Sarana Air Minum Menurut Provinsi Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-21
Tabel 6.8	: Prasarana dan Sarana Air Minum Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-23
Tabel 6.9	: Capaian Pembangunan Cipta Karya Pengembangan Air Minum Tahun 2010	VI-25
Tabel 6.10	: Rekapitulasi Kondisi Eksisting PDAM di Indonesia Tahun 2009	VI-26
Tabel 6.11	: Jumlah Penduduk Terlayani dan Jumlah Pelanggan Air Minum Tahun 2010	VI-27
Tabel 6.12	: Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-29
Tabel 6.13	: Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pencapaian Renstra Cipta Karya	

	Tahun 2005-2009	VI-31
Tabel 6.14	: Prasarana dan Sarana Drainase Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-33
Tabel 6.15	: Capaian Pembangunan Cipta Karya Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Tahun 2010	VI-35
Tabel 6.16	: Kondisi Eksisting PDAM Tahun 2009 dan Jumlah Penduduk di Indonesia	VI-36

BAB VII : INFORMASI STATISTIK BIDANG PENATAAN RUANG

Tabel 7.1	: Status Perda RTRW di Indonesia Tahun 2011	VII-6
-----------	---	-------

BAB VIII : DATA GENDER KEMENTERIAN PU

Tabel 8.1	: Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-12
Tabel 8.2	: Persentase SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-13
Tabel 8.3	: Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-14
Tabel 8.4	: Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-15
Tabel 8.5	: Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir (2008, 2009, 2010) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Status: 21 Juni 2011)	VIII-16
Tabel 8.6	: Persentase SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir (2008, 2009, 2010) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Status: 21 Juni 2011)	VIII-17

Tabel 8.7	: Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir (2008, 2009, 2010) Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin (Status: 21 Juni 2011)	VIII-18
Tabel 8.8	: Persentase SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir (2008, 2009, 2010) Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin (Status: 21 Juni 2011)	VIII-19
Tabel 8.9	: Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-20
Tabel 8.10	: Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-21
Tabel 8.11	: Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-22
Tabel 8.12	: Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-23
Tabel 8.13	: Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-24
Tabel 8.14	: Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Status: 21 Juni 2011)	VIII-25
Tabel 8.15	: Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Status: 21 Juni 2011)	VIII-26
Tabel 8.16	: Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2006 – 2010	VIII-27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB II : KONDISI UMUM INDONESIA	
Gambar 2.1 : Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2000-2010	II-3
Gambar 2.2 : Distribusi Penduduk Indonesia Tahun 2010 (%)	II-4
Gambar 2.3 : Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (ribu) Tahun 2010	II-5
Gambar 2.4 : Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia (jiwa) Tahun 2004-2010	II-7
Gambar 2.5 : Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Indonesia (%) Tahun 2004-2010	II-7
Gambar 2.6 : Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009	II-9
Gambar 2.7 : PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2009 (miliar rupiah)	II-10
 BAB III : INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN	
Gambar 3.1 : Konstruksi Yang Diselesaikan (juta rupiah) Tahun 2008-2009	III-2
Gambar 3.2 : Luas Lahan Sawah di Indonesia (ha) Tahun 2004-2008 ..	III-3
Gambar 3.3 : Perbandingan Persentase Luas Wilayah, Distribusi Penduduk, Panjang Jalan, dan Kendaraan Bermotor Tahun 2009	III-4
Gambar 3.4 : Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2009	III-6
Gambar 3.5 : Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Jamban Tahun 2009	III-7
Gambar 3.6 : Frekuensi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan 2009/2010 dan Musim Hujan 2010/2011 (Status November 2009 – 31 Desember 2010)	III-8

BAB IV : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

- Gambar 4.1 : Persentase Jumlah Danau/ Situ Tahun 2010-2011 IV-3
- Gambar 4.2 : Jumlah Embung dan Embung Potensi di Indonesia
Tahun 2011 IV-7
- Gambar 4.3 : Persentase Pembangunan Infrastruktur
Sumber Daya Air Dukungan Ketahanan Pangan
Tahun 2010-2011 IV-10
- Gambar 4.4 : Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam
(Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Sumatera IV-12
- Gambar 4.5 : Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam
(Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Jawa dan Bali IV-12
- Gambar 4.6 : Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam
(Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Kalimantan
dan Sulawesi IV-13
- Gambar 4.7 : Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam
(Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Nusa Tenggara
Maluku dan Papua IV-14

BAB V : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

- Gambar 5.1 : Persentase Kondisi Jalan Nasional (%) Tahun 2010 V-3
- Gambar 5.2 : Persentase Kemantapan Jalan Nasional (%)
Tahun 2010 V-3
- Gambar 5.3 : Jumlah Jembatan Nasional (unit) Tahun 2007-2011 V-6
- Gambar 5.4 : Panjang Jembatan Nasional (m) Tahun 2007-2011 V-7
- Gambar 5.5 : Plot Panjang Jalan Kondisi Mantap (km) dan
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 V-8
- Gambar 5.6 : Plot Panjang Jalan Kondisi Mantap (km) dan
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa DKI Jakarta
Tahun 2010 V-9

BAB VI : INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

- Gambar 6.1 : Pencapaian Pembangunan Rumah Susun
Sederhana Sewa (unit) Tahun 2005-2009 VI-2
- Gambar 6.2 : Capaian Pembangunan Cipta Karya

	Pengembangan Permukiman (kawasan) Tahun 2010	VI-3
Gambar 6.3 :	Capaian Pembangunan Cipta Karya Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (kawasan) Tahun 2010	VI-5
Gambar 6.4 :	Pencapaian Prasarana dan Sarana Air Minum Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota (ltr/dtk) Tahun 2005-2009	VI-7
Gambar 6.5 :	Pencapaian Prasarana dan Sarana Air Minum Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota (jiwa terlayani) Tahun 2005-2009	VI-7
Gambar 6.6 :	Jumlah dan Persentase Pelanggan Air Minum Tahun 2010	VI-10
Gambar 6.7 :	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan (kab/ kota) Permukiman Kota Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-10
Gambar 6.8 :	Prasarana dan Sarana Drainase (ha) Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009	VI-10
Gambar 6.9 :	Capaian Pembangunan Cipta Karya Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (kawasan) Tahun 2010	VI-11
Gambar 6.10:	Plot Kapasitas Terpasang PDAM (l/det) dan Jumlah Penduduk (jiwa)	VI-13
Gambar 6.11:	Plot Kapasitas Produksi PDAM (l/det) dan Jumlah SR (unit)	VI-14

BAB VIII : DATA GENDER KEMENTERIAN PU

Gambar 8.1 :	Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-2
Gambar 8.2 :	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-3
Gambar 8.3 :	Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut	

	Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-4
Gambar 8.4 :	Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)	VIII-4
Gambar 8.5 :	Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir (2008, 2009, 2010) Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (Status: 21 Juni 2011)	VIII-5
Gambar 8.6 :	Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir (2008, 2009, 2010) Menurut Jenis Kelamin (Status: 21 Juni 2011)	VIII-6
Gambar 8.7 :	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-7
Gambar 8.8 :	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: 21 Juni 2011)	VIII-7
Gambar 8.9 :	Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: Juni 2011)	VIII-8
Gambar 8.10:	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: Juni 2011)	VIII-9
Gambar 8.11:	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011 (Status: Juni 2011)	VIII-10
Gambar 8.12:	Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2006-2010	VIII-11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (*good governance*) pada Kementerian Pekerjaan Umum, diperlukan berbagai unsur pendukung antara lain adalah dukungan pelayanan data yang cepat dan lengkap, pelayanan infrastruktur komunikasi informasi yang lancar dan handal, penyediaan peta dan pelayanan serta analisis statistik ke-PU-an yang memadai, baik dan akurat.

Berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pada Bab VIII Pasal 220, Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. PUSDATA mendapat tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan penyelenggaraan sistem informasi pendukung manajemen Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya PUSDATA menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyusunan program pengolahan data beserta pembinaan dan pengembangannya, penyelenggaraan sistem informasi, pengelolaan serta penyediaan data spasial dan literal. Adapun data literal di sini meliputi data literal dan kestatistikan infrastruktur Pekerjaan Umum dan data kestatistikan pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum.

Program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum yang berwawasan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah bagian dari pelaksanaan program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang ke-PU-an tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan umum, desain, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan pembangunan.

Data serta informasi yang sesuai dengan bidang ke-PU-an ini dapat diperoleh di PUSDATA Kementerian Pekerjaan Umum. Data tersebut merupakan rekapitulasi secara keseluruhan yang sudah terpilah per wilayah dan per gender jika memungkinkan. Selain itu analisis data untuk bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya akan melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Dalam kaitannya dengan fungsinya tersebut, maka unit kerja Eselon III di PUSDATA yakni Balai Informasi Literal menyediakan data terpilah tentang infrastruktur ke-PU-an beserta pendukungnya yang dituangkan dalam Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU), dengan suatu harapan dapat memberi gambaran perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana yang telah ada dapat diwujudkan. Serta dengan adanya dukungan data terpilah, pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana/ infrastruktur bidang Pekerjaan Umum tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan per wilayah, dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan secara setara dan adil.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) ini adalah untuk menyediakan informasi statistik di bidang ke-PU-an serta informasi statistik tentang sektor-sektor terkait lainnya yang responsif gender dan diperuntukkan bagi para pimpinan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum maupun instansi lainnya serta untuk masyarakat pengguna.

Penerbitan BIS-PU secara garis besar memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum. BIS-PU juga dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data bidang/ sektor terkait lainnya yang terpilah menurut gender (jika memungkinkan). Selain itu BIS-PU menyajikan analisis statistik bidang ke-PU-an yang dihubungkan dengan data bidang/ sektor terkait.

Dengan diterbitkannya BIS-PU ini, diharapkan dapat membantu penyusunan perencanaan dan program untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan pada Kementerian Pekerjaan Umum secara efektif, efisien dan tepat sasaran yang bermanfaat.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Buku Induk Statistik PU ini menyajikan data terpilah dan informasi tentang hasil pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan pendukungnya di seluruh provinsi di Indonesia yang dirinci menurut Provinsi. Ruang lingkup data dan informasi ke-PU-an adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air
2. Infrastruktur Bidang Bina Marga
3. Infrastruktur Bidang Cipta Karya
4. Bidang Penataan Ruang

Sedangkan untuk informasi pendukung dan data terpilah (gender), meliputi :

1. Wilayah Indonesia
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi
4. Konstruksi
5. Potensi Lahan
6. Angkutan Darat
7. Perumahan dan Permukiman
8. Bencana Alam

Penyajian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabulasi dan grafik.

BAB II

KONDISI UMUM INDONESIA

2.1 Wilayah Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.504 pulau. Posisi Indonesia yang strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudera mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Dikarenakan letak geografisnya pula, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami.

2.1.1 Luas Wilayah

Indonesia terletak antara 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Jika dibentangkan, maka wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km², terdiri atas 1,9 juta km² daratan dan 3,3 juta km² lautan. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 480.793,28 km², Jawa dengan luas 129.438,28 km², Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 544.150,07 km², Sulawesi dengan luas 188.522,36 km², dan Papua dengan luas 416.060,32 km². Luas wilayah per provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, maka batas wilayah Indonesia di bagian

- Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
- Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat : Samudera Hindia, dan
- Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik.

2.1.2 Wilayah Administrasi

Indonesia terdiri dari 33 provinsi, 2 di antaranya adalah Daerah Istimewa (DI), yaitu DI Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam, dan 1 Daerah Khusus Ibukota (DKI), yaitu DKI Jakarta. Pada Desember 2010, di seluruh provinsi di Indonesia terdapat 399 kabupaten, 98 kota, 6.699 kecamatan, dan 77.548 desa (Tabel 2.2).

Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan Gubernur, kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan Bupati, dan kota memiliki DPRD Kota dan Walikota. Namun di Jakarta tidak terdapat DPRD Kabupaten atau Kota karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukan daerah otonom. Sedangkan dua DI yang disebutkan, memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya.

2.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2.2.1 Kependudukan

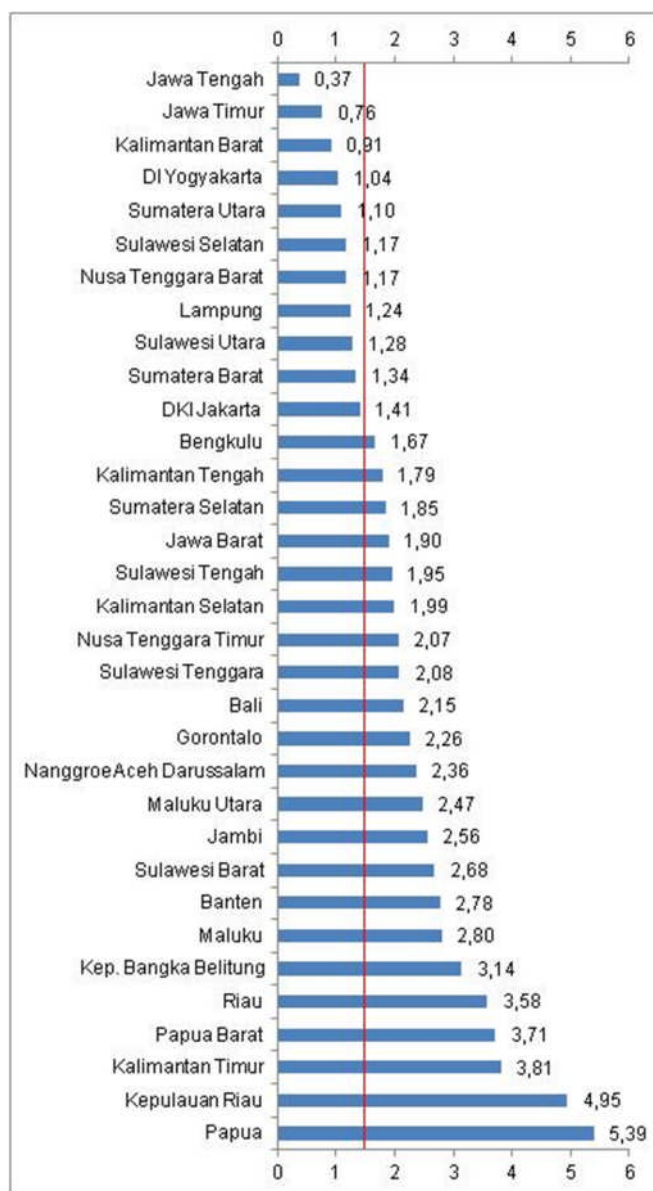
Penduduk Indonesia secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu suku Melayu di bagian barat Indonesia, dan suku Papua di bagian timur Indonesia yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Selain itu, ada pula penduduk pendatang yang jumlahnya tidak terlalu banyak, seperti Tionghoa, India, dan Arab. Penduduk pendatang sebagian besar masuk ke wilayah nusantara melalui jalur perdagangan, kemudian menetap menjadi bagian dari penduduk Indonesia.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil akhir Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,64 juta jiwa, yang terdiri dari 119,63 juta laki-laki dan 118,01 juta perempuan.

Dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2000 yang mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 205,13 juta jiwa, maka selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2000-2010) terjadi laju pertumbuhan sekitar 1,49% per tahun. Papua menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu 5,39%. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2000-2010



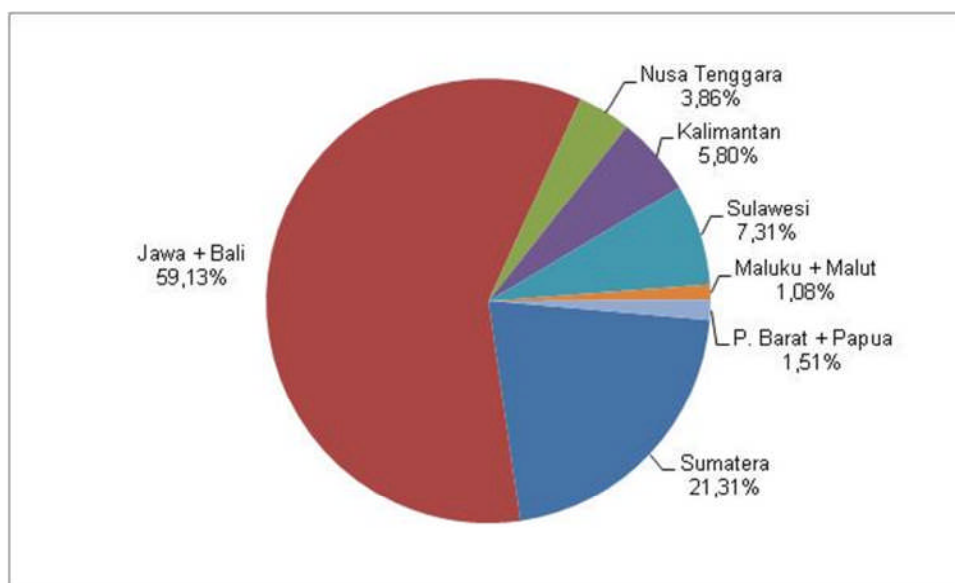
Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS RI
 Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011
 Catatan: Garis merah menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional (1,49)

Secara nasional, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia adalah 101, yang artinya jumlah penduduk laki-laki satu persen lebih banyak dibandingkan perempuan. *Sex ratio* terbesar terdapat di Papua, yaitu 113 dan yang terkecil di Nusa Tenggara Barat, yaitu 94.

b. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu 59,13%, kemudian Pulau Sumatera 21,31%. Selanjutnya untuk pulau-pulau yang lain berturut-turut adalah: Sulawesi 7,31%; Kalimantan 5,80%, Nusa Tenggara 3,86%, Papua + Papua Barat 1,51%, dan Maluku + Malut 1,08%. Gambar 2.2 menunjukkan distribusi penduduk di pulau-pulau besar.

Gambar 2.2 Distribusi Penduduk Indonesia Tahun 2010 (%)



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS RI
Perkembangan Beberapa Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011

Dengan luas wilayah Indonesia 1.910.931 km², maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 124 jiwa per km². Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah DKI Jakarta, yaitu 14.469 jiwa per km². Sedangkan yang paling rendah adalah Papua Barat, yaitu 8 jiwa per km² seperti yang terdapat pada Tabel 2.4.

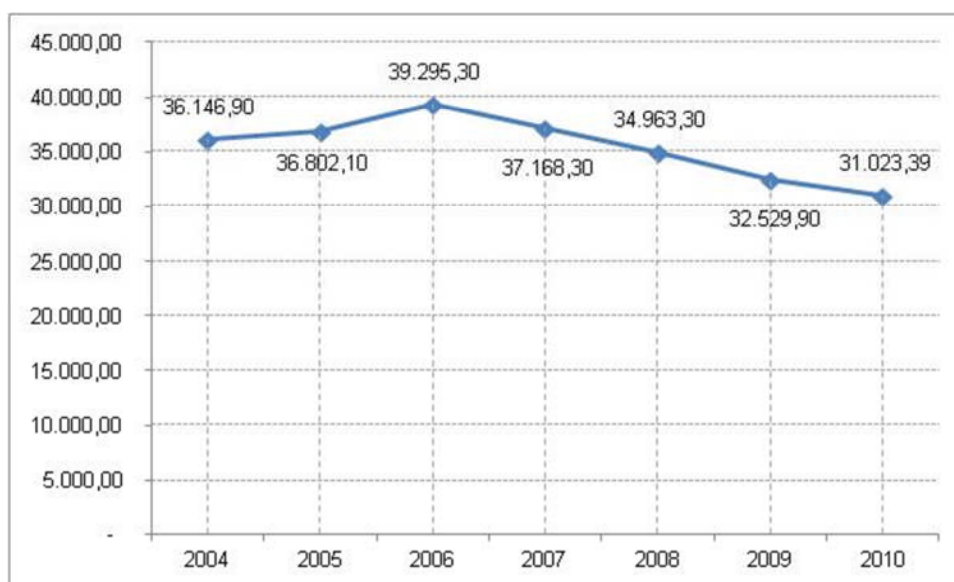
c. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga

Banyaknya rumah tangga pada Sensus Penduduk 2000 tercatat 52 juta rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3,9 atau 4 orang. Pada Sensus Penduduk 2010, banyaknya rumah tangga menjadi 59,12 juta rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga tetap di angka 4 orang (Tabel 2.5). Terjadi peningkatan banyaknya rumah tangga sebanyak 7,12 juta rumah tangga dalam kurun waktu 10 tahun.

d. Kemiskinan

Pada Gambar 2.3 terlihat kecenderungan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara umum mengalami penurunan dari tahun 2006 hingga 2010 setelah sebelumnya terjadi peningkatan dari tahun 2004 hingga 2006. Di tahun 2010 tercatat ada sebanyak 31,02 juta atau 13,33% penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana tahun sebelumnya tercatat 32,53 juta penduduk atau 14,15%.

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (ribu) Tahun 2010



Sumber: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS
Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007
Statistik Indonesia 2007, 2008, 2009, 2010, BPS RI

Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu 36,80% atau sebanyak 761,60 ribu penduduk Papua merupakan penduduk yang tingkat pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan daerah tersebut. Sementara DKI Jakarta

mencatatkan persentase penduduk miskin terendah dengan 3,48% atau sebanyak 312,20 ribu dari penduduk Jakarta adalah penduduk miskin, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Konsep yang digunakan oleh BPS dalam mengukur kemiskinan adalah melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

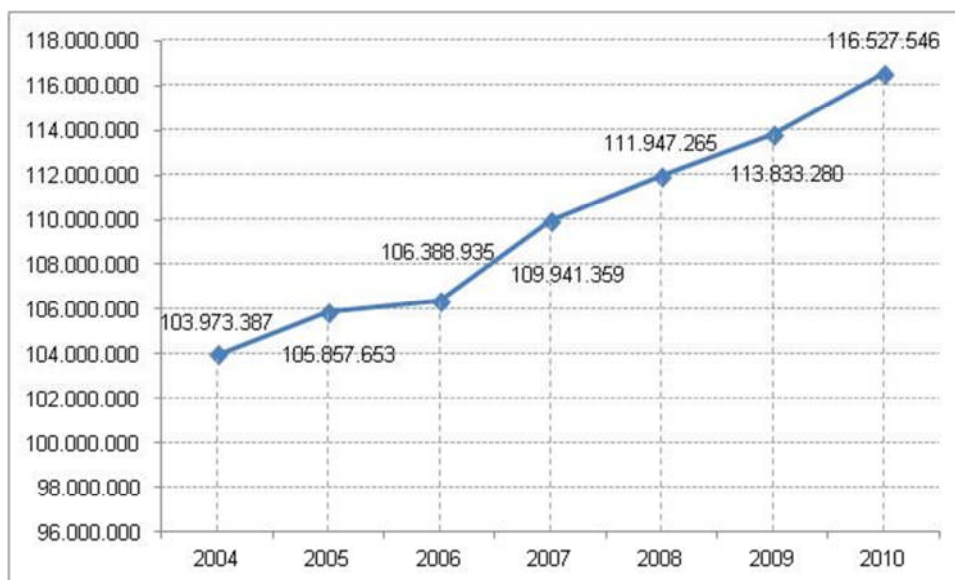
2.2.2 Ketenagakerjaan

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, jumlah angkatan kerja juga meningkat sejak tahun 2004 hingga 2010. Angkatan kerja yang dimaksudkan di sini adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, pernah bekerja, dan belum bekerja, tidak termasuk yang sedang sekolah atau mengurus rumah tangga. Di tahun 2010, tercatat angkatan kerja di Indonesia sebanyak 116,53 juta jiwa.

Jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, maka perkembangan situasi ketenagakerjaan secara umum di Indonesia menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sejak tahun 2005 sampai 2010 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan, hingga di 2010 mencapai angka 7,14%. Terlihat pada Gambar 2.5 tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 sebesar 11,24% merupakan yang tertinggi selama 6 tahun terakhir.

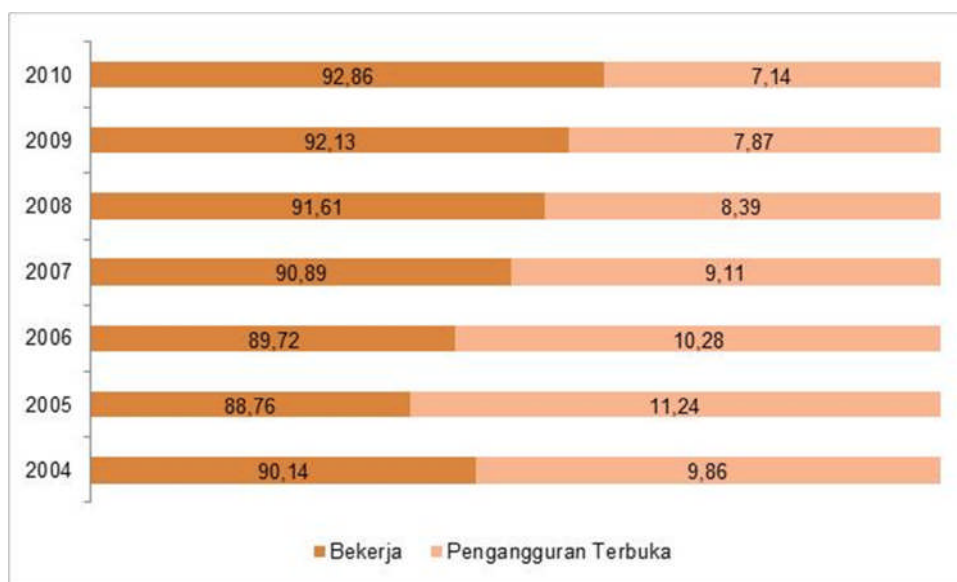
Seluruh kebijakan, usaha, investasi, dan kegiatan ekonomi diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan peluang kerja atau kesempatan kerja. Karena jika pertumbuhan tenaga kerja tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, maka dapat menyebabkan tingkat kesempatan kerja yang cenderung turun.

Gambar 2.4 Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia (jiwa) Tahun 2004-2010



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Gambar 2.5 Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Indonesia (%) Tahun 2004-2010



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.3 Ekonomi

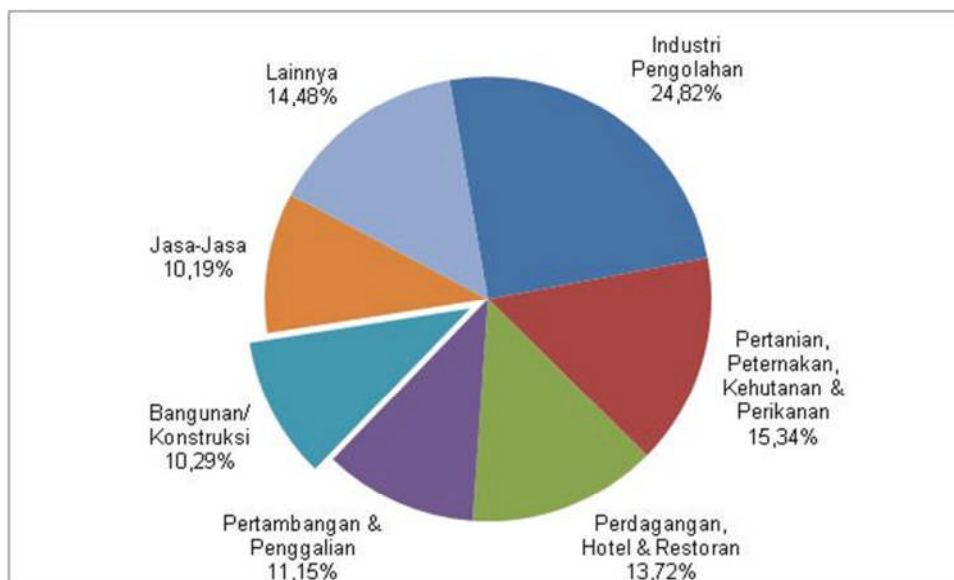
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku, terlihat struktur ekonomi masyarakat Indonesia di tahun 2010 sebagian besar berasal dari sektor Industri Pengolahan (24,82%), kemudian sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (15,34%). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran lapangan usaha sebagian masyarakat Indonesia yang tidak lagi didominasi sektor agraris. Meski demikian, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tetap menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kemandirian bangsa terutama dalam ketahanan pangan. Sedangkan sektor konstruksi menghasilkan 10,29% dari PDB, seperti yang terlihat pada Gambar 2.6 dan Tabel 2.9.

Sementara dari PDB atas dasar harga konstan (Tabel 2.10), laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 adalah 6,10% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah 6,56%. Laju pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan agregat pendapatan tahun 2010 terhadap tahun sebelumnya.

Gambar 2.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009



Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: Lainnya terdiri dari Keuangan, Persewaan dan Jasa; Pengangkutan dan Komunikasi; Listrik, Gas dan Air Bersih

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku sebesar 757 triliun rupiah atau 13,49% dari PDRB Indonesia merupakan yang tertinggi di antara 33 provinsi. Begitu pula untuk PDRB DKI Jakarta atas dasar harga konstan yang sebesar 371,4 triliun rupiah atau 17,06% dari PDRB Indonesia. Sementara PDRB Maluku Utara sebesar 4,7 triliun rupiah atau 0,08% dari PDRB Indonesia merupakan yang terendah untuk PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2009, dan PDRB Gorontalo senilai 2,7 triliun rupiah merupakan yang terendah berdasarkan harga konstan.

PDRB per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya PDRB dan jumlah penduduk daerah tersebut. Ternyata PDRB per kapita Kalimantan Timur di tahun 2009 merupakan yang tertinggi atas dasar harga berlaku, dan PDRB per kapita DKI Jakarta yang tertinggi berdasarkan harga konstan. Lalu kemudian PDRB Riau dan Kepulauan Riau. PDRB per kapita dapat dilihat pada Tabel 2.13-2.14 dan Gambar 2.7.

Gambar 2.7 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2009 (miliar rupiah)



Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: Garis merah merupakan PDRB per Kapita Indonesia sebesar 24,26

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Indonesia

Provinsi	Ibu Kota	Luas Area ¹ (km ²)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ²
1	2	3	4	5
Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	57.956,00	3,03	663
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,82	419
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,20	391
Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,55	139
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	2.408
Jambi	Jambi	50.058,16	2,62	19
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,79	53
Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	950
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	47
Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81	188
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	131
Banten	Serang	9.662,92	0,51	131
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,72	296
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	23
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,50	287
Bali	Denpasar	5.780,06	0,30	85
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	864
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,55	1.192
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,71	339
Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153.564,50	8,04	32
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,03	320
Kalimantan Timur	Samarinda	204.534,34	10,70	370
Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	668
Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	136
Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,24	750
Sulawesi Selatan ³	Makassar	46.717,48	2,44	295
Sulawesi Barat	Mamuju	16.787,18	0,88	-
Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	651
Maluku	Ambon	46.914,03	2,46	1.422
Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	1.474
Papua	Jayapura	319.036,05	16,70	598
Papua Barat	Manokwari	97.024,27	5,08	1.945
Indonesia		1.910.931,32	100,00	17.504

Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008

² Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2004

³ Data jumlah pulau termasuk Sulawesi Barat

**Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa di Indonesia
Tahun 2008-2010**

Provinsi	2008				2009				2010*			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NAD	18	5	276	6.424	18	5	276	6.424	18	5	280	6.459
Sumatera Utara	23	7	407	5.774	25	8	417	5.742	25	8	419	5.770
Sumatera Barat	12	7	166	924	12	7	176	1.010	12	7	176	1.014
Riau	9	2	152	1.622	10	2	151	1.637	10	2	153	1.645
Kepulauan Riau	5	2	59	351	5	2	59	353	5	2	59	353
Jambi	9	2	128	1.342	9	2	128	1.371	9	2	131	1.371
Sumatera Selatan	11	4	216	3.075	11	4	217	3.154	11	4	220	3.165
Bangka Belitung	6	1	40	342	6	1	43	360	6	1	44	361
Bengkulu	9	1	110	1.351	9	1	121	1.444	9	1	123	1.507
Lampung	9	2	204	2.339	12	2	206	2.404	12	2	214	2.463
DKI Jakarta	1	5	44	267	1	5	44	267	1	5	44	267
Jawa Barat	17	9	620	5.871	17	9	625	5.879	17	9	625	5.891
Banten	4	3	154	1.504	4	4	154	1.535	4	4	154	1.535
Jawa Tengah	29	6	573	8.574	29	6	573	8.574	29	6	573	8.577
DI Yogyakarta	4	1	78	438	4	1	78	438	4	1	78	438
Jawa Timur	29	9	661	8.505	29	9	662	8.506	29	9	662	8.506
Bali	8	1	57	707	8	1	57	714	8	1	57	715
Nusa Tenggara B	8	2	116	913	8	2	116	919	8	2	116	989
Nusa Tenggara T	19	1	285	2.805	20	1	287	2.836	20	1	289	2.874
Kalimantan Barat	12	2	175	1.791	12	2	175	1.894	12	2	175	1.894
Kalimantan Tengah	13	1	119	1.457	13	1	125	1.510	13	1	125	1.514
Kalimantan Selatan	11	2	149	1.981	11	2	151	1.981	11	2	151	1.985
Kalimantan Timur	10	4	136	1.421	10	4	136	1.435	10	4	136	1.465
Sulawesi Utara	11	4	150	1.495	11	4	156	1.652	11	4	159	1.673
Gorontalo	5	1	65	584	5	1	66	619	5	1	66	619
Sulawesi Tengah	10	1	147	1.688	10	1	154	1.778	10	1	155	1.815
Sulawesi Selatan	21	3	304	2.946	21	3	304	2.961	21	3	304	2.976
Sulawesi Barat	5	-	66	542	5	-	69	603	5	-	69	603
Sulawesi Tenggara	10	2	184	2.031	10	2	201	2.087	10	2	201	2.088
Maluku	9	2	70	906	9	2	73	906	9	2	77	964
Maluku Utara	6	2	110	1.036	7	2	112	1.062	7	2	112	1.063
Papua	26	1	368	3.416	28	1	385	3.561	28	1	385	3.579
Papua Barat	8	1	131	1.244	10	1	154	1.367	10	1	167	1.410
Indonesia	387	96	6.520	75.666	399	98	6.651	76.983	399	98	6.699	77.548

Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: * Hasil Pemutakhiran Master File Desa (kondisi Desember 2010)

Diambil dari Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011, BPS RI

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin,
Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk (ribu)
Tahun 2010¹⁾**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010 (%/tahun)
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam ²⁾	2.249,0	2.245,5	4.494,4	100	2,36
Sumatera Utara	6.483,4	6.498,8	12.982,2	100	1,10
Sumatera Barat	2.404,4	2.442,5	4.846,9	98	1,34
Riau	2.853,2	2.685,2	5.538,4	106	3,58
Kepulauan Riau	862,1	817,0	1.679,2	106	4,95
Jambi	1.581,1	1.511,2	3.092,3	105	2,56
Sumatera Selatan	3.792,7	3.657,7	7.450,4	104	1,85
Kep. Bangka Belitung	635,1	588,2	1.223,3	108	3,14
Bengkulu	877,2	838,4	1.715,5	105	1,67
Lampung	3.916,6	3.691,8	7.608,4	106	1,24
DKI Jakarta	4.870,9	4.736,8	9.607,8	103	1,41
Jawa Barat	21.907,0	21.146,7	43.053,7	104	1,90
Banten	5.439,2	5.193,0	10.632,2	105	2,78
Jawa Tengah	16.091,1	16.291,5	32.382,6	99	0,37
DI Yogyakarta	1.708,9	1.748,6	3.457,5	98	1,04
Jawa Timur	18.503,5	18.973,2	37.476,8	98	0,76
Bali	1.961,4	1.929,4	3.890,8	102	2,15
Nusa Tenggara Barat	2.183,6	2.316,7	4.500,2	94	1,17
Nusa Tenggara Timur	2.326,5	2.357,3	4.683,8	99	2,07
Kalimantan Barat	2.246,9	2.149,1	4.395,9	105	0,91
Kalimantan Tengah	1.153,7	1.058,3	2.212,1	109	1,79
Kalimantan Selatan	1.836,2	1.790,4	3.626,6	103	1,99
Kalimantan Timur	1.871,7	1.681,5	3.553,1	111	3,81
Sulawesi Utara	1.159,9	1.110,7	2.270,6	104	1,28
Gorontalo	521,9	518,3	1.040,2	101	2,26
Sulawesi Tengah	1.350,8	1.284,2	2.635,0	105	1,95
Sulawesi Selatan	3.924,4	4.110,3	8.034,8	95	1,17
Sulawesi Barat	581,5	577,1	1.158,6	101	2,68
Sulawesi Tenggara	1.121,8	1.110,8	2.232,6	101	2,08
Maluku	775,5	758,0	1.533,5	102	2,80
Maluku Utara	531,4	506,7	1.038,1	105	2,47
Papua	1.505,9	1.327,5	2.833,4	113	5,39
Papua Barat	402,4	358,0	760,4	112	3,71
Indonesia	119.630,9	118.010,4	237.641,3	101	1,49

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS RI

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011

Catatan: ¹⁾ Hasil Akhir Sensus Penduduk 2010

²⁾ Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh dihitung berdasarkan hasil 2005-2010, sedangkan provinsi lain berdasarkan 2000-2010

**Tabel 2.4 Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 dan 2010**

Provinsi	Penduduk (Ribuan)		Distribusi Penduduk		Kepadatan Penduduk ¹⁾ jiwa per km ²	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	3.929,2	4.494,4	1,92	1,89	68	78
Sumatera Utara	11.642,5	12.982,2	5,68	5,46	160	178
Sumatera Barat	4.248,5	4.846,9	2,07	2,04	101	115
Riau	3.907,8	5.538,4	1,90	2,33	45	64
Kep. Riau	1.040,2	1.679,2	0,51	0,71	127	205
Jambi	2.407,2	3.092,3	1,17	1,30	48	62
Sumatera Selatan	6.210,8	7.450,4	3,03	3,14	68	81
Kep. Bangka Belitung	900,0	1.223,3	0,44	0,51	55	74
Bengkulu	1.455,5	1.715,5	0,71	0,72	73	86
Lampung	6.730,7	7.608,4	3,28	3,20	194	220
DKI Jakarta	8.361,1	9.607,8	4,08	4,04	12.592	14.469
Jawa Barat	35.724,1	43.053,7	17,42	18,12	1.010	1.217
Banten	8.098,3	10.632,2	3,95	4,47	838	110
Jawa Tengah	31.223,3	32.382,6	15,22	13,63	952	987
DI. Yogyakarta	3.121,0	3.457,5	1,52	1,45	996	1.104
Jawa Timur	34.766,0	37.476,8	16,95	15,77	727	784
Bali	3.150,1	3.890,8	1,54	1,64	545	673
Nusa Tenggara Barat	4.008,6	4.500,2	1,95	1,89	216	242
Nusa Tenggara Timur	3.823,1	4.683,8	1,86	1,97	78	96
Kalimantan Barat	4.016,3	4.395,9	1,96	1,85	27	30
Kalimantan Tengah	1.855,5	2.212,1	0,90	0,93	12	14
Kalimantan Selatan	2.984,0	3.626,6	1,45	1,53	77	97
Kalimantan Timur	2.451,9	3.553,1	1,20	1,50	12	17
Sulawesi Utara	2.000,9	2.270,6	0,98	0,96	144	164
Gorontalo	833,5	1.040,2	0,41	0,44	74	92
Sulawesi Tengah	2.176,0	2.635,0	1,06	1,11	35	43
Sulawesi Selatan	7.159,2	8.034,8	3,49	3,38	153	172
Sulawesi Barat	891,6	1.158,6	0,43	0,49	53	69
Sulawesi Tenggara	1.820,4	2.232,6	0,89	0,94	48	59
Maluku	1.166,3	1.533,5	0,57	0,65	25	33
Maluku Utara	815,1	1.038,1	0,40	0,44	25	32
Papua	1.684,1	2.833,4	0,82	1,19	5	9
Papua Barat	529,7	760,4	0,26	0,32	5	8
Indonesia	205.132,5	237.641,3	100,00	100,00	107	124

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS RI

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011

Catatan: ¹⁾ Luas Wilayah untuk menghitung kepadatan penduduk tahun 2000 sama dengan tahun 2010

Tabel 2.5 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Tahun 2000 dan 2010

Provinsi	Rumah Tangga (ribu)		Rata-Rata Anggota Rumah Tangga	
	2000	2010	2000	2010
1	2	3	4	5
Nanggroe Aceh Darussalam	921,9	987,9	4,3	4,5
Sumatera Utara	2.609,8	3.074,1	4,5	4,4
Sumatera Barat	1.020,4	1.172,0	4,2	4,2
Riau	932,5	1.269,9	4,2	4,3
Kepulauan Riau	270,0	429,3	3,8	3,7
Jambi	594,3	703,3	4,1	4,1
Sumatera Selatan	1.495,3	1.714,7	4,2	4,3
Kep. Bangka Belitung	214,2	284,4	4,2	4,1
Bengkulu	358,5	415,5	4,1	4,1
Lampung	1.633,4	1.865,3	4,1	4,1
DKI Jakarta	2.232,1	2.324,6	3,7	4,0
Jawa Barat	9.560,7	11.012,5	3,7	3,8
Banten	2.001,8	2.376,1	4,0	4,2
Jawa Tengah	7.900,3	8.674,2	4,0	3,8
DI Yogyakarta	923,4	1.068,1	3,4	3,3
Jawa Timur	9.499,8	10.223,5	3,7	3,7
Bali	799,8	912,1	3,9	3,9
Nusa Tenggara Barat	1.032,4	1.172,2	3,9	3,8
Nusa Tenggara Timur	793,7	1.007,1	4,8	4,7
Kalimantan Barat	901,3	985,4	4,5	4,5
Kalimantan Tengah	482,1	522,4	3,8	4,0
Kalimantan Selatan	785,2	938,8	3,8	3,8
Kalimantan Timur	613,1	775,6	4,0	4,2
Sulawesi Utara	544,7	597,9	3,7	3,8
Gorontalo	214,3	253,9	3,9	3,9
Sulawesi Tengah	503,5	600,7	4,3	4,2
Sulawesi Selatan	1.617,1	1.831,1	4,4	4,4
Sulawesi Barat	199,3	239,8	4,5	4,4
Sulawesi Tenggara	409,3	482,5	4,4	4,5
Maluku	242,7	293,2	4,8	4,6
Maluku Utara	149,1	211,6	5,5	4,7
Papua	415,4	514,6	4,5	4,2
Papua Barat	137,0	184,6	4,3	4,1
Indonesia	52.008,3	59.118,9	3,9	4,0

Sumber: Statistik Indonesia 2010 &

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011, BPS RI

Catatan: Diolah dari Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 DAN 2010

**Tabel 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2008-2010**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	959,7	892,8	861,9	23,53	21,80	20,98
Sumatera Utara	1.613,8	1.499,7	1.490,9	12,55	11,51	11,31
Sumatera Barat	477,2	429,3	430,0	10,67	9,54	9,50
Riau	566,7	527,5	500,3	10,63	9,48	8,65
Kepulauan Riau	136,4	128,2	129,7	9,18	8,27	8,05
Jambi	260,3	249,7	241,6	9,32	8,77	8,34
Sumatera Selatan	1.249,6	1.167,9	1.125,7	17,73	16,28	15,47
Kep. Bangka Belitung	86,7	76,6	67,8	8,58	7,46	6,51
Bengkulu	352,0	324,1	324,9	20,64	18,59	18,30
Lampung	1.591,6	1.558,3	1.479,9	20,98	20,22	18,94
DKI Jakarta	379,6	323,2	312,2	4,29	3,62	3,48
Jawa Barat	5.322,4	4.983,6	4.773,7	13,01	11,96	11,27
Banten	816,7	788,1	758,2	8,15	7,64	7,16
Jawa Tengah	6.189,6	5.725,7	5.369,2	19,23	17,72	16,56
DI. Yogyakarta	616,3	585,8	577,3	18,32	17,23	16,83
Jawa Timur	6.651,3	6.022,6	5.529,3	18,51	16,68	15,26
Bali	215,7	181,7	174,9	6,17	5,13	4,88
Nusa Tenggara Barat	1.080,6	1.051,0	1.009,4	23,81	22,78	21,55
Nusa Tenggara Timur	1.098,3	1.013,2	1.014,1	25,65	23,31	23,03
Kalimantan Barat	508,8	434,8	428,8	11,07	9,30	9,02
Kalimantan Tengah	200,0	165,9	164,2	8,71	7,02	6,77
Kalimantan Selatan	218,9	176,0	182,0	6,48	5,12	5,21
Kalimantan Timur	286,4	239,2	243,0	9,51	7,73	7,66
Sulawesi Utara	223,5	219,6	206,7	10,10	9,79	9,10
Gorontalo	221,6	224,6	209,9	24,88	25,01	23,19
Sulawesi Tengah	524,7	489,8	475,0	20,75	18,98	18,07
Sulawesi Selatan	1.031,7	963,6	913,4	13,34	12,31	11,60
Sulawesi Barat	171,1	158,2	141,3	16,73	15,29	13,58
Sulawesi Tenggara	435,9	434,3	400,7	19,53	18,93	17,05
Maluku	391,3	380,0	378,6	29,66	28,23	27,74
Maluku Utara	105,1	98,0	91,1	11,28	10,36	9,42
Papua	733,1	760,4	761,6	37,08	37,53	36,80
Papua Barat	246,5	256,8	256,3	35,12	35,71	34,88
Indonesia	34.963,3	32.529,9	31.023,4	15,42	14,15	13,33

Sumber: Statistik Indonesia 2009, 2010, BPS RI

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2011

Catatan: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel, BPS

Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa) Tahun 2010

Provinsi	Angkatan Kerja			Bukan Ang. Kerja ²⁾	% Bekerja Terhadap Ang. Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka ¹⁾	Jumlah Ang. Kerja		
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	1.776.254	162.265	1.938.519	1.130.131	91,63
Sumatera Utara	6.125.571	491.806	6.617.377	2.902.897	92,57
Sumatera Barat	2.041.454	152.586	2.194.040	1.112.224	93,05
Riau	2.170.247	207.247	2.377.494	1.357.347	91,28
Jambi	1.462.405	83.278	1.545.683	804.059	94,61
Sumatera Selatan	3.421.193	243.851	3.665.044	1.553.556	93,35
Bengkulu	815.741	39.285	855.026	334.829	95,41
Lampung	3.737.078	220.619	3.957.697	1.866.673	94,43
Kep. Bangka Belitung	585.136	34.927	620.063	311.998	94,37
Kepulauan Riau	769.486	57.049	826.535	373.867	93,10
DKI Jakarta	4.689.761	582.843	5.272.604	2.500.208	88,95
Jawa Barat	16.942.444	1.951.391	18.893.835	11.394.174	89,67
Jawa Tengah	15.809.447	1.046.883	16.856.330	7.018.255	93,79
DI Yogyakarta	1.775.148	107.148	1.882.296	815.838	94,31
Jawa Timur	18.698.108	828.943	19.527.051	8.741.774	95,75
Banten	4.583.085	726.377	5.309.462	2.816.948	86,32
Bali	2.177.358	68.791	2.246.149	656.424	96,94
Nusa Tenggara Barat	2.132.933	119.143	2.252.076	1.128.053	94,71
Nusa Tenggara Timur	2.061.229	71.152	2.132.381	798.025	96,66
Kalimantan Barat	2.095.705	101.620	2.197.325	805.628	95,38
Kalimantan Tengah	1.022.580	44.153	1.066.733	460.211	95,86
Kalimantan Selatan	1.743.622	96.674	1.840.296	742.391	94,75
Kalimantan Timur	1.481.898	166.557	1.648.455	833.864	89,90
Sulawesi Utara	936.939	99.635	1.036.574	600.792	90,39
Sulawesi Tengah	1.164.226	56.228	1.220.454	542.774	95,39
Sulawesi Selatan	3.272.365	298.952	3.571.317	1.996.284	91,63
Sulawesi Tenggara	997.678	48.221	1.045.899	409.473	95,39
Gorontalo	432.926	23.573	456.499	252.182	94,84
Sulawesi Barat	514.867	17.304	532.171	212.550	96,75
Maluku	586.430	64.909	651.339	328.375	90,03
Maluku Utara	411.361	26.397	437.758	234.602	93,97
Papua Barat	316.547	26.341	342.888	151.974	92,32
Papua	1.456.545	53.631	1.510.176	354.413	96,45
Indonesia	108.207.767	8.319.779	116.527.546	55.542.793	92,86

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia, Agustus 2010, BPS RI

Catatan: Diolah dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

- ¹⁾
1. Mencari pekerjaan
 2. Mempersiapkan usaha
 3. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
- ²⁾ Termasuk yang sedang sekolah & mengurus rumah tangga

**Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
Tahun 2008-2010**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
	2008	2009	2010*	2008	2009	2010*
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	9,56	8,71	8,37	60,32	62,50	63,17
Sumatera Utara	9,10	8,45	7,43	68,33	69,14	69,51
Sumatera Barat	8,04	7,97	6,95	63,98	64,19	66,36
Riau	8,20	8,56	8,72	62,83	62,08	63,66
Kepulauan Riau	8,01	8,11	6,90	66,09	64,58	68,85
Jambi	5,14	5,54	5,39	65,95	66,65	65,78
Sumatera Selatan	8,08	7,61	6,65	69,79	68,31	70,23
Kep. Bangka Belitung	5,99	6,14	5,63	64,28	65,06	66,53
Bengkulu	4,90	5,08	4,59	69,88	70,18	71,86
Lampung	7,15	6,62	5,57	68,00	67,77	67,95
DKI Jakarta	12,16	12,15	11,05	68,68	66,60	67,83
Jawa Barat	12,08	10,96	10,33	63,09	62,89	62,38
Banten	15,18	14,97	13,68	64,80	63,74	65,34
Jawa Tengah	7,35	7,33	6,21	68,37	69,27	70,60
DI Yogyakarta	5,38	6,00	5,69	70,51	70,23	69,76
Jawa Timur	6,42	5,08	4,25	69,31	69,25	69,08
Bali	3,31	3,13	3,06	77,86	77,82	77,38
Nusa Tenggara Barat	6,13	6,25	5,29	67,69	68,66	66,63
Nusa Tenggara Timur	3,73	3,97	3,34	71,16	72,09	72,77
Kalimantan Barat	5,41	5,44	4,62	73,66	73,45	73,17
Kalimantan Tengah	4,59	4,62	4,14	71,24	71,22	69,86
Kalimantan Selatan	6,18	6,36	5,25	71,35	71,61	71,26
Kalimantan Timur	11,11	10,83	10,10	64,31	64,41	66,41
Sulawesi Utara	10,65	10,56	9,61	61,16	62,05	63,31
Gorontalo	5,65	5,89	5,16	62,40	63,77	64,42
Sulawesi Tengah	5,45	5,43	4,61	69,76	69,27	69,22
Sulawesi Selatan	9,04	8,90	8,37	62,02	62,48	64,14
Sulawesi Barat	4,57	4,51	3,25	67,37	68,07	71,46
Sulawesi Tenggara	5,73	4,74	4,61	70,64	70,39	71,86
Maluku	10,67	10,57	9,97	62,82	65,44	66,48
Maluku Utara	6,48	6,76	6,03	65,94	64,19	65,11
Papua	4,39	4,08	3,55	76,70	77,75	80,99
Papua Barat	7,65	7,56	7,68	68,15	68,52	69,29
Indonesia	8,39	7,87	7,14	67,18	67,23	67,72

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia, Agustus 2010

Catatan: Diolah dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

*) Agustus 2010

**Tabel 2.9 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2007-2011**

Lapangan Usaha	2007	2008	2009*	2010**	2011*** ¹
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	541.931,5	716.656,2	857.241,4	985.143,6	270.394,7
Pertambangan dan Penggalian	440.609,6	541.334,3	591.912,7	716.391,2	203.549,8
Industri Pengolahan	1.068.653,9	1.376.441,7	1.477.674,3	1.594.330,4	417.643,1
Listrik Gas dan Air Bersih	34.723,8	40.888,6	47.165,9	50.042,2	13.237,1
Bangunan/ Konstruksi	304.996,8	419.711,9	555.201,4	660.967,5	173.482,6
Perdagangan, Hotel dan Restoran	592.304,1	691.487,5	744.122,2	881.108,5	236.657,6
Pengangkutan dan Komunikasi	264.263,3	312.190,2	352.423,4	417.466,0	114.451,7
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	305.213,5	368.129,7	404.013,4	462.788,8	128.324,1
Jasa-Jasa	398.196,7	481.848,3	574.116,5	654.680,0	174.582,3
Produk Domestik Bruto	3.950.893,2	4.948.688,4	5.603.871,2	6.422.918,2	1.732.323,0
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	3.534.406,5	4.427.633,5	5.138.955,2	5.924.008,2	1.593.268,0

Sumber: BPS RI

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

¹ Data sampai triwulan I

Tabel 2.10 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2007-2011

Lapangan Usaha	2007	2008	2009*	2010**	2011*** ¹
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	271.509,3	284.619,1	295.933,7	304.406,2	78.553,0
Pertambangan dan Penggalian	171.278,4	172.496,3	180.159,0	186.435,4	46.945,1
Industri Pengolahan	538.084,6	557.764,4	569.784,9	595.313,1	151.306,1
Listrik Gas dan Air Bersih	13.517,0	14.994,4	17.137,3	18.047,7	4.532,1
Bangunan/ Konstruksi	121.808,9	131.009,6	140.273,0	150.063,3	37.809,6
Perdagangan, Hotel dan Restoran	340.437,1	363.818,2	368.563,7	400.601,0	103.241,2
Pengangkutan dan Komunikasi	142.326,7	165.905,5	191.626,2	217.394,7	57.737,3
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	183.659,3	198.799,6	208.839,7	220.646,0	57.866,1
Jasa-Jasa	181.706,0	193.049,0	205.434,2	217.782,4	56.040,0
Produk Domestik Bruto	1.964.327,3	2.082.456,1	2.177.751,7	2.310.689,8	594.030,5
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	1.821.757,7	1.939.625,9	2.035.894,4	2.169.541,0	559.339,5

Sumber: BPS RI

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

¹ Data sampai triwulan I

**Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi (miliar rupiah)
Tahun 2006-2009**

Provinsi	PDRB			PDRB Tanpa Migas		
	2007	2008*	2009**	2007	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	71.093,4	73.530,7	70.757,8	49.718,2	54.193,1	57.548,6
Sumatera Utara	181.819,7	213.931,7	236.353,6	180.375,4	212.145,5	234.473,5
Sumatera Barat	59.799,0	70.614,2	76.295,4	59.799,0	70.614,2	76.295,4
Riau	210.002,6	276.400,1	319.510,8	117.035,0	149.125,2	179.196,6
Kepulauan Riau	51.826,3	58.586,0	63.893,4	47.420,4	53.852,7	59.062,3
Jambi	32.076,7	41.056,5	42.815,9	26.193,6	31.271,2	35.750,0
Sumatera Selatan	109.895,7	133.330,7	136.557,6	74.905,3	88.766,6	98.133,2
Kep. Bangka Belitung	17.895,0	21.523,5	22.613,9	17.369,4	20.948,5	22.050,7
Bengkulu	12.874,3	14.502,9	15.532,6	12.874,3	14.502,9	15.532,6
Lampung	60.922,0	74.490,6	88.322,5	59.485,5	73.031,8	87.417,0
DKI Jakarta	566.449,4	677.411,1	757.023,5	563.813,3	674.189,8	753.939,0
Jawa Barat	526.220,2	602.291,4	652.028,9	501.445,2	572.339,2	627.534,9
Banten	107.499,7	122.490,7	133.029,4	107.499,7	122.490,7	133.029,4
Jawa Tengah	312.428,8	362.938,7	392.983,9	272.614,7	311.348,8	342.307,3
DI Yogyakarta	32.916,7	38.102,1	41.427,3	32.916,7	38.102,1	41.427,3
Jawa Timur	534.919,3	619.003,6	684.230,9	533.367,1	617.087,8	681.790,1
Bali	42.336,4	49.922,6	57.579,3	42.336,4	49.922,6	57.579,3
Nusa Tenggara Barat	33.522,2	35.261,7	41.786,3	33.522,2	35.261,7	41.786,3
Nusa Tenggara Timur	19.137,0	21.635,2	24.138,7	19.137,0	21.635,2	24.138,7
Kalimantan Barat	42.478,6	48.414,4	53.865,8	42.478,6	48.414,4	53.865,8
Kalimantan Tengah	27.931,9	32.438,3	36.224,0	27.931,9	32.438,3	36.224,0
Kalimantan Selatan	39.438,8	45.758,0	51.177,3	38.852,8	45.132,2	50.548,3
Kalimantan Timur	222.628,9	314.213,5	281.414,2	98.007,7	133.585,6	151.328,4
Sulawesi Utara	24.081,1	27.843,0	32.049,8	24.052,1	27.810,5	32.010,4
Gorontalo	4.760,7	5.906,7	7.082,6	4.760,7	5.906,7	7.082,6
Sulawesi Tengah	22.757,6	28.151,5	32.057,2	22.294,1	27.489,5	31.324,1
Sulawesi Selatan	69.271,9	85.143,2	99.904,7	69.107,1	84.966,3	99.707,8
Sulawesi Barat	6.192,8	7.778,0	8.671,8	6.192,8	7.778,0	8.671,8
Sulawesi Tenggara	17.953,1	22.202,8	25.655,9	17.953,1	22.202,8	25.655,9
Maluku	5.698,8	6.269,7	7.069,1	5.682,7	6.251,9	7.049,3
Maluku Utara	3.160,0	3.856,4	4.687,8	3.160,0	3.856,4	4.687,8
Papua	55.380,5	54.221,6	66.651,9	55.380,5	54.221,6	66.651,9
Papua Barat	10.367,3	12.469,0	14.547,7	7.449,6	8.733,3	10.210,9
Jumlah 33 Provinsi	3.535.736,4	4.201.690,1	4.577.941,5	3.175.132,1	3.719.617,3	4.154.011,2
Indonesia	3.950.893,2	4.951.356,7	5.613.441,7	3.534.406,5	4.427.193,3	5.146.512,1

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: * Angka sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.12 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Provinsi (miliar rupiah)
Tahun 2006-2009

Provinsi	PDRB			PDRB Tanpa Migas		
	2007	2008*	2009**	2007	2008*	2009**
2	4	5	6	8	9	10
Nanggroe Aceh Darussalam	35.983,1	34.085,5	32.182,8	26.022,2	26.510,6	27.549,1
Sumatera Utara	99.792,3	106.172,4	111.559,2	99.085,7	105.431,9	110.850,7
Sumatera Barat	32.913,0	35.007,9	36.464,6	32.913,0	35.007,9	36.464,6
Riau	86.213,3	91.085,4	93.729,5	39.420,8	42.596,9	45.338,4
Kepulauan Riau	34.713,8	37.021,4	38.322,7	32.937,7	35.314,3	36.604,7
Jambi	14.275,2	15.297,8	16.272,3	12.775,1	13.716,5	14.662,4
Sumatera Selatan	55.262,1	58.065,5	60.446,5	42.106,1	44.763,1	47.022,9
Kep. Bangka Belitung	9.464,5	9.889,5	10.238,4	9.257,0	9.702,8	10.068,5
Bengkulu	7.037,4	7.384,0	7.682,1	7.037,4	7.384,0	7.682,1
Lampung	32.694,9	34.414,7	36.160,5	32.231,9	33.951,0	35.759,5
DKI Jakarta	332.971,3	353.694,1	371.399,3	332.033,9	352.753,7	370.499,7
Jawa Barat	274.180,3	290.180,0	302.629,6	265.834,0	281.719,5	293.548,7
Banten	65.046,8	68.802,9	72.031,1	65.046,8	68.802,9	72.031,1
Jawa Tengah	159.110,3	167.790,4	175.685,3	149.083,1	157.023,6	165.188,0
DI Yogyakarta	18.291,5	19.208,9	20.051,5	18.291,5	19.208,9	20.051,5
Jawa Timur	287.814,2	304.922,7	320.210,5	286.912,1	303.838,2	318.854,3
Bali	23.497,0	24.900,6	26.228,3	23.497,0	24.900,6	26.228,3
Nusa Tenggara Barat	16.369,2	16.799,8	18.310,4	16.369,2	16.799,8	18.310,4
Nusa Tenggara Timur	10.902,4	11.426,6	11.910,9	10.902,4	11.426,6	11.910,9
Kalimantan Barat	26.260,6	27.682,9	29.001,8	26.260,6	27.682,9	29.001,8
Kalimantan Tengah	15.754,5	16.725,5	17.642,2	15.754,5	16.725,5	17.642,2
Kalimantan Selatan	25.922,3	27.538,5	28.918,9	25.454,0	27.074,5	28.458,4
Kalimantan Timur	98.386,4	103.102,4	105.493,7	52.736,8	55.965,6	59.523,6
Sulawesi Utara	14.344,3	15.428,4	16.638,9	14.319,2	15.401,4	16.607,0
Gorontalo	2.339,2	2.520,7	2.710,7	2.339,2	2.520,7	2.710,7
Sulawesi Tengah	13.683,9	14.745,3	15.874,7	13.467,2	14.465,3	15.574,4
Sulawesi Selatan	41.332,4	44.549,8	47.314,0	41.242,7	44.456,8	47.213,0
Sulawesi Barat	3.567,8	3.872,5	4.106,0	3.567,8	3.872,5	4.106,0
Sulawesi Tenggara	9.331,7	10.010,6	10.768,6	9.331,7	10.010,6	10.768,6
Maluku	3.633,5	3.787,1	3.992,8	3.621,7	3.774,8	3.980,1
Maluku Utara	2.501,2	2.650,8	2.810,2	2.501,2	2.650,8	2.810,2
Papua	19.200,3	19.051,2	22.926,5	19.200,3	19.051,2	22.926,5
Papua Barat	5.934,3	6.369,4	6.768,2	4.566,1	4.962,3	5.327,7
Jumlah 33 Provinsi	1.878.725,0	1.984.185,0	2.076.482,7	1.736.120,1	1.839.467,5	1.935.276,1
Indonesia	1.964.327,3	2.082.315,9	2.176.975,5	1.821.757,7	1.939.482,9	2.035.125,1

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: * Angka sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah)
Tahun 2006-2009**

Provinsi	PDRB per Kapita			PDRB per Kapita Tanpa Migas		
	2007	2008*	2009**	2007	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	16.831,6	17.124,4	16.215,9	11.771,0	12.620,9	13.188,7
Sumatera Utara	14.166,6	16.402,9	17.840,2	14.054,1	16.265,9	17.698,3
Sumatera Barat	12.729,2	14.825,3	15.802,8	12.729,1	14.825,3	15.802,8
Riau	41.412,5	53.265,0	60.210,8	23.079,3	28.737,9	33.769,1
Kepulauan Riau	37.207,5	40.318,7	42.165,7	34.044,4	37.061,2	38.977,4
Jambi	11.697,4	14.724,7	15.107,1	9.552,0	11.215,3	12.614,0
Sumatera Selatan	15.654,7	18.721,5	18.906,9	10.670,3	12.464,1	13.586,9
Kep. Bangka Belitung	16.169,7	19.174,1	19.869,4	15.694,8	18.662,0	19.374,5
Bengkulu	7.963,3	8.832,9	9.318,2	7.963,3	8.832,9	9.318,2
Lampung	8.357,2	10.078,4	11.789,0	8.160,1	9.881,0	11.668,1
DKI Jakarta	62.490,3	74.064,9	82.079,9	62.199,5	73.712,7	81.745,4
Jawa Barat	13.048,2	14.719,4	15.710,9	12.433,8	13.987,4	15.120,8
Banten	11.407,7	12.756,2	13.598,3	11.407,7	12.756,2	13.598,3
Jawa Tengah	9.648,7	11.124,1	11.957,7	8.419,2	9.542,9	10.415,7
DI Yogyakarta	9.584,1	10.985,2	11.830,1	9.584,1	10.985,2	11.830,1
Jawa Timur	14.498,2	16.687,1	18.350,8	14.456,1	16.635,4	18.285,3
Bali	12.166,3	14.198,7	16.214,9	12.166,3	14.198,7	16.214,9
Nusa Tenggara Barat	7.809,5	8.080,6	9.424,0	7.809,5	8.080,6	9.424,0
Nusa Tenggara Timur	4.301,5	4.771,4	5.225,2	4.301,5	4.771,4	5.225,2
Kalimantan Barat	10.166,0	11.394,0	12.471,4	10.166,0	11.394,0	12.471,4
Kalimantan Tengah	13.771,1	15.767,4	17.366,8	13.771,1	15.767,4	17.366,8
Kalimantan Selatan	11.610,9	13.276,2	14.638,3	11.438,4	13.094,6	14.458,4
Kalimantan Timur	73.601,2	101.533,7	88.920,1	32.401,4	43.166,3	47.816,1
Sulawesi Utara	11.012,0	12.610,0	14.379,5	10.998,8	12.595,3	14.361,8
Gorontalo	4.957,5	6.075,6	7.198,1	4.957,5	6.075,6	7.198,1
Sulawesi Tengah	9.497,4	11.545,2	12.924,9	9.303,9	11.273,7	12.629,3
Sulawesi Selatan	8.996,0	10.908,8	12.632,5	8.974,6	10.886,1	12.607,6
Sulawesi Barat	6.091,1	7.535,0	8.276,7	6.091,1	7.535,0	8.276,7
Sulawesi Tenggara	8.837,3	10.700,3	12.111,6	8.837,4	10.700,3	12.111,6
Maluku	4.377,0	4.747,1	5.277,4	4.364,6	4.733,6	5.262,6
Maluku Utara	3.346,4	4.018,7	4.808,0	3.346,4	4.018,7	4.808,0
Papua	27.475,9	26.365,7	31.777,1	27.475,9	26.365,7	31.777,1
Papua Barat	14.479,4	17.081,8	19.557,1	10.404,5	11.964,1	13.726,9
Jumlah 33 Provinsi	15.669,7	18.386,3	19.786,3	14.071,5	16.276,8	17.954,0
Indonesia	17.509,6	21.666,7	24.261,8	15.663,8	19.373,0	22.243,7

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: * Angka sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (ribu rupiah)
Tahun 2006-2009**

Provinsi	PDRB per Kapita			PDRB per Kapita Tanpa Migas		
	2007	2008*	2009**	2007	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	8.519,1	7.938,1	7.375,5	6.160,9	6.174,0	6.313,6
Sumatera Utara	7.775,4	8.140,6	8.420,6	7.720,3	8.083,8	8.367,1
Sumatera Barat	7.006,0	7.349,8	7.552,8	7.006,0	7.349,6	7.552,8
Riau	17.001,2	17.553,0	17.663,0	7.773,8	8.208,8	8.543,9
Kepulauan Riau	24.922,0	25.478,0	25.290,6	23.646,9	24.303,1	24.156,8
Jambi	5.205,7	5.486,5	5.741,5	4.658,7	4.919,3	5.173,4
Sumatera Selatan	7.872,1	8.153,2	8.369,0	5.998,0	6.285,4	6.510,5
Kep. Bangka Belitung	8.552,0	8.810,0	8.995,8	8.364,5	8.643,7	8.846,5
Bengkulu	4.352,9	4.497,2	4.608,6	4.352,9	4.497,2	4.608,6
Lampung	4.485,0	4.656,2	4.826,6	4.421,5	4.593,5	4.773,1
DKI Jakarta	36.733,1	38.671,2	40.268,8	36.629,7	38.568,4	40.171,2
Jawa Barat	6.798,6	7.091,7	7.292,0	6.591,6	6.884,9	7.073,2
Banten	6.902,7	7.165,1	7.363,1	6.902,7	7.165,1	7.363,1
Jawa Tengah	4.913,8	5.142,8	5.345,7	4.604,1	4.812,8	5.026,3
DI Yogyakarta	5.325,8	5.538,1	5.725,9	5.325,8	5.538,1	5.725,9
Jawa Timur	7.800,8	8.220,1	8.587,9	7.776,3	8.190,8	8.551,5
Bali	6.752,4	7.082,1	7.386,1	6.752,4	7.082,1	7.386,1
Nusa Tenggara Barat	3.813,4	3.849,9	4.129,5	3.813,4	3.849,9	4.129,5
Nusa Tenggara Timur	2.450,6	2.520,0	2.578,3	2.450,6	2.520,0	2.578,3
Kalimantan Barat	6.284,7	6.515,0	6.714,7	6.284,7	6.515,0	6.714,7
Kalimantan Tengah	7.767,3	8.129,8	8.458,2	7.767,3	8.129,8	8.458,2
Kalimantan Selatan	7.631,6	7.990,0	8.271,7	7.493,7	7.855,4	8.140,0
Kalimantan Timur	32.526,6	33.316,1	33.333,5	17.434,8	18.084,5	18.808,0
Sulawesi Utara	6.559,5	6.987,5	7.465,2	6.548,0	6.975,2	7.450,9
Gorontalo	2.435,9	2.592,7	2.754,9	2.435,9	2.592,7	2.754,9
Sulawesi Tengah	5.710,7	6.047,2	6.400,4	5.620,3	5.932,4	6.279,3
Sulawesi Selatan	5.367,6	5.707,8	5.982,7	5.356,0	5.695,9	5.969,9
Sulawesi Barat	3.509,2	3.751,5	3.918,9	3.509,2	3.751,5	3.918,9
Sulawesi Tenggara	4.593,5	4.824,4	5.083,6	4.593,5	4.824,4	5.083,6
Maluku	2.790,7	2.867,4	2.980,8	2.781,6	2.858,1	2.971,4
Maluku Utara	2.648,7	2.762,4	2.882,3	2.648,7	2.762,4	2.882,3
Papua	9.525,8	9.263,8	10.930,5	9.525,8	9.263,8	10.930,5
Papua Barat	8.288,2	8.725,6	9.098,7	6.377,2	6.798,0	7.162,3
Jumlah 33 Provinsi	8.326,1	8.682,6	8.974,7	7.694,1	8.049,4	8.364,4
Indonesia	8.705,5	9.112,1	9.409,1	8.073,7	8.487,0	8.796,0

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: * Angka sementara

** Angka Sangat Sementara

BAB III

INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1 Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana suatu kegiatan. Hasil kegiatannya antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, dermaga, bangunan pembangkit listrik, dll. Sektor konstruksi menjadi pemacu pembangunan ekonomi nasional karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor ekonomi lainnya.

Di tahun 2010, sektor konstruksi atau bangunan mampu menyerap 5,17% atau sebanyak 5,59 juta tenaga kerja dari 9 sektor utama. Sementara jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Indonesia tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 151.537 perusahaan dari tahun sebelumnya 139.322 perusahaan, seperti terlihat pada Tabel 3.1 dan 3.2. Jika digolongkan dari bidang pekerjaan, terdapat 147.306 perusahaan di bidang arsitektur, 150.749 bidang sipil, dan 8.627 di bidang tata lingkungan (Tabel 3.4). Jumlah tersebut masih mungkin untuk meningkat di tahun berikutnya seiring dengan meningkatnya investasi pemerintah di sektor infrastruktur.

**Tabel 3.1 Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia
Tahun 2008-2010**

Lapangan Pekerjaan Utama	2008	2009	2010
1	4	5	6
Pertanian, Kehutanan Perikanan	40,30	39,68	38,35
Pertambangan	1,04	1,10	1,16
Industri Pengolahan	12,24	12,24	12,78
Listri, Gas & Air	0,20	0,21	0,22
Bangunan	5,30	5,23	5,17
Perdagangan, Rumah Makan & Hotel	20,69	20,93	20,79
Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	6,03	5,83	5,19
Keuangan, Asuransi, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,42	1,42	1,61
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	12,77	13,35	14,75

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010

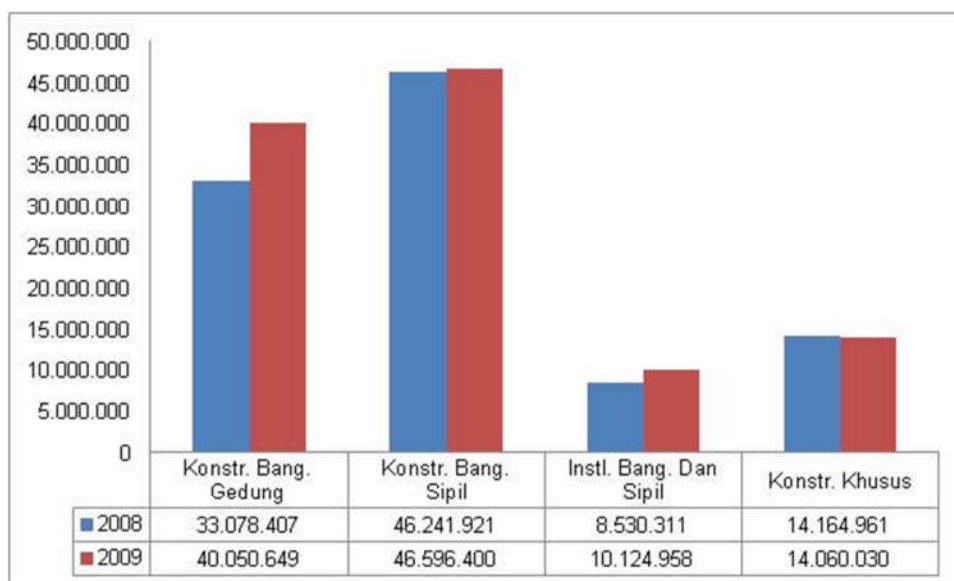
Tabel 3.2 Jumlah Perusahaan Konstruksi dan Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Perusahaan Konstruksi	Nilai Konstruksi (juta rupiah)
1	2	3
2005	79.391	67.317.917.951
2006	76.867	71.943.308.739
2007	77.901	81.674.972.675
2008	139.322	102.015.875.000
2009	151.537	110.832.037.000

Sumber: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Statistik Konstruksi 2009, 2007, BPS RI

Nilai konstruksi adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau surat perintah kerja antara pemilik dengan kontraktor. Nilai konstruksi menjadi komponen utama dalam struktur output perusahaan konstruksi. Pada tahun 2009, nilai konstruksi yang diselesaikan di Indonesia mencapai 110,83 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 36,14% atau 40,05 triliun di isi oleh konstruksi bangunan gedung, 42,04% atau 46,60 triliun konstruksi bangunan sipil, 9,14% atau 10,12 triliun instalasi bangunan dan sipil, dan 12,69% atau 14,06 triliun konstruksi khusus. Nilai konstruksi yang diselesaikan sebagian besar masih berada di Pulau Jawa.

Gambar 3.1 Nilai Konstruksi Yang Diselesaikan (juta rupiah) Tahun 2008-2009

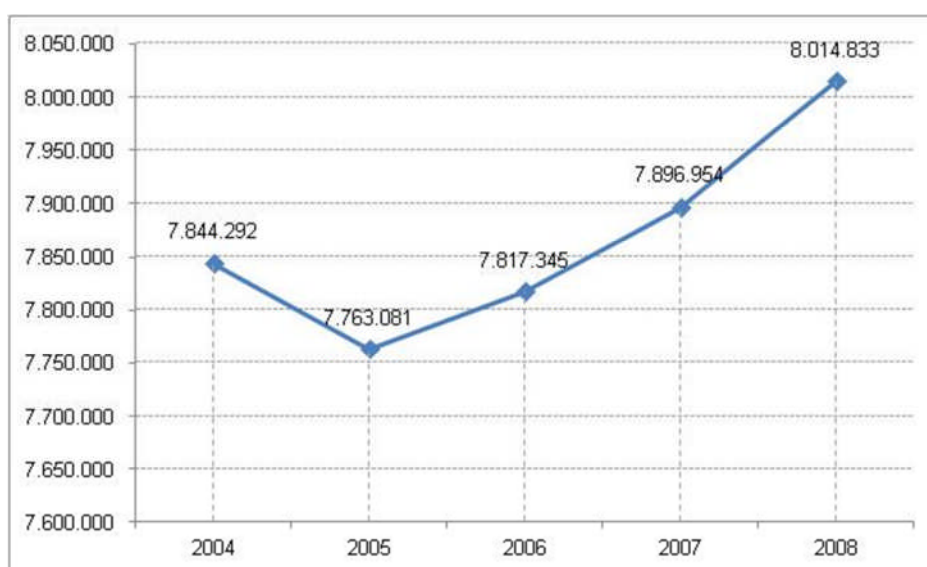


Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

3.2 Potensi Lahan Sawah

Luas lahan sawah di Indonesia meningkat dari tahun 2005 hingga pada tahun 2008 menjadi 8.014.833 hektar. Lahan sawah tersebut tentu membutuhkan saluran irigasi sebagai pemasok air untuk tanamannya. Jika dilihat dari jenis pengairannya, maka sawah terbagi menjadi sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, tadah hujan, dan lainnya. Pada sawah irigasi teknis, saluran induk, sekunder dan bangunan yang dibangun di sawah telah dikelola dan dipelihara oleh pemerintah. Sawah irigasi setengah teknis sama dengan sawah irigasi teknis, hanya pemerintah menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air. Sawah irigasi sederhana, pemerintah ikut membangun sebagian dari jaringannya. Adapun sawah tadah hujan pengairannya tergantung pada air hujan, sawah pasang surut tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sementara sawah lainnya sama seperti lahan sawah lebak, polder, dan rawa-rawa yang ditanami padi atau rembesan, dan lain-lain.

Gambar 3.2 Luas Lahan Sawah di Indonesia (ha) Tahun 2004-2008



Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Pengelolaan sawah serta irigasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kemandirian bangsa dalam ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan impor. Swasembada beras yang dicapai Indonesia pada tahun 2009 merupakan prestasi yang baik mengingat juga terjadinya perubahan iklim yang membuat cuaca tidak mudah diprediksi. Meskipun terjadi penurunan luas areal panen padi di tahun 2010 dari

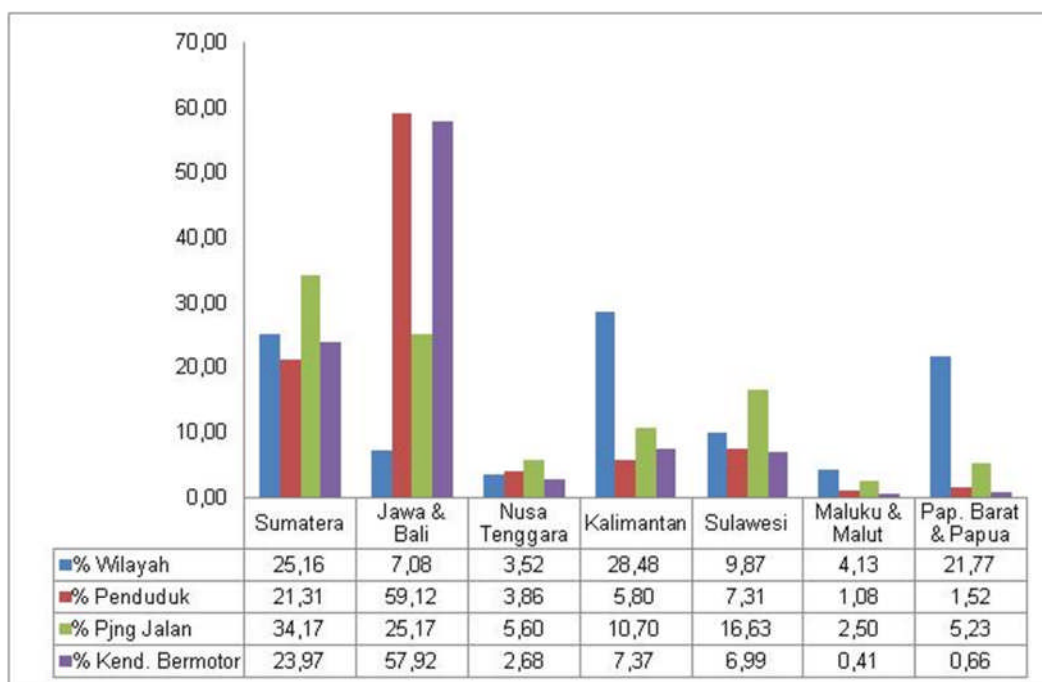
12,88 juta hektar menjadi 12,87 juta hektar, hasil produksi padi menunjukkan angka yang sangat baik, yaitu 65,15 juta ton (angka ramalan II BPS).

3.3 Angkutan Darat (Transportasi)

Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa perpindahan penumpang dan atau barang/ ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara. Pembahasan selanjutnya hanya terkait angkutan umum di darat.

Pada tahun 2009, jumlah kendaraan bermotor tercatat di Kepolisian RI sebanyak 71,477 juta unit. Komposisinya terdiri dari 15,57% atau 11,13 juta unit mobil penumpang, 3,82% atau 2,73 juta unit bis, 7,26% atau 5,19 juta unit truk, dan 73,36% atau 52,43 juta unit sepeda motor. Jumlah ini mengalami peningkatan tiap tahun. Pada Gambar 3.3, terlihat persentase kendaraan di Pulau Jawa & Bali merupakan yang paling tinggi, yaitu 57,92%. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduknya yang memang tinggi sehingga kebutuhan akan mobilisasi juga semakin tinggi.

Gambar 3.3 Perbandingan Persentase Luas Wilayah, Distribusi Penduduk, Panjang Jalan, dan Kendaraan Bermotor Tahun 2009



Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

3.4 Permukiman dan Lingkungan Permukiman

3.4.1 Permukiman

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menjadi salah satu bentuk permukiman yang merupakan kebutuhan dasar manusia perlu mendapat perhatian penting dalam penyediaannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah kebutuhan akan rumah/ tempat tinggal yang juga meningkat. Sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tiap tahun yang secara kumulatif akan bertambah terus, maka muncul permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh :

- Banyak rumah tidak layak huni
- Banyak saluran pembuangan limbah macet
- Penduduk dan bangunannya sangat padat
- Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban
- Biasanya berada di areal marginal (tepi sungai, pinggir rel kereta api)

Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas sampah yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman.

Berdasarkan data Potensi Desa BPS tahun 2008 yang ditampilkan pada Tabel 3.9, ada sebanyak 3.881 desa/ kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat lingkungan permukiman kumuh, dan 71.529 desa/ kelurahan yang tidak terdapat lingkungan permukiman kumuh. Dari jumlah desa/ kelurahan yang terdapat lingkungan permukiman kumuh, ternyata ada sebanyak 10.578 lokasi permukiman kumuh dengan 433.806 unit bangunan dan dihuni oleh sekitar 548.539 keluarga. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan permukiman yang layak dan dapat dijangkau oleh masyarakat terutama

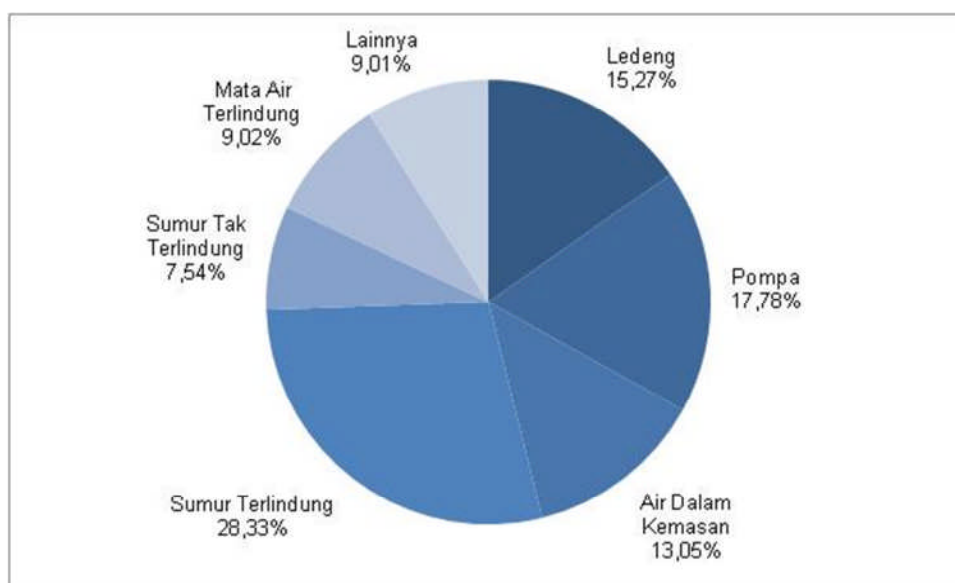
yang berpenghasilan rendah guna mengurangi lingkungan permukiman kumuh yang ada. Program lain seperti mengurangi laju urbanisasi dan pemerataan ekonomi juga dapat menahan bertambahnya permukiman kumuh di perkotaan.

3.4.2 Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman yang bersih memberikan kenyamanan penghuninya. Dari lingkungan yang kumuh atau tidak bersih dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, pencernaan, pernapasan, dll. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perbaikan lingkungan secara fisik mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan.

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, disajikan beberapa indikator kesejahteraan di antaranya bidang air minum dan sanitasi, seperti persentase rumah tangga menurut sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar.

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2009

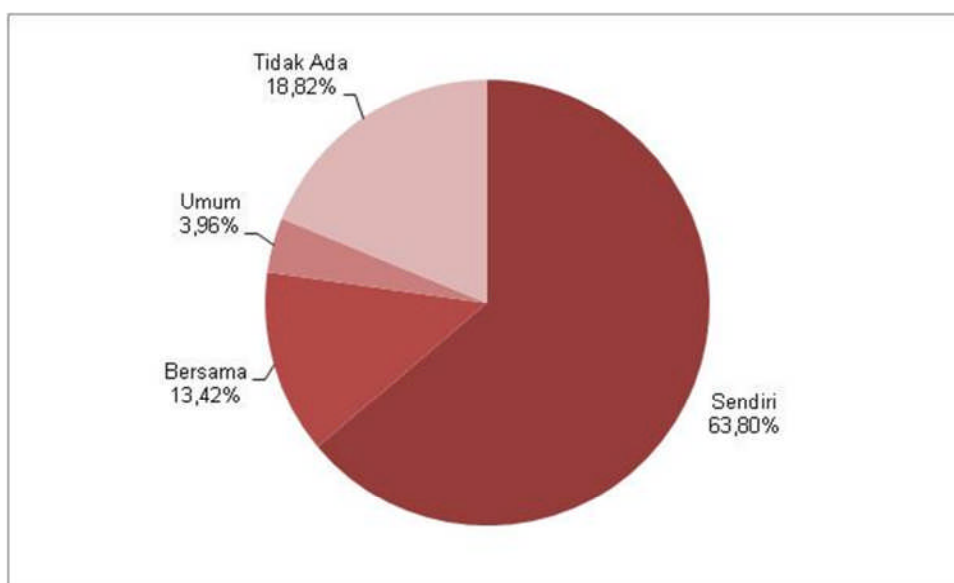


Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: Lainnya terdiri dari mata air terlindung, air sungai, air hujan, dan sumber air minum lainnya

Sumber air minum rumah tangga masyarakat Indonesia paling banyak berasal dari sumur terlindung (28,33%). Terutama di provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Lampung yang lebih dari 50% penduduknya menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum. Sementara yang sedikit digunakan sebagai sumber air minum adalah air hujan (2,58%) dan sumber lainnya (0,25%).

Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Jamban Tahun 2009



Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Jika dilihat dari kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, paling banyak adalah milik sendiri (63,81%). Provinsi yang masih tinggi persentase rumah tangga dengan tidak ada fasilitas buang air besar di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat (45,88%), Gorontalo (40,13%), Papua (38,05%), dan Sulawesi Barat (36,48%). Dapat dilihat pada tabel 3.10 dan 3.11.

3.5 Bencana Alam

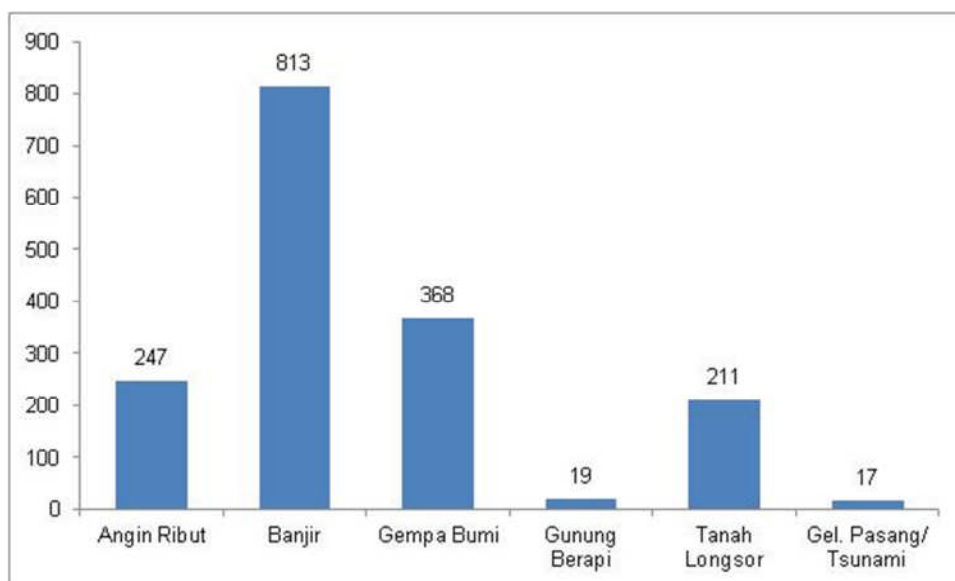
Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup, air, tanah, udara, flora, dan fauna akan berubah baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan makhluk hidup. Selain itu, perubahan

lingkungan hidup bisa terjadi karena adanya polusi atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana alam juga dapat menimbulkan masalah sosial. Gangguan seperti ini bisa terjadi dengan sendirinya (alami) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Efek perubahan iklim hingga Januari 2011 musim hujan 2010/ 2011 masih terasa dampaknya di Indonesia seperti naiknya muka air laut, naiknya temperatur udara, perubahan pola curah hujan, naiknya frekuensi dan intensitas curah hujan, dll. Hal ini menyebabkan timbulnya potensi penurunan ketersediaan air, gangguan keseimbangan air, banjir di daerah yang lingkungannya rusak, tanah longsor, dan gelombang pasang atau intrusi air laut.

Pada Tabel 3.12 menunjukkan kejadian bencana alam dari bulan November 2009 sampai Desember 2010 tercatat sebanyak 1.675 kali. Bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir, yaitu 813 kali, lalu kemudian gempa bumi 368 kali. Namun yang paling banyak mengakibatkan korban jiwa (meninggal, hilang dan mengungsi) adalah bencana gunung berapi karena adanya letusan besar dari Gunung Merapi pada Oktober 2010 yang mengakibatkan sekitar 76 ribu orang mengungsi. Dampak detail dari kejadian bencana alam dapat dilihat pada Tabel 3.12.

**Gambar 3.6 Frekuensi Kejadian Bencana Alam
Musim Hujan 2009/2010 dan Musim Hujan 2010/2011
(Status November 2009 – 31 Desember 2010)**



Sumber: Posko Bencana Kementerian PU

**Tabel 3.3 Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Tahun 2008 dan 2009**

Provinsi	Kecil		Menengah		Besar		Jumlah	
	2008	2009 ^x	2008	2009 ^x	2008	2009 ^x	2008	2009 ^x
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nanggroe Aceh Darussalam	5.228	6.256	816	948	25	23	6.069	7.227
Sumatera Utara	6.600	7.193	500	596	68	29	7.168	7.818
Sumatera Barat	4.216	4.421	219	279	42	11	4.477	4.711
Riau	4.881	5.154	724	826	73	47	5.678	6.027
Kep. Riau	1.452	1.683	228	286	21	2	1.701	1.971
Jambi	2.843	3.045	201	230	15	11	3.059	3.286
Sumatera Selatan	3.126	3.363	506	559	36	30	3.668	3.952
Kep. Bangka Belitung	830	862	62	70	13	3	905	935
Bengkulu	1.058	1.087	69	88	5	1	1.132	1.176
Lampung	2.307	2.442	220	254	15	8	2.542	2.704
DKI Jakarta	4.433	4.861	2.041	2.423	335	359	6.809	7.643
Jawa Barat	9.813	10.663	857	1.033	85	49	10.755	11.745
Banten	2.162	2.476	209	258	9	11	2.380	2.745
Jawa Tengah	10.282	10.831	716	776	52	35	11.050	11.642
DI. Yogyakarta	1.074	1.116	90	115	19	3	1.183	1.234
Jawa Timur	15.907	16.625	901	1.021	94	94	16.902	17.740
Bali	2.060	2.179	142	163	19	6	2.221	2.348
Nusa Tenggara Barat	2.172	2.273	128	146	16	7	2.316	2.426
Nusa Tenggara Timur	3.766	3.909	259	326	31	2	4.056	4.237
Kalimantan Barat	4.667	5.127	444	522	24	8	5.135	5.657
Kalimantan Tengah	3.019	3.201	316	384	31	11	3.366	3.596
Kalimantan Selatan	3.372	3.604	255	331	62	10	3.689	3.945
Kalimantan Timur	5.395	6.018	1.002	1.157	96	105	6.493	7.280
Sulawesi Utara	2.003	2.103	283	297	10	11	2.296	2.411
Gorontalo	1.195	1.276	92	128	14	4	1.301	1.408
Sulawesi Tengah	2.354	2.538	134	182	33	2	2.521	2.722
Sulawesi Selatan	7.357	8.017	487	614	77	38	7.921	8.669
Sulawesi Barat	1.383	1.436	34	47	10	2	1.427	1.485
Sulawesi Tenggara	2.227	2.454	201	242	23	4	2.451	2.700
Maluku	2.013	2.073	224	255	29	15	2.266	2.343
Maluku Utara	1.502	1.705	92	116	9	10	1.603	1.831
Papua	2.707	3.262	471	610	40	31	3.218	3.903
Papua Barat	1.308	1.689	229	316	27	15	1.564	2.020
Indonesia	124.712	134.942	13.152	15.598	1.458	997	139.322	151.537

Sumber: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ^x Angka sementara

**Tabel 3.4 Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi dan Bidang Pekerjaan
Tahun 2009**

Provinsi	Arsitektur	Sipil	Tata Lingkungan	Jumlah
1	2	3	4	5
Nanggroe Aceh Darussalam	6.962	7.136	162	14.260
Sumatera Utara	7.902	7.947	572	16.421
Sumatera Barat	4.559	4.688	73	9.320
Riau	5.904	6.077	265	12.246
Jambi	3.239	3.317	52	6.608
Sumatera Selatan	3.800	3.953	394	8.147
Bengkulu	1.184	1.233	9	2.426
Lampung	2.609	2.750	69	5.428
Kep. Bangka Belitung	1.083	1.066	15	2.164
Kepulauan Riau	1.598	1.898	506	4.002
DKI Jakarta	6.459	6.018	2.594	15.071
Jawa Barat	10.697	11.027	617	22.341
Jawa Tengah	10.911	11.153	519	22.583
DI Yogyakarta	1.171	1.153	40	2.364
Jawa Timur	16.651	17.164	1.135	34.950
Banten	2.915	2.915	204	6.034
Bali	2.250	2.222	171	4.643
Nusa Tenggara Barat	2.422	2.476	40	4.938
Nusa Tenggara Timur	4.146	4.312	14	8.472
Kalimantan Barat	5.788	6.064	65	11.917
Kalimantan Tengah	3.567	3.696	14	7.277
Kalimantan Selatan	3.850	3.978	73	7.901
Kalimantan Timur	7.387	7.500	462	15.349
Sulawesi Utara	2.647	2.712	23	5.382
Sulawesi Tengah	2.807	2.907	16	5.730
Sulawesi Selatan	8.483	8.740	184	17.407
Sulawesi Tenggara	2.580	2.690	7	5.277
Gorontalo	1.382	1.470	8	2.860
Sulawesi Barat	1.480	1.524	11	3.015
Maluku	2.435	2.458	17	4.910
Maluku Utara	1.895	1.889	13	3.797
Papua Barat	2.286	2.272	16	4.574
Papua	4.257	4.344	267	8.868
Indonesia	147.306	150.749	8.627	306.682

Sumber: Statistik Konstruksi 2009, BPS RI

Catatan: Satu perusahaan dapat melakukan lebih dari satu bidang pekerjaan

Tabel 3.5 Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan (juta rupiah) Tahun 2008 dan 2009

Provinsi	Konstr. Bang. Gedung		Konstr. Bang. Sipil	
	2008	2009 ^e	2008	2009 ^e
1	2	3	4	5
Nanggroe Aceh Darussalam	1.310.003	1.421.225	1.504.119	1.272.292
Sumatera Utara	1.036.492	1.464.090	3.194.979	3.375.509
Sumatera Barat	467.744	545.662	1.109.894	1.197.975
Riau	1.499.231	1.605.710	1.649.235	1.532.227
Kep. Riau	777.946	661.649	774.407	1.053.844
Jambi	190.164	361.607	667.586	901.992
Sumatera Selatan	695.822	703.130	1.467.141	1.763.043
Kep. Bangka Belitung	145.820	144.753	414.957	423.364
Bengkulu	163.889	153.214	365.068	324.373
Lampung	176.411	525.753	619.467	639.012
DKI Jakarta	7.382.661	8.783.972	1.784.074	1.862.477
Jawa Barat	3.397.880	5.232.068	6.302.816	7.703.187
Banten	989.206	1.012.874	1.362.861	1.408.238
Jawa Tengah	1.153.942	1.976.102	3.525.071	3.165.418
DI. Yogyakarta	643.959	1.080.111	308.571	241.505
Jawa Timur	3.721.029	4.940.377	3.895.802	3.696.810
Bali	912.195	872.249	391.728	370.777
Nusa Tenggara Barat	395.076	331.511	576.423	478.791
Nusa Tenggara Timur	577.489	433.531	1.269.059	1.235.119
Kalimantan Barat	624.151	531.901	1.449.361	1.309.444
Kalimantan Tengah	580.048	398.440	1.983.076	1.480.205
Kalimantan Selatan	683.310	817.631	1.200.833	1.150.743
Kalimantan Timur	1.372.805	1.602.986	3.054.807	3.064.893
Sulawesi Utara	575.891	431.491	473.941	399.683
Gorontalo	130.697	188.897	827.882	815.470
Sulawesi Tengah	178.935	233.482	700.382	641.322
Sulawesi Selatan	721.967	953.616	1.264.309	1.281.577
Sulawesi Barat	87.763	103.084	436.633	472.223
Sulawesi Tenggara	172.897	273.514	968.419	789.083
Maluku	522.915	513.778	451.556	343.161
Maluku Utara	215.370	185.533	385.024	395.167
Papua	943.878	932.181	1.173.696	1.130.179
Papua Barat	630.819	634.526	688.743	677.294
Indonesia	33.078.407	40.050.649	46.241.921	46.596.400

Lanjutan Tabel 3.5

Provinsi	Instl. Bang. Dan Sipil		Konstruksi Khusus		Jumlah	
	2008	2009 ^e	2008	2009 ^e	2008	2009 ^e
1	6	7	8	9	10	11
Nanggroe Aceh Darussalam	107.937	98.509	95.897	89.166	3.017.955	2.881.191
Sumatera Utara	112.846	208.393	341.266	350.608	4.685.583	5.398.600
Sumatera Barat	91.893	131.656	69.197	65.883	1.738.729	1.941.176
Riau	855.568	989.020	17.500	17.483	4.021.534	4.144.441
Kep. Riau	58.158	100.382	48.443	54.103	1.658.954	1.869.978
Jambi	21.617	64.017	128.540	90.004	1.007.907	1.417.620
Sumatera Selatan	243.223	206.269	75.657	33.224	2.481.843	2.705.666
Kep. Bangka Belitung	7.031	15.400	24.188	31.728	591.996	615.245
Bengkulu	38.920	33.623	54.358	51.220	622.235	562.430
Lampung	64.152	106.623	386.307	366.913	1.246.338	1.638.301
DKI Jakarta	982.873	1.537.880	7.832.032	8.480.867	17.981.640	20.665.197
Jawa Barat	2.037.314	2.716.562	723.467	525.661	12.461.477	16.177.477
Banten	546.074	445.498	475.550	485.219	3.373.691	3.351.829
Jawa Tengah	404.081	223.111	1.745.205	1.643.430	6.828.299	7.008.062
DI. Yogyakarta	57.589	41.754	111.567	93.173	1.121.686	1.456.542
Jawa Timur	384.145	410.009	217.535	110.256	8.218.511	9.157.453
Bali	147.094	151.688	144.989	102.648	1.596.007	1.497.362
Nusa Tenggara Barat	25.393	19.384	111.907	87.625	1.108.799	917.312
Nusa Tenggara Timur	218.625	170.491	109.105	80.534	2.174.278	1.919.675
Kalimantan Barat	232.916	333.701	176.104	150.486	2.482.532	2.325.532
Kalimantan Tengah	359.087	247.279	20.399	16.342	2.942.610	2.142.266
Kalimantan Selatan	95.360	63.272	378.178	347.231	2.357.681	2.378.877
Kalimantan Timur	531.387	718.717	430.401	342.229	5.389.400	5.728.825
Sulawesi Utara	44.466	39.721	35.673	31.457	1.129.971	902.352
Gorontalo	24.752	23.439	19.810	19.485	1.003.141	1.047.290
Sulawesi Tengah	82.446	70.923	45.147	54.208	1.006.910	999.934
Sulawesi Selatan	448.254	519.620	142.412	110.105	2.576.943	2.864.918
Sulawesi Barat	37.635	35.203	27.087	25.283	589.118	635.793
Sulawesi Tenggara	59.898	40.149	25.197	37.805	1.226.411	1.140.551
Maluku	20.027	15.687	38.913	42.205	1.033.411	914.830
Maluku Utara	22.330	15.270	14.007	6.896	636.731	602.866
Papua	43.202	53.907	63.099	66.046	2.223.875	2.182.313
Papua Barat	124.015	277.803	35.827	50.509	1.479.404	1.640.133
Indonesia	8.530.311	10.124.958	14.164.961	14.060.030	102.015.600	110.832.037

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ^e Angka Perkiraan

**Tabel 3.6 Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi (ha)
Tahun 2004-2008**

Provinsi	2004 ^r	2005 ^r	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	346.305	356.649	315.277	312.803	323.010
Sumatera Utara	502.839	462.767	460.486	453.372	478.521
Sumatera Barat	231.939	228.176	229.469	225.774	224.442
Riau	125.966	118.955	124.985	128.242	122.255
Kep. Riau	-	76	82	90	113
Jambi	122.126	117.482	119.242	117.543	116.212
Sumatera Selatan	474.429	484.207	523.922	530.204	569.659
Kep. Bangka Belitung	3.773	4.111	4.048	4.176	3.506
Bengkulu	85.641	84.164	83.885	94.632	89.315
Lampung	316.017	313.621	317.413	342.507	348.732
DKI Jakarta	2.563	1.866	1.466	1.200	1.200
Jawa Barat	932.337	925.900	926.782	934.845	945.544
Banten	196.589	196.122	198.571	196.370	195.583
Jawa Tengah	996.197	995.972	992.455	990.824	990.652
DI. Yogyakarta	56.982	57.188	56.218	55.540	55.332
Jawa Timur	1.108.361	1.100.574	1.096.479	1.096.605	1.108.578
Bali	81.557	80.211	79.252	80.251	80.873
Nusa Tenggara Barat	222.968	227.423	227.395	231.129	230.986
Nusa Tenggara Timur	109.070	100.194	112.715	122.649	124.161
Kalimantan Barat	283.021	292.220	321.838	290.392	292.687
Kalimantan Tengah	167.776	159.516	166.703	159.059	157.406
Kalimantan Selatan	423.884	435.940	440.720	471.042	477.336
Kalimantan Timur	89.769	88.846	90.786	92.934	84.235
Sulawesi Utara	59.393	57.969	60.262	61.875	61.133
Gorontalo	25.955	25.561	25.668	27.794	31.327
Sulawesi Tengah	120.049	113.715	119.463	128.250	129.016
Sulawesi Selatan	626.634	558.935	552.940	560.919	567.408
Sulawesi Barat	-	60.531	54.323	50.800	53.220
Sulawesi Tenggara	69.432	57.760	57.271	78.524	88.635
Maluku	8.542	8.542	8.657	10.035	11.461
Maluku Utara	11.867	11.867	11.867	11.782	13.630
Papua	36.021	28.970	28.970	26.397	29.549
Papua Barat	6.290	7.051	7.735	8.395	9.116
Indonesia	7.844.292	7.763.081	7.817.345	7.896.954	8.014.833

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ^r Angka diperbaiki

**Tabel 3.7 Luas Panen Padi Menurut Provinsi (ha)
Tahun 2006-2010**

Provinsi	2006	2007	2008	2009	2010 ¹
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	320.789	360.717	329.109	359.375	345.793
Sumatera Utara	705.023	750.232	748.540	768.407	740.642
Sumatera Barat	417.846	423.655	421.902	439.542	444.334
Riau	136.177	147.167	147.796	149.423	147.056
Kep. Riau	116	117	134	144	312
Jambi	140.613	149.888	143.034	155.802	160.505
Sumatera Selatan	646.927	691.467	718.797	746.465	757.708
Kep. Bangka Belitung	5.741	9.010	6.266	8.063	10.001
Bengkulu	100.991	123.853	127.506	132.975	133.588
Lampung	494.102	524.955	506.547	570.417	553.025
DKI Jakarta	1.323	1.544	1.640	1.974	2.020
Jawa Barat	1.798.260	1.829.085	1.803.628	1.950.203	1.894.134
Banten	348.414	356.803	362.637	366.138	368.873
Jawa Tengah	1.672.315	1.614.098	1.659.314	1.725.034	1.779.396
DI. Yogyakarta	132.374	133.369	140.167	145.424	144.325
Jawa Timur	1.750.903	1.736.048	1.774.884	1.904.830	1.859.699
Bali	150.557	145030	143.999	150.283	146.816
Nusa Tenggara Barat	341.418	331916	359.714	374.279	364.851
Nusa Tenggara Timur	173.208	166753	187.907	194.219	182.718
Kalimantan Barat	378.042	399.832	423.601	418.929	421.843
Kalimantan Tengah	202.664	229.665	205.684	214.480	240.997
Kalimantan Selatan	462.672	505.846	507.319	490.069	526.874
Kalimantan Timur	150.549	155.484	157.341	146.177	149.959
Sulawesi Utara	94.717	103.189	109.951	114.745	120.195
Gorontalo	43.953	44.548	46.942	48.042	38.349
Sulawesi Tengah	179.078	204.342	211.876	211.232	210.771
Sulawesi Selatan	719.846	770.733	836.298	862.017	884.578
Sulawesi Barat	64.462	66.630	72.471	64.973	69.924
Sulawesi Tenggara	93.826	110.498	102.520	98.130	100.924
Maluku	13.866	15.352	19.142	21.252	19.314
Maluku Utara	17.355	14.497	14.831	13.711	13.968
Papua	19.898	22.957	24.461	26.336	27.201
Papua Barat	8.405	8.357	11.467	10.486	10.256
Indonesia	11.786.430	12.147.637	12.327.425	12.883.576	12.870.949

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ¹ Angka Ramalan II

**Tabel 3.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit)
Tahun 2007-2009**

Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Aceh	2007	86.801	51.812	87.856	1.235.894	1.462.363
	2008	87.142	59.103	87.991	1.388.223	1.622.459
	2009	94.409	62.293	88.532	1.568.661	1.813.895
Sumatera Utara	2007	442.533	54.311	175.672	2.389.981	3.062.497
	2008	485.644	60.244	175.802	2.892.923	3.614.613
	2009	520.712	63.549	176.322	3.244.495	4.005.078
Sumatera Barat	2007	44.689	77.809	123.645	887.982	1.134.125
	2008	49.954	79.645	123.876	909.712	1.163.187
	2009	54.306	83.519	124.802	1.022.505	1.285.132
Riau	2007	367.136	44.519	138.281	1.082.962	1.632.898
	2008	410.974	58.520	138.299	1.084.711	1.692.504
	2009	486.738	61.501	138.371	1.160.184	1.846.794
Kepulauan Riau	2007	75.465	6.252	25.699	378.691	486.107
	2008	105.847	6.766	25.836	473.878	612.327
	2009	136.420	7.097	26.387	530.034	699.938
Jambi	2007	77.461	26.238	129.921	1.201.362	1.434.982
	2008	79.752	51.268	211.506	1.831.909	2.174.435
	2009	91.599	54.574	213.198	2.100.527	2.459.898
Sumatera Selatan	2007	301.955	63.891	99.861	850.639	1.316.346
	2008	346.968	65.611	100.033	1.757.324	2.269.936
	2009	427.376	69.407	100.722	2.013.404	2.610.909
Kepulauan Bangka Belitung	2007	8.961	17.231	31.170	311.712	369.074
	2008	9.238	19.108	146.361	357.711	532.418
	2009	9.451	20.033	147.181	401.926	578.591
Bengkulu	2007	28.672	3.764	39.372	398.511	470.319
	2008	28.837	6.537	39.737	414.243	489.354
	2009	33.102	7.001	41.211	471.601	552.915
Lampung	2007	73.272	14.782	66.396	921.521	1.075.971
	2008	73.559	22.543	66.729	989.243	1.152.074
	2009	76.926	23.996	68.068	1.111.689	1.280.679
DKI Jakarta	2007	3.592.132	788.996	1.247.734	5.972.862	11.601.724
	2008	4.064.237	943.452	1.249.256	6.283.862	12.540.807
	2009	4.484.886	991.903	1.255.351	6.543.841	13.275.981
Jawa Barat	2007	495.295	150.242	451.372	1.991.862	3.088.771
	2008	507.552	162.705	451.495	2.126.612	3.248.364
	2009	526.508	171.000	451.987	2.378.188	3.527.683
Banten	2007	51.369	18.562	26.897	512.632	609.460
	2008	72.978	20.582	67.263	516.321	677.144
	2009	94.964	21.617	67.989	580.490	765.060
Jawa Tengah	2007	309.235	63.941	399.273	6.785.135	7.557.584
	2008	379.427	65.932	399.703	6.998.123	7.843.185
	2009	442.342	69.492	401.425	7.571.526	8.484.785

Lanjutan Tabel 3.8

Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
DI. Yogyakarta	2007	194.272	36.921	84.572	1.901.862	2.217.627
	2008	219.887	39.519	109.926	1.908.731	2.278.063
	2009	264.779	41.903	111.003	2.151.583	2.569.268
Jawa Timur	2007	899.997	25.618	409.371	7.592.152	8.927.138
	2008	940.807	46.932	409.894	7.868.723	9.266.356
	2009	1.005.518	49.770	411.989	8.424.913	9.892.190
Bali	2007	479.721	19.865	208.981	1.561.844	2.270.411
	2008	482.481	25.534	209.756	1.889.831	2.607.602
	2009	526.471	26.948	212.867	2.120.116	2.886.402
Nusa Tenggara Barat	2007	59.994	28.861	55.981	533.741	678.577
	2008	90.206	59.532	56.905	817.954	1.024.597
	2009	118.259	63.856	58.784	929.733	1.170.632
Nusa Tenggara Timur	2007	95.701	47.998	18.379	216.403	378.481
	2008	117.528	48.028	46.987	422.341	634.884
	2009	159.948	50.880	47.767	485.442	744.037
Kalimantan Barat	2007	218.351	30.382	113.992	799.792	1.162.517
	2008	265.143	51.238	114.895	817.482	1.248.758
	2009	354.788	55.036	116.715	908.755	1.435.294
Kalimantan Tengah	2007	134.807	44.819	67.861	399.982	647.469
	2008	162.493	60.954	67.885	401.822	693.154
	2009	198.745	65.586	68.005	450.928	783.264
Kalimantan Selatan	2007	130.773	65.411	144.592	898.861	1.239.637
	2008	131.161	82.704	144.858	905.412	1.264.135
	2009	148.449	88.226	145.924	1.009.358	1.391.957
Kalimantan Timur	2007	176.995	73.477	226.152	991.512	1.468.136
	2008	177.443	93.715	226.803	999.899	1.497.860
	2009	210.563	100.055	229.414	1.116.607	1.656.639
Sulawesi Utara	2007	54.981	69.179	39.181	324.477	487.818
	2008	60.672	85.122	39.195	486.551	671.540
	2009	70.332	90.578	39.265	554.984	755.159
Gorontalo	2007	25.777	11.216	5.300	70.251	112.544
	2008	49.259	66.920	5.321	79.294	200.794
	2009	77.945	70.638	5.405	88.573	242.561
Sulawesi Tengah	2007	120.564	42.921	100.742	669.999	934.226
	2008	120.912	43.007	101.363	1.048.342	1.313.624
	2009	131.786	45.389	103.862	1.191.019	1.472.056
Sulawesi Selatan ¹	2007	231.987	108.005	256.982	465.594	1.062.568
	2008	232.531	127.574	257.696	1.007.412	1.625.213
	2009	249.636	135.265	260.560	1.146.216	1.791.677
Sulawesi Tenggara	2007	13.372	84.001	36.367	107.543	241.283
	2008	13.852	89.545	36.490	499.768	639.655
	2009	16.108	95.246	36.984	586.317	734.655
Maluku	2007	29.824	8.228	15.855	178.612	232.519
	2008	31.293	8.256	16.283	179.445	235.277
	2009	32.154	8.717	18.041	201.536	260.448

Lanjutan Tabel 3.8

Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Maluku Utara	2007	161	2.199	239	20.876	23.475
	2008	180	2.707	277	23.678	26.842
	2009	224	2.878	365	27.261	30.728
Papua ²	2007	42.708	21.972	18.241	299.881	382.802
	2008	61.969	29.867	18.253	302.201	412.290
	2009	81.926	31.619	18.301	340.720	472.566
Indonesia	2007	8.864.961	2.103.423	4.845.937	41.955.128	57.769.449
	2008	9.859.926	2.583.170	5.146.674	47.683.681	65.273.451
	2009^x	11.127.370	2.729.572	5.186.797	52.433.132	71.476.871

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia
Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ^x Angka sementara

¹ Termasuk Sulawesi Barat

² Termasuk Papua Barat

**Tabel 3.9 Permukiman Kumuh di Indonesia
Tahun 2008**

Provinsi	Kualitas Permukiman (desa/ kelurahan)		Jumlah Permukiman Kumuh		
	Kumuh	Tidak Kumuh	Jumlah Lokasi	Jumlah Bangunan Rumah (unit)	Jumlah Keluarga
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	144	6.280	299	4.959	5.857
Sumatera Utara	357	5.410	898	46.570	51.287
Sumatera Barat	34	890	79	2.575	2.972
Riau	60	1.544	143	7.543	8.438
Jambi	48	1.255	128	3.600	3.771
Sumatera Selatan	202	2.877	619	21.958	31.523
Bengkulu	26	1.325	123	3.837	4.233
Lampung	77	2.262	155	8.809	11.986
Bangka Belitung	8	336	16	563	590
Kepulauan Riau	56	270	118	7.741	8.981
DKI Jakarta	175	92	580	86.417	121.884
Jawa Barat	831	5.040	2.848	88.879	109.716
Jawa Tengah	381	8.193	1.048	31.076	38.553
DI Yogyakarta	16	422	37	398	565
Jawa Timur	201	8.304	496	15.867	19.414
Banten	180	1.324	596	19.748	21.220
Bali	33	679	65	1.357	2.248
Nusa Tenggara Barat	60	853	166	9.083	10.527
Nusa Tenggara Timur	45	2.758	109	3.403	4.447
Kalimantan Barat	171	1.620	345	10.432	12.241
Kalimantan Tengah	60	1.388	111	6.195	9.380
Kalimantan Selatan	6	1.968	8	157	246
Kalimantan Timur	129	1.288	312	12.041	15.622
Sulawesi Utara	102	1.392	159	4.951	5.533
Sulawesi Tengah	11	1.675	24	614	860
Sulawesi Selatan	326	2.620	797	27.287	35.726
Sulawesi Tenggara	0	2.028	0	0	0
Gorontalo	0	584	0	0	0
Sulawesi Barat	18	518	60	1.316	1.574
Maluku	30	876	92	1.382	1.842
Maluku Utara	19	1.017	26	574	651
Papua Barat	13	1.192	21	673	944
Papua	62	3.249	100	3.801	5.708
Indonesia	3.881	71.529	10.578	433.806	548.539

Sumber: BPS, Potensi Desa 2008

**Tabel 3.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum
Tahun 2009**

Provinsi	Ledeng	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	9,92	4,75	18,80	40,68	13,04	5,77
Sumatera Utara	22,14	20,26	8,05	22,70	7,69	8,42
Sumatera Barat	20,50	8,03	8,68	28,33	10,31	10,14
Riau	2,19	9,02	23,71	27,80	11,04	1,06
Kepulauan Riau	12,09	14,11	26,33	31,14	9,01	1,89
Jambi	15,66	3,29	8,29	31,41	18,66	2,43
Sumatera Selatan	18,96	4,21	9,50	37,47	12,75	1,76
Kep. Bangka Belitung	1,76	8,52	23,78	49,58	12,56	2,29
Bengkulu	13,27	4,82	5,03	29,02	38,23	3,30
Lampung	4,05	6,41	6,16	50,05	25,47	2,58
DKI Jakarta	22,79	21,86	53,49	1,11	0,07	0,06
Jawa Barat	11,87	26,86	15,32	25,42	6,78	8,66
Banten	7,27	32,50	27,06	17,44	4,53	4,76
Jawa Tengah	16,22	17,19	4,21	38,66	5,84	13,46
DI Yogyakarta	9,67	11,70	12,68	51,55	6,53	3,65
Jawa Timur	14,67	23,85	11,86	31,56	3,49	11,19
Bali	30,65	5,43	23,34	11,12	0,54	20,27
Nusa Tenggara Barat	13,97	10,04	8,08	42,93	7,76	13,75
Nusa Tenggara Timur	17,65	1,97	1,82	18,93	7,82	27,96
Kalimantan Barat	6,16	2,19	5,39	6,34	7,48	5,59
Kalimantan Tengah	16,08	13,81	7,08	12,41	10,24	0,59
Kalimantan Selatan	35,46	11,74	4,44	12,45	14,91	1,02
Kalimantan Timur	40,27	5,51	20,15	7,47	4,71	3,16
Sulawesi Utara	18,24	8,70	19,51	29,01	7,08	12,79
Gorontalo	18,32	6,85	3,78	51,33	8,24	5,20
Sulawesi Tengah	15,55	15,83	6,28	20,97	9,40	18,77
Sulawesi Selatan	21,82	17,12	8,69	24,01	10,21	9,56
Sulawesi Barat	16,36	9,27	5,11	27,13	10,70	9,44
Sulawesi Tenggara	21,41	6,59	2,68	33,85	9,78	16,75
Maluku	18,75	9,41	1,92	29,39	8,09	20,99
Maluku Utara	21,27	2,37	3,31	37,37	15,73	6,97
Papua	12,06	2,17	9,65	8,12	6,44	13,88
Papua Barat	12,02	2,99	15,54	17,89	6,88	9,13
Indonesia	15,27	17,78	13,05	28,33	7,54	9,02

Lanjutan Tabel 3.10

Provinsi	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
1	8	9	10	11	12
Nanggroe Aceh Darussalam	1,95	4,12	0,79	0,18	100,00
Sumatera Utara	5,05	2,65	2,57	0,48	100,00
Sumatera Barat	8,01	3,97	1,75	0,28	100,00
Riau	0,48	3,27	21,18	0,25	100,00
Kepulauan Riau	1,91	0,60	2,58	0,34	100,00
Jambi	0,64	6,86	12,64	0,13	100,00
Sumatera Selatan	0,62	7,80	6,48	0,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,78	0,56	0,15	0,03	100,00
Bengkulu	3,41	2,58	0,08	0,26	100,00
Lampung	3,15	0,64	1,25	0,25	100,00
DKI Jakarta	0,00	0,02	0,44	0,17	100,00
Jawa Barat	3,96	0,75	0,20	0,18	100,00
Banten	3,43	2,26	0,58	0,17	100,00
Jawa Tengah	3,30	0,43	0,59	0,09	100,00
DI Yogyakarta	1,50	0,15	2,40	0,16	100,00
Jawa Timur	2,07	0,44	0,48	0,39	100,00
Bali	4,53	0,83	2,94	0,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,87	0,52	0,04	0,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,77	4,49	1,93	0,66	100,00
Kalimantan Barat	3,55	23,12	40,12	0,06	100,00
Kalimantan Tengah	0,52	33,09	5,87	0,31	100,00
Kalimantan Selatan	0,98	17,65	0,95	0,40	100,00
Kalimantan Timur	1,16	10,38	6,39	0,79	100,00
Sulawesi Utara	2,66	0,32	1,51	0,18	100,00
Gorontalo	2,85	3,15	0,16	0,11	100,00
Sulawesi Tengah	5,35	6,66	1,00	0,19	100,00
Sulawesi Selatan	6,05	1,53	0,77	0,24	100,00
Sulawesi Barat	14,37	7,24	0,35	0,04	100,00
Sulawesi Tenggara	4,96	1,34	2,49	0,16	100,00
Maluku	8,06	1,53	1,73	0,13	100,00
Maluku Utara	4,60	5,66	2,50	0,21	100,00
Papua	24,67	8,89	13,69	0,43	100,00
Papua Barat	7,10	7,22	20,89	0,34	100,00
Indonesia	3,54	2,64	2,58	0,25	100,00

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Tabel 3.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2009

Provinsi	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	57,02	8,40	8,69	25,89	100,00
Sumatera Utara	73,01	7,36	3,85	15,77	100,00
Sumatera Barat	51,87	13,45	6,70	27,97	100,00
Riau	81,27	7,75	2,08	8,89	100,00
Kepulauan Riau	79,88	10,44	1,75	7,94	100,00
Jambi	65,07	8,57	3,58	22,78	100,00
Sumatera Selatan	64,27	12,58	4,61	18,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	68,78	5,80	1,79	23,63	100,00
Bengkulu	66,27	8,75	1,75	23,23	100,00
Lampung	73,18	12,91	1,52	12,38	100,00
DKI Jakarta	77,19	17,72	4,77	0,32	100,00
Jawa Barat	65,51	14,20	6,90	13,39	100,00
Banten	59,56	12,01	3,35	25,08	100,00
Jawa Tengah	63,02	13,66	2,79	20,54	100,00
DI Yogyakarta	69,38	24,99	0,36	5,27	100,00
Jawa Timur	62,80	15,15	1,73	20,32	100,00
Bali	61,54	22,01	0,35	16,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,11	14,56	2,46	45,88	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,59	12,99	3,13	24,29	100,00
Kalimantan Barat	59,47	7,09	4,08	29,36	100,00
Kalimantan Tengah	54,48	16,30	9,58	19,65	100,00
Kalimantan Selatan	60,93	14,69	6,17	18,21	100,00
Kalimantan Timur	79,14	8,71	5,53	6,62	100,00
Sulawesi Utara	65,05	18,15	2,88	13,92	100,00
Gorontalo	35,15	15,55	9,27	40,03	100,00
Sulawesi Tengah	47,67	9,65	6,46	36,22	100,00
Sulawesi Selatan	60,78	12,04	1,83	25,35	100,00
Sulawesi Barat	50,82	10,15	2,54	36,48	100,00
Sulawesi Tenggara	59,21	8,69	2,44	29,66	100,00
Maluku	45,67	9,40	9,56	35,37	100,00
Maluku Utara	42,89	15,37	14,97	26,77	100,00
Papua	41,50	12,77	7,68	38,05	100,00
Papua Barat	59,49	12,37	10,98	17,16	100,00
Indonesia	63,81	13,42	3,96	18,82	100,00

Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

**Tabel 3.12 Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam
Musim Hujan 2009/2010 dan Musim Hujan 2010/2011
(status 01 November 2009 – 31 Desember 2010)**

Provinsi	Kejadian	Meninggal	Hilang	Mengungsi
	(Frekuensi)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
1	2	3	4	5
TOTAL INDONESIA	1.675	938	525	130.730
Wilayah Barat	288	508	344	41.596
NAD	41	0	0	2.597
Sumatera Utara	84	18	4	32.417
Sumatera Barat	49	487	334	4.870
Sumatera Selatan	21	0	0	0
Riau	14	0	0	816
Kepulauan Riau	2	0	0	0
Jambi	22	1	2	800
Bengkulu	25	0	0	0
Lampung	27	2	4	96
Bangka Belitung	3	0	0	0
Wilayah Tengah	930	173	17	80.202
DKI Jakarta	68	2	0	400
Banten	92	6	0	4.120
Jawa Barat	223	58	2	5.028
Jawa Tengah	213	39	7	4.250
D.I.Y.	31	33	0	46.502
Jawa Timur	239	18	4	780
Kalimantan Timur	13	6	0	1.454
Kalimantan Tengah	13	0	0	0
Kalimantan Barat	14	2	0	300
Kalimantan Selatan	24	9	4	17.368
Wilayah Timur	457	257	164	8.932
Bali	12	2	0	0
NTB	22	5	0	650
NTT	39	17	4	142
Sulawesi Selatan	65	18	2	1.600
Sulawesi Tengah	30	12	1	480
Sulawesi Tenggara	16	9	7	200
Gorontalo	21	1	0	120
Sulawesi Utara	51	16	4	1.000
Sulawesi Barat	31	0	0	0
Maluku	90	9	0	75
Maluku Utara	40	2	0	0
Papua	21	4	0	300
Papua Barat	19	162	146	4.365

Lanjutan Tabel 3.12

Provinsi	Tergenang							
	Permukim.	Rmh	Fasum	Jln	Jbtn	Sawah	Perkebunan	Perikanan
	(Ha)	(Buah)	(Buah)	(Km)	(Buah)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL INDONESIA	1.633	333.153	676	1.061	128	99.006	14.380	3.098
Wilayah Barat	295	67.107	65	204	33	12.564	13.292	120
NAD	53	10.050	6	31	2	1.440	40	0
Sumatera Utara	17	8.775	10	36	5	1.612	1.472	20
Sumatera Barat	16	2.885	6	23	12	635	0	0
Sumatera Selatan	85	9.877	0	39	2	4.050	11.310	100
Riau	2	19.461	13	25	1	1.500	200	0
Kepulauan Riau	0	20	0	0	0	0	0	0
Jambi	80	11.040	29	35	10	2.065	250	0
Bengkulu	1	210	0	3	0	120	0	0
Lampung	39	4.519	1	12	1	1.117	20	0
Bangka Belitung	2	270	0	0	0	25	0	0
Wilayah Tengah	1.069	226.206	483	612	66	77.856	423	2.644
DKI Jakarta	80	10.345	13	86	0	0	0	0
Banten	158	37.286	72	74	1	35.944	0	0
Jawa Barat	162	67.623	66	149	10	15.835	20	818
Jawa Tengah	201	30.348	55	84	26	9.858	26	1.575
D.I.Y.	3	498	1	9	1	50	80	0
Jawa Timur	261	42.567	41	120	20	10.829	167	251
Kalimantan Timur	72	7.800	8	12	0	252	0	0
Kalimantan Tengah	14	2.215	3	23	0	0	10	0
Kalimantan Barat	57	5.980	15	18	2	300	120	0
Kalimantan Selatan	61	21.544	209	37	6	4.788	0	0
Wilayah Timur	269	39.840	128	245	29	8.586	665	334
Bali	1	130	0	4	0	0	0	0
NTB	3	386	0	5	0	100	0	0
NTT	23	2.890	13	15	5	20	135	0
Sulawesi Selatan	110	21.263	58	138	3	6.692	230	304
Sulawesi Tengah	23	2.985	4	14	5	390	220	0
Sulawesi Tenggara	6	793	0	6	1	324	0	0
Gorontalo	32	3.408	9	11	2	120	0	0
Sulawesi Utara	14	1.465	1	16	0	20	0	0
Sulawesi Barat	39	4.470	42	27	4	820	70	30
Maluku	16	1.815	1	9	5	100	0	0
Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua	0	35	0	0	0	0	10	0
Papua Barat	2	200	0	0	4	0	0	0

Lanjutan Tabel 3.12

Provinsi	Rusak/ Roboh/ Hanyut							
	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jln (Km)	Jbtn (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bangunan SDA (Buah)
1	14	15	16	17	18	19	20	21
TOTAL INDONESIA	124.080	437	386	145	2	548	3.712	38
Wilayah Barat	16.795	40	78	36	2	50	10	16
NAD	2.533	8	10	2	0	0	0	0
Sumatera Utara	2.524	4	13	5	0	0	0	0
Sumatera Barat	1.446	12	15	14	0	0	0	0
Sumatera Selatan	2.623	3	14	2	1	0	0	0
Riau	3.485	4	9	1	0	0	10	0
Kepulauan Riau	19	0	0	0	0	0	0	0
Jambi	2.850	9	12	10	0	0	0	16
Bengkulu	50	0	1	0	0	0	0	0
Lampung	1.203	0	4	2	1	50	0	0
Bangka Belitung	62	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah	88.135	313	215	77	0	398	1.816	22
DKI Jakarta	2.525	4	29	0	0	0	44	0
Banten	8.008	26	25	1	0	0	50	0
Jawa Barat	20.756	37	52	9	0	330	214	1
Jawa Tengah	12.714	137	36	38	0	48	979	21
D.I.Y.	347	1	3	0	0	0	40	0
Jawa Timur	10.434	29	40	21	0	20	489	0
Kalimantan Timur	1.850	3	4	0	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	530	1	8	0	0	0	0	0
Kalimantan Barat	1.520	4	6	2	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	29.451	71	12	6	0	0	0	0
Wilayah Timur	19.150	84	93	32	0	100	1.886	0
Bali	32	0	1	0	0	0	0	0
NTB	5.916	28	2	1	0	100	0	0
NTT	934	4	5	5	0	0	1.200	0
Sulawesi Selatan	5.877	17	47	4	0	0	510	0
Sulawesi Tengah	817	3	5	7	0	0	20	0
Sulawesi Tenggara	300	2	2	2	0	0	0	0
Gorontalo	828	2	4	0	0	0	0	0
Sulawesi Utara	512	0	5	0	0	0	30	0
Sulawesi Barat	1.383	13	9	5	0	0	26	0
Maluku	541	1	3	4	0	0	100	0
Maluku Utara	32	0	0	0	0	0	0	0
Papua	340	1	0	0	0	0	0	0
Papua Barat	1.638	13	10	4	0	0	0	0

Sumber: Posko Bencana Kementerian PU

BAB IV

INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 5 menyebutkan Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari untuk memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Selanjutnya pada PP No. 42 Tahun 2008 Pasal 70 Ayat 2 bahwa prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dengan sistem irigasi yang sudah ada.

Meskipun Indonesia merupakan negara yang kaya akan air, namun menurut kajian global yang disampaikan pada *World Water Forum II* di Den Haag tahun 2000, diperkirakan Indonesia juga akan mengalami krisis air pada tahun 2025 jika tidak dilakukan upaya konservasi dan efisiensi. Hal ini sebagai akibat dari pengelolaan air yang masih lemah, seperti pemakaian air yang tidak efisien, kebutuhan dan potensi ketersediaan sumber daya air yang tidak seimbang serta semakin menekan kemampuan alam dalam menyuplai air.

Beberapa isu strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air, di antaranya adalah tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin parah, kurang terkendalinya alih fungsi lahan pertanian produktif, dan kurang optimalnya layanan jaringan irigasi dan layanan jaringan rawa sehingga masih diperlukan pengembangan serta peningkatan fungsi jaringan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Berkaitan dengan masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, Ditjen SDA berupaya meningkatkan kapasitas melalui program pengelolaan air baku. Hal ini telah masuk dalam program strategis SDA hingga 2014, yaitu meningkatkan ketersediaan air baku yang memadai. Selain itu, dampak perubahan iklim global yang semakin intens serta permasalahan kekeringan dan banjir semakin meningkat menjadi isu strategis pengelolaan SDA yang harus ditangani oleh Ditjen SDA melalui program-programnya.

Pembangunan infrastruktur SDA tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pembangunan sektor lain. Pembangunan infrastruktur SDA banyak memberikan dukungan yang besar, antara lain untuk pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku dan industri, serta PLTA.

4.1 Danau/ Situ

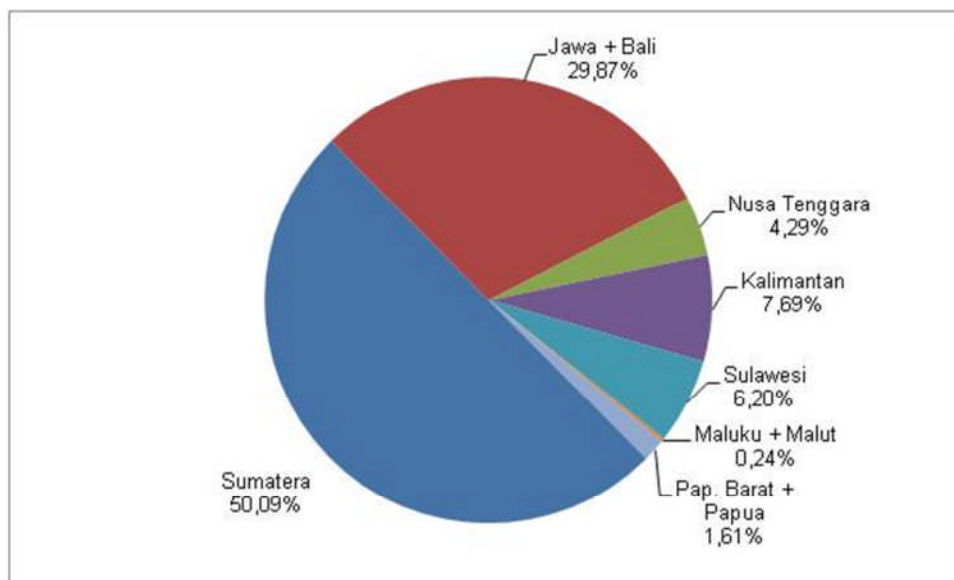
Danau merupakan cekungan pada permukaan bumi yang berisi air serta ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendalian banjir, wisata olahraga air, seperti perahu dayung, kano, memancing, habitat satwa liar, dan menambah keindahan kota. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan situ atau danau karena memiliki nilai ekologis, ekonomi, edukatif, serta estetika sekaligus.

Pada umumnya kedalaman danau bervariasi antara 50 – 200 m, walaupun ada pula yang memiliki kedalaman lebih rendah dari 50 m. Sampai saat ini di Indonesia masih banyak danau maupun situ yang belum diketahui volume tampungannya dengan pasti.

Danau kecil sering dikenal dengan situ berukuran besar. Pemanfaatan danau dan situ sebagai sistem pengendalian banjir memang belum begitu besar. Sejauh ini pemanfaatan situ lebih banyak untuk keperluan pertanian, irigasi serta konservasi sumber daya air. Namun demikian, situ maupun danau mampu memberikan kontribusi dalam pengendalian banjir sesuai dengan fungsinya.

Saat ini, terdapat 1.677 danau dan situ di Indonesia yang tersebar hampir di setiap provinsi. Hanya saja belum seluruhnya danau dan situ tersebut terdata luas serta volume tampungannya. Informasi mengenai danau dan situ di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan persentase sebarannya pada Gambar 4.1. Terdapat sebanyak 840 danau/ situ di pulau Sumatera atau sekitar 50% dari jumlah danau/ situ yang ada di Indonesia. Sementara di Jawa dan Bali terdapat sekitar 500 danau/ situ atau 29%.

**Gambar 4.1 Persentase Jumlah Danau/ Situ
Tahun 2010-2011**



Sumber: http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=0400
Direkap tanggal 12 September 2011 oleh Pusdata

4.2 Bendungan/ Waduk

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan yang telah diundangkan pada tanggal 18 Februari 2010 menjelaskan bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*) atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sementara waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Tujuan dibangunnya bendungan di antaranya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengendali daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup. Bendungan juga berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/ atau pembangkit listrik tenaga air.

Pengelolaan bendungan beserta waduknya untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin :

- a. kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya,

- b. efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air, dan
- c. keamanan bendungan.

Secara teknis ada tiga pola waduk, yaitu :

1. Waduk tahunan, di mana sepanjang tahun tetap terisi air dan pengaturannya tergantung musim tahunan, seperti Jatiluhur dan Kedungombo.
2. Waduk bulanan, merupakan waduk-waduk kecil yang fungsinya memperpanjang ketersediaan air dengan membangun embung-embung kecil atau reservoir, di mana ketersediaan airnya bisa diperpanjang. Misalnya di daerah-daerah pertanian seperti di Gunung Kidul dan Lombok yang musim penghujannya kurang lebih empat bulan.
3. Waduk harian, untuk penyediaan air minum.

Umur sebuah bendungan bergantung pada banyak faktor, di antaranya jumlah endapan yang terdapat di dalamnya. Seiring dengan waktu, waduk akan terisi dengan endapan. Semakin banyak endapan, bendungan menjadi kurang efektif.

Tabel 4.2 menyajikan data jumlah bendungan di Indonesia dengan rincian jumlah bendungan dan luas muka air waduk di setiap provinsi. Jumlah bendungan paling banyak berada di Jawa Timur, yaitu 99 bendungan. Ada beberapa bendungan di beberapa provinsi yang belum tercatat data luas muka air waduknya, baik luas muka air banjir, normal, ataupun minimum, seperti di Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku.

4.3 Bendung

Bendung merupakan sebuah proyek yang dibangun sebagai suatu alat pengendali dan pemonitor seluruh tata pengaturan air dan berfungsi sebagai antisipasi bencana banjir. Menurut Kartasapoetra, Bendung merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai, sedemikian agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian.

Bendung (*weir*) dan bendungan (*dam*) merupakan struktur yang berbeda. Bendung (*weir*) merupakan struktur bendungan berkepala rendah (*lowhead dam*) yang berfungsi untuk menaikkan muka air, biasanya terdapat di sungai. Air sungai yang permukaannya dinaikkan akan melimpas melalui puncak/ mercu bendung (*overflow*). Dapat digunakan sebagai pengukur kecepatan aliran air di sungai dan bisa juga sebagai penggerak penggilingan tradisional.

Di negara dengan sungai yang cukup besar dan deras alirannya, serangkaian bendung dapat dioperasikan menjadi suatu sistem transportasi. Di Indonesia, bendung biasa digunakan untuk irigasi. Bendung akan menaikkan taraf muka air sungai agar dapat dialirkan ke lahan yang letaknya lebih tinggi dari muka air sungai tersebut. Ditinjau dari segi sifat pelimpahan air, ada tiga jenis bendung yaitu, bendung tetap, bendung bergerak, dan kombinasi antara bendung tetap dan bendung bergerak. Pada tahun 2011, Indonesia memiliki 2.796 bendung yang sebagian besar berada di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu 2.025 bendung. Tercatat hanya 11 provinsi di Indonesia yang memiliki bendung. Selengkapnya di Tabel 4.3.

4.4 Rawa

Rawa merupakan sebutan untuk daerah yang tergenang air, di mana penggenangnya dapat bersifat musiman atau permanen dan ditumbuhi oleh vegetasi tertentu. Daerah rawa adalah daerah yang secara permanen atau temporal tergenang air karena tidak adanya sistem drainase alami. Daerah rawa mempunyai arti penting dalam menunjang aspek fisik lingkungan suatu daerah aliran sungai. Selain itu, rawa juga berfungsi sebagai reservoir air yang dapat menjaga elevasi muka air daerah di atasnya maupun daerah genangan yang dapat meredam terjadinya banjir di daerah hilir.

Ada dua jenis rawa berdasarkan lahan rawa, yaitu rawa pasang surut dan rawa non pasang surut atau rawa lebak. Rawa pasang surut adalah daerah rawa yang sistem drainase atau sistem pengairannya dipengaruhi oleh gerakan pasang surut muka air sungai terdekat. Sementara rawa non pasang surut atau rawa lebak adalah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Daerah rawa ini merupakan lahan tanah berbentuk cekungan dan

pada musim hujan seluruhnya digenangi air. Pada musim kemarau air tersebut berangsur-angsur kering atau bahkan menjadi kering sama sekali dalam masa yang relatif singkat (1-2 bulan).

Di Tabel 4.4 ditampilkan data jumlah rawa di Indonesia pada tahun 2011 yang berjumlah 1.912 rawa. Jumlah tersebut tersebar di 18 provinsi di Indonesia, dan paling banyak berada di provinsi Riau dengan 347 rawa. Sementara 15 provinsi lainnya tidak terdapat rawa. Rawa di Indonesia sebagian besar merupakan rawa pasang surut, yaitu sebanyak 1.413 rawa, 40 rawa lainnya merupakan rawa lebak atau non pasang surut, dan masih ada 459 rawa yang belum terdata jenis rawanya (dalam tabel disebut Lainnya).

4.5 Embung dan Embung Potensi

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air ketika musim kemarau adalah dengan memanfaatkan limpahan air hujan dengan membangun embung (*onfarm reservoir*). Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpahan atau air rembesan. Embung akan menyimpan air di musim hujan, kemudian airnya dapat dimanfaatkan pada musim kemarau atau saat kekurangan air.

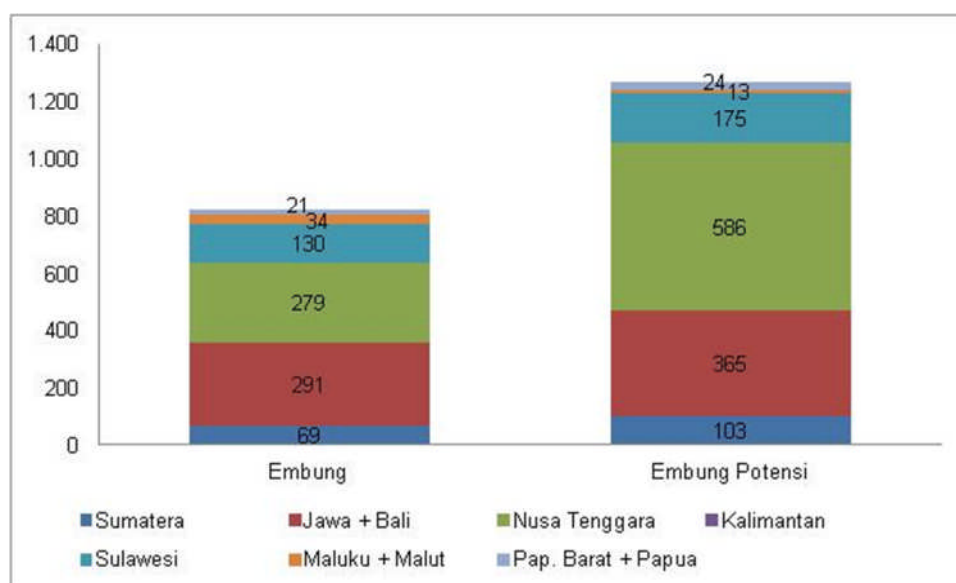
Selain berfungsi sebagai media konservasi air, embung juga bisa menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, kemudian sebagai pengatur fungsi hidrolis, dan menjaga sistem dan proses-proses alami di alam karena secara tidak langsung berperan sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesa oleh berbagai jenis fitoplankton yang hidup di dalamnya.

Di tahun 2011, Indonesia memiliki 824 embung yang tersebar di 14 provinsi, sedangkan 19 provinsi lainnya tidak terdapat embung. Embung paling banyak berada di Jawa Tengah dengan 275 embung, lalu kemudian Nusa Tenggara Timur dengan 184 embung.

Sementara embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau danau buatan. Jumlah embung potensi di Indonesia pada tahun 2011

sebanyak 1.266 embung potensi. Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan jumlah embung potensi paling banyak, yaitu 421 embung potensi. Data jumlah embung dan embung potensi dapat dilihat pada Tabel 4.5, Tabel 4.6 dan Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Jumlah Embung dan Embung Potensi di Indonesia Tahun 2011



Sumber: <http://sda.pu.go.id/list.php?page=embung> (Direkap tanggal 27 Januari 2010 oleh Pusdata)
<http://sda.pu.go.id/sdapu/sida/embung.php?page=1> (Direkap tanggal 21 Juli 2011 oleh Pusdata)

4.6 Air Baku dan Air Tanah

Air baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Pembangunan dan pengelolaan bangunan Sumber Daya Air seperti situ, bendungan/ waduk, bendung, embung, maupun embung potensi salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjaga ketersediaan sumber air permukaan atau air baku.

Untuk menguatkan penyediaan dan pengelolaan air baku, Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2010 mampu membangun sarana dengan kapasitas mencapai 6.310 l/det. Selain itu, sarana yang direhabilitasi mencapai kapasitas 3.760 l/det, serta yang dioperasikan dan dipelihara mencapai kapasitas 9.880 l/det.

Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Air tanah berasal dari air hujan dan air permukaan yang meresap makin dalam dan menjadi air tanah. Selain menjaga air permukaan, ketersediaan air tanah juga perlu diperhatikan, mengingat semakin meningkatnya permintaan air untuk berbagai macam keperluan seperti rumah tangga, publik, komersil, maupun industri yang dapat mengganggu ketersediaan air permukaan dan banyak aktifitas manusia yang dapat mencemari keberadaan air tanah.

Air tanah dan air permukaan saling berkaitan dan berinteraksi. Jika terjadi pemompaan, pencemaran atau aktivitas lain terhadap air tanah akan memberikan reaksi pada air permukaan, demikian pula sebaliknya. Air tanah yang tercemar bisa menjadi pembawa bibit penyakit. Air tanah di perkotaan yang telah intensif pemanfaatannya menjadi sangat rawan pencemaran. Misalnya pada daerah yang terjadi penumpukan sampah dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama, air tanah di daerah sekitarnya akan tercemar, berbau dan tidak dapat dikonsumsi.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan air tanah sering terlihat dalam penggunaan sumur gali ataupun sumur bor. Di tahun 2011, tercatat ada sebanyak 1.257 sumur air tanah yang dikelola oleh Kementerian PU. Ditjen Sumber Daya Air juga melakukan program yang mendukung penyediaan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Pembangunan JIAT di tahun 2010 mampu mengairi lahan seluas 2.246 ha. Sementara kegiatan rehabilitasi JIAT yang dilakukan dapat mengairi 8.882 ha lahan, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan dapat mengairi 11.444 ha lahan. Data mengenai air baku dan air tanah lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.7 – 4.9.

4.7 Irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air

bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.

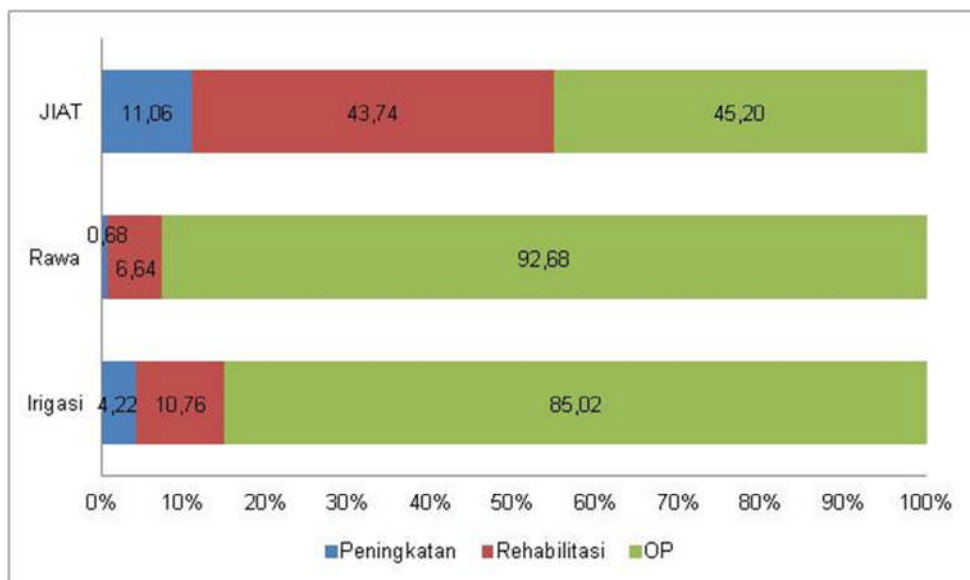
Daerah irigasi adalah kesatuan lahan atau hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang diberi air), dan bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya). Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Di tahun 2010, pemerintah telah membangun/ meningkatkan jaringan irigasi hingga mampu mengairi areal irigasi seluas 115 ribu hektar. Luas tersebut terdapat areal potensial seluas 45 ribu hektar, dan areal fungsional 70 ribu hektar (Tabel 4.10). Peningkatan ini diharapkan mampu menunjang produksi pertanian di Indonesia sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama pada produksi beras nasional.

4.8 Pencapaian Pembangunan Infratsruktur Sumber Daya Air

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2010-2011 secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kemanfaatan utama, yaitu dukungan ketahanan pangan, pengendalian banjir dan abrasi pantai, serta penyediaan air baku. Dalam program dukungan ketahanan pangan, terdapat tiga komponen pada tiga kegiatan prioritas, yaitu peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan. Tiga komponen tersebut dilakukan pada irigasi, rawa dan juga Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Dalam semua kegiatan prioritas, kegiatan operasional dan pemeliharaan menjadi porsi yang terbesar, pada irigasi mencapai 2.315.000 hektar, pada rawa 1.107.996 hektar, dan pada JIAT 9.180 hektar. Masing-masing dapat digambarkan melalui persentase sebagaimana pada Gambar 4.1 di bawah ini dan Tabel 4.11.

**Gambar 4.3 Persentase Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
Dukungan Ketahanan Pangan
Tahun 2010-2011**



Sumber: Pencapaian Infrastruktur Bidang PU dan Permukiman 2010-2011, dan Subdit Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

Dalam program yang menguatkan pengendalian banjir dan abrasi pantai, Ditjen Sumber Daya Air melaksanakan setidaknya 11 kegiatan prioritas di hampir semua provinsi. Beberapa di antaranya adalah pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 171,19 km, pembangunan prasarana pengendali banjir sedimen sebanyak 13 buah yang sebagian besar dibangun kawasan Gunung Merapi, serta masih banyak lagi yang lain seperti pada Tabel 4.12.

Kemudian dalam program penyediaan air baku, Ditjen Sumber Daya Air melaksanakan empat kegiatan prioritas, yaitu pembangunan waduk, pembangunan prasarana air baku, rehabilitasi prasarana air baku, dan operasi dan pemeliharaan prasarana air baku. Untuk pembangunan waduk, merupakan proyek lebih dari satu tahun (*multiyears*) sehingga pencapaiannya di Tahun 2011 belum terukur dalam satuan jumlah waduk.

4.9 Analisis Statistik Bidang Sumber Daya Air

Pada Tabel 4.14 ditampilkan data jumlah bangunan SDA dan frekuensi bencana alam banjir dan tanah longsor di setiap provinsi. Dari data ini akan dibuat plot secara simultan yang dapat menggambarkan data yang terdiri dari n objek (provinsi) dan p peubah (jumlah bangunan SDA serta frekuensi banjir dan tanah longsor) dalam dua dimensi. Plot ini selanjutnya disebut Biplot. Biplot dapat memberikan informasi mengenai kedekatan antar objek, karakteristik atau peubah perinci setiap objek, dan keterkaitan antar peubah.

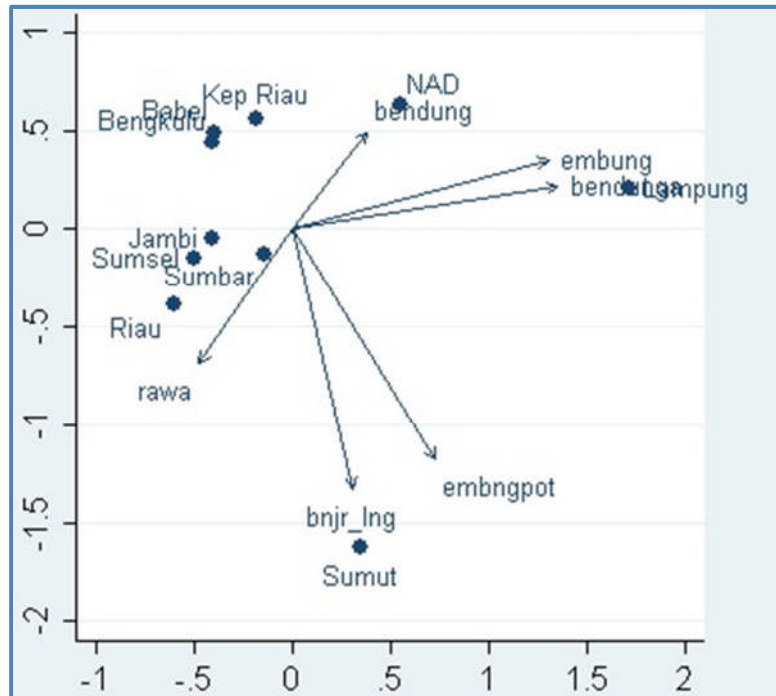
Bangunan SDA yang disertakan dalam analisis ini terdiri dari bendungan, bendung, embung, embung potensial, dan rawa. Bangunan SDA yang dimaksudkan di sini adalah jumlah bangunan yang dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air di sebuah provinsi. Sementara data bencana alam merupakan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi selama 01 November 2009 sampai dengan 31 Desember 2010. Hanya dipilih banjir dan tanah longsor dikarenakan dua bencana alam ini yang dianggap ada kaitannya dengan keberadaan bangunan SDA.

Pembuatan grafik biplot dilakukan dengan membagi wilayah Indonesia menjadi 4 wilayah berdasarkan pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan dan Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Jika terdapat provinsi yang tidak muncul pada biplot, maka provinsi tersebut tidak disertakan dalam analisa dikarenakan ketiadaan bangunan SDAny.

A. Sumatera

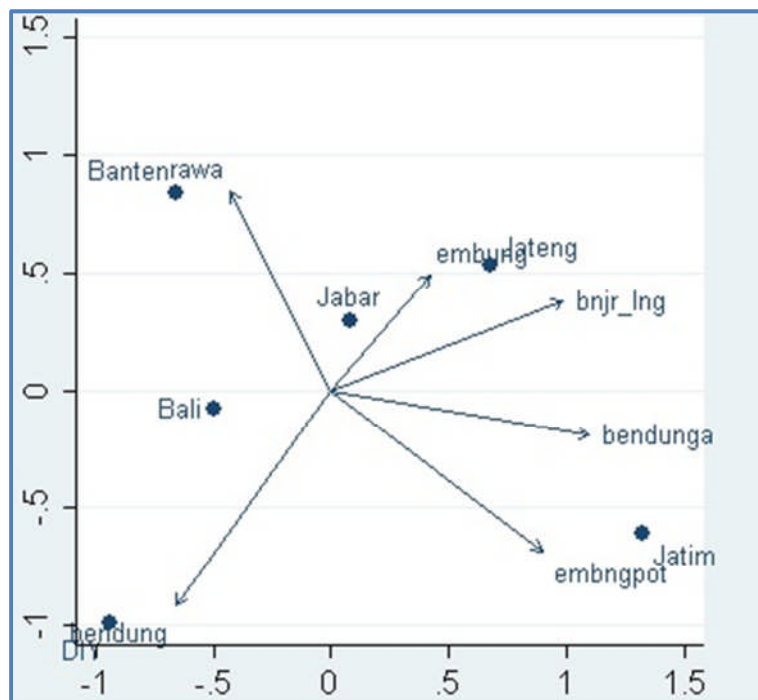
Biplot untuk Pulau Sumatera menunjukkan bangunan bendung paling banyak berada di Provinsi Aceh, bendungan dan embung di Provinsi Lampung, embung potensi di Provinsi Sumatera Utara, serta rawa di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Sementara untuk bencana banjir dan tanah longsor, di antara 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Utara terlihat yang paling banyak mengalaminya. Dengan tidak mengecilkan jumlah bencana di provinsi lain, ada pula beberapa provinsi yang dari data tercatat cukup sering mengalami banjir dan tanah longsor, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan.

Gambar 4.4 Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam (Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Sumatera



B. Jawa dan Bali

Gambar 4.5 Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam (Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Jawa dan Bali

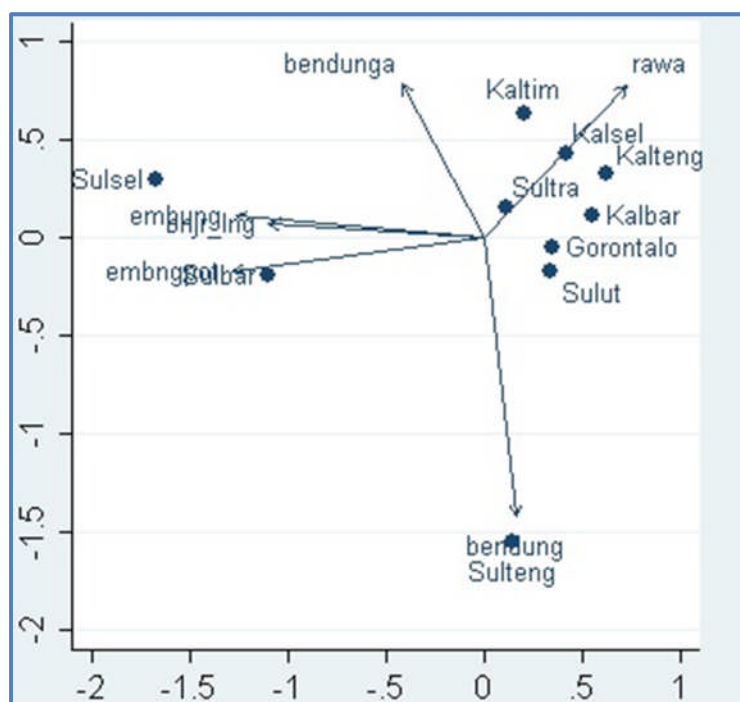


Dari biplot Pulau Jawa dan Bali di Gambar 4.5, terlihat jumlah rawa paling banyak berada di Provinsi Banten, embung di Provinsi Jawa Tengah, bendungan dan embung potensi di Provinsi Jawa Timur, serta bangunan bendung di Provinsi DI Yogyakarta. Untuk kejadian banjir dan tanah longsor, ada 3 provinsi yang data kejadiannya cukup tinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jumlah kejadian banjir dan tanah longsor di ketiga provinsi ini juga merupakan yang tertinggi di Indonesia.

C. Kalimantan dan Sulawesi

Gambar 4.6 yang merupakan biplot dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi memberikan informasi bahwa bendungan paling banyak berada di Provinsi Kalimantan Timur, embung dan embung potensi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta bendung di Sulawesi Tengah. Sementara untuk jumlah rawa dominan di semua provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Untuk kejadian banjir dan tanah longsor, Sulawesi Selatan mencatatkan kejadian yang paling banyak.

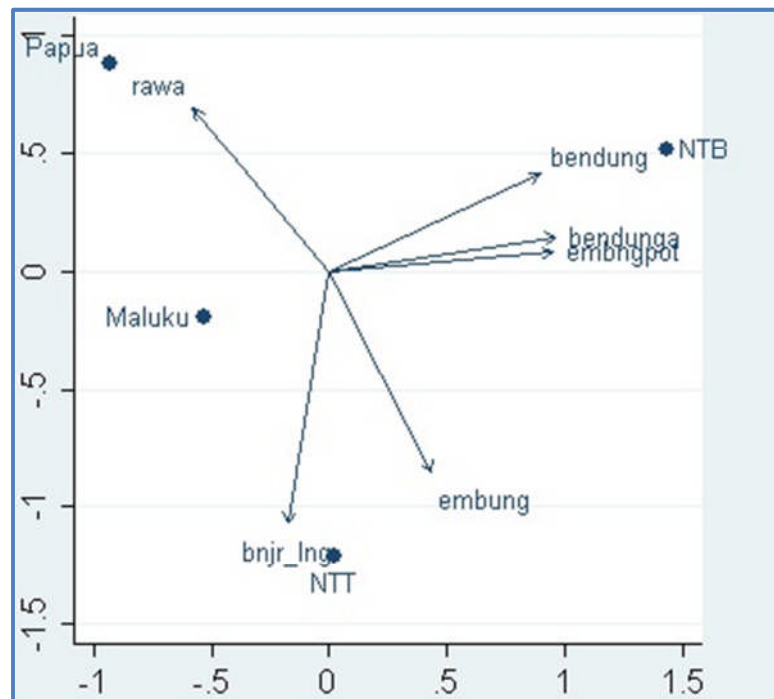
Gambar 4.6 Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam (Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Kalimantan dan Sulawesi



D. Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Grafik biplot yang terakhir ini memperlihatkan sebaran bangunan SDA di Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Terlihat bahwa jumlah rawa dominan berada di Provinsi Papua, bangunan bendungan, bendung dan embung potensi di provinsi Nusa Tenggara Barat, serta di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kejadian banjir dan tanah longsor paling banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Gambar 4.7 Biplot Jumlah Bangunan SDA dan Bencana Alam (Banjir dan Tanah Longsor) Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua



Penggambaran karakteristik provinsi melalui sebaran jumlah bangunan SDA dan kejadian banjir dan tanah longsor ini merupakan analisa deskriptif yang berupaya meringkas sejumlah informasi dari tabel menjadi sebuah gambar dua dimensi. Masih diperlukan kelengkapan data untuk mendukung penggambaran karakteristik suatu provinsi agar menjadi suatu analisa yang lebih baik.

**Tabel 4.1 Jumlah Danau/ Situ di Indonesia
Tahun 2011**

Provinsi	Jumlah Danau/ Situ	Luas (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
1	2	3	4
Nanggroe Aceh Darussalam	8	5.798,00	242.000,00
Sumatera Utara	103	736,00	3.350.900,00
Sumatera Barat	59	408,10	6.069.356,00
Riau	32	137,00	-
Jambi	14	5.000,00	-
Sumatera Selatan	17	21.432,00	262,00
Bengkulu	7	309,00	2.100.000,00
Lampung	45	97,00	5.884.790,00
Bangka Belitung	555	28,08	72,33
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	49	25,00	-
Jawa Barat	172	3.456,60	-
Jawa Tengah	35	-	1,70
DI Yogyakarta	135	1,20	7,10
Jawa Timur	12	-	-
Banten	79	21.538,70	2.902,00
Bali	19	25,70	1.024,40
Nusa Tenggara Barat	11	30,70	25,00
Nusa Tenggara Timur	61	26,00	995.612,00
Kalimantan Barat	55	305,80	-
Kalimantan Tengah	48	195,40	-
Kalimantan Selatan	3	-	-
Kalimantan Timur	23	59.250,00	1.300,00
Sulawesi Utara	35	5,00	100.000,00
Sulawesi Tengah	20	418,80	-
Sulawesi Selatan	16	881,70	40.242,90
Sulawesi Tenggara	15	264,00	749.632,00
Gorontalo	2	-	-
Sulawesi Barat	16	881,70	40.424,90
Maluku	3	-	-
Maluku Utara	1	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	27	2.449,80	-
Indonesia	1.677	123.701,28	19.578.552,33

Sumber: http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=0400
Direkap tanggal 12 September 2011 oleh Pusdata

**Tabel 4.2 Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2011**

Provinsi	Jumlah Bendungan	Luas Muka Air (MA) Waduk (ha)		
		MA Banjir	MA Normal	MA Minimum
1	2	3	4	5
Nanggroe Aceh Darussalam	9	272,66	528,00	305,60
Sumatera Utara	4	-	1.100,00	-
Sumatera Barat	5	11,36	11,36	11,36
Riau	1	-	1.240,00	-
Jambi	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-
Bengkulu	1	-	114,00	-
Lampung	23	4.324,95	3.922,20	437,00
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
Kepulauan Riau	5	-	2.522,48	-
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	22	14.762,00	19.792,77	2.816,00
Jawa Tengah	50	17.771,70	9.840,40	1.474,57
DI Yogyakarta	2	180,00	159,00	37,50
Jawa Timur	99	4.441,86	4.989,65	1.931,79
Banten	14	3.407,00	-	-
Bali	7	529,50	404,00	149,20
Nusa Tenggara Barat	44	2.048,96	1.066,28	242,70
Nusa Tenggara Timur	12	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	1	9.200,00	3.200,00	-
Kalimantan Timur	19	3.306,92	2.460,67	1.541,88
Sulawesi Utara	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	12	20.862,00	18.614,05	2.396,12
Sulawesi Tenggara	6	-	-	-
Gorontalo	3	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	6	-	24,00	-
Maluku Utara	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-
Indonesia	345			

Sumber: <http://sda.pu.go.id/sdapu/sisda/bendungan.php?page=1>
Direkap tanggal 20-21 Juli 2011 oleh Pusdata

**Tabel 4.3 Jumlah Bendung Berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2011**

Provinsi	Jumlah Bendung	
	2010	2011
1	2	3
Nanggroe Aceh Darussalam	24	24
Sumatera Utara	0	0
Sumatera Barat	0	0
Riau	0	0
Jambi	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Bengkulu	0	0
Lampung	0	0
Bangka Belitung	0	0
Kepulauan Riau	0	0
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	20	20
DI Yogyakarta	2.025	2.025
Jawa Timur	13	13
Banten	243	243
Bali	0	0
Nusa Tenggara Barat	259	259
Nusa Tenggara Timur	0	0
Kalimantan Barat	18	18
Kalimantan Tengah	10	10
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	19	19
Sulawesi Utara	0	0
Sulawesi Tengah	164	164
Sulawesi Selatan	0	0
Sulawesi Tenggara	0	0
Gorontalo	0	0
Sulawesi Barat	0	0
Maluku	0	0
Maluku Utara	0	0
Papua Barat	0	0
Papua	1	1
Indonesia	2.796	2.796

Sumber: http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306 (Direkap tanggal 25 Januari 2010 oleh Pusdata)
http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=0400 (Direkap tanggal 12 September 2011 oleh Pusdata)

**Tabel 4.4 Jumlah Rawa di Indonesia
Tahun 2010-2011**

Provinsi	2010	2011			Jumlah
		Lebak	Pasang Surut	Lainnya	
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	97	0	10	87	97
Sumatera Utara	123	0	84	39	123
Sumatera Barat	65	0	65	0	65
Riau	347	0	341	6	347
Jambi	89	0	89	0	89
Sumatera Selatan	175	0	175	0	175
Bengkulu	46	0	46	0	46
Lampung	27	0	27	0	27
Bangka Belitung	10	0	10	0	10
Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
DKI Jakarta	0	0	0	0	0
Jawa Barat	0	0	0	0	0
Jawa Tengah	0	0	0	0	0
DI Yogyakarta	0	0	0	0	0
Jawa Timur	0	0	0	0	0
Banten	23	0	0	23	23
Bali	0	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
Kalimantan Barat	193	0	190	3	193
Kalimantan Tengah	261	39	70	152	261
Kalimantan Selatan	242	0	93	149	242
Kalimantan Timur	118	0	118	0	118
Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	12	1	11	0	12
Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0
Sulawesi Tenggara	44	0	44	0	44
Gorontalo	5	0	5	0	5
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
Maluku	0	0	0	0	0
Maluku Utara	0	0	0	0	0
Papua Barat	0	0	0	0	0
Papua	35	0	35	0	35
Indonesia	1.912	40	1.413	459	1.912

Sumber: http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306 (Direkap tanggal 21 September 2010 oleh Pusdata)
<http://sda.pu.go.id/sdapu/sisda/rawa.php?page=1> (Direkap tanggal 21-22 Juli 2011 oleh Pusdata)

**Tabel 4.5 Jumlah Embung di Indonesia
Tahun 2010-2011**

Provinsi	2010	2011
1	2	3
Nanggroe Aceh Darussalam	19	19
Sumatera Utara	0	0
Sumatera Barat	27	0
Riau	0	0
Jambi	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Bengkulu	0	0
Lampung	49	49
Bangka Belitung	1	1
Kepulauan Riau	7	0
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	275	275
DI Yogyakarta	13	13
Jawa Timur	2	2
Banten	0	0
Bali	1	1
Nusa Tenggara Barat	148	95
Nusa Tenggara Timur	317	184
Kalimantan Barat	0	0
Kalimantan Tengah	0	0
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	0	0
Sulawesi Utara	0	0
Sulawesi Tengah	0	0
Sulawesi Selatan	57	57
Sulawesi Tenggara	20	16
Gorontalo	0	0
Sulawesi Barat	57	57
Maluku	34	34
Maluku Utara	0	0
Papua Barat	0	0
Papua	21	21
Indonesia	1.048	824

Sumber: <http://sda.pu.go.id/list.php?page=embung> (Direkap tanggal 27 Januari 2010 oleh Pusdata)

<http://sda.pu.go.id/sdapu/sisda/embung.php?page=1> (Direkap tanggal 21 Juli 2011 oleh Pusdata)

**Tabel 4.6 Jumlah Embung Potensi di Indonesia
Tahun 2010-2011**

Provinsi	2010	2011
1	2	3
Nanggroe Aceh Darussalam	0	0
Sumatera Utara	63	63
Sumatera Barat	0	0
Riau	8	8
Jambi	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Bengkulu	0	0
Lampung	30	30
Bangka Belitung	0	0
Kepulauan Riau	2	2
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	56	56
DI Yogyakarta	34	34
Jawa Timur	246	246
Banten	0	0
Bali	29	29
Nusa Tenggara Barat	421	421
Nusa Tenggara Timur	165	165
Kalimantan Barat	0	0
Kalimantan Tengah	0	0
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	0	0
Sulawesi Utara	0	0
Sulawesi Tengah	17	17
Sulawesi Selatan	74	74
Sulawesi Tenggara	10	10
Gorontalo	0	0
Sulawesi Barat	74	74
Maluku	13	13
Maluku Utara	0	0
Papua Barat	0	0
Papua	24	24
Indonesia	1.266	1.266

Sumber: <http://sda.pu.go.id/list.php?page=embungpotensi> (Direkap tanggal 27 Januari 2010 oleh Pusdata)

<http://sda.pu.go.id/sdapu/sisda/embungpotensi.php?page=1> (Direkap tanggal 21 Juli 2011 oleh Pusdata)

**Tabel 4.7 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Tahun Anggaran 2010**

Provinsi	Pembangunan (l/det)	Rehabilitasi (l/det)	Operasi dan Pemeliharaan (l/det)
1	2	3	4
Nanggroe Aceh Darussalam	0	930	374
Sumatera Utara	120	0	0
Sumatera Barat	0	0	0
Riau	0	0	0
Jambi	320	0	0
Sumatera Selatan	470	0	0
Bengkulu	0	0	0
Lampung	345	0	50
Bangka Belitung	58	0	0
Kepulauan Riau	0	0	0
DKI Jakarta	200	0	0
Jawa Barat	587	1.981	60
Jawa Tengah	290	10	2.270
DI Yogyakarta	40	0	40
Jawa Timur	440	3	6.606
Banten	41	0	60
Bali	0	0	15
Nusa Tenggara Barat	125	75	0
Nusa Tenggara Timur	66	111	240
Kalimantan Barat	0	410	3
Kalimantan Tengah	3	0	0
Kalimantan Selatan	0	200	0
Kalimantan Timur	130	0	0
Sulawesi Utara	91	35	20
Sulawesi Tengah	125	0	100
Sulawesi Selatan	0	0	0
Sulawesi Tenggara	100	0	0
Gorontalo	240	0	0
Sulawesi Barat	50	0	0
Maluku	30	0	0
Maluku Utara	160	0	0
Papua Barat	0	0	0
Papua	2.279	5	42
Indonesia	6.310	3.760	9.880

Sumber: Subdit Air Baku dan Air Tanah, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

**Tabel 4.8 Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)
Tahun Anggaran 2010**

Provinsi	Pembangunan (ha)	Rehabilitasi (ha)	Operasi dan Pemeliharaan (ha)
1	2	3	4
Nanggroe Aceh Darussalam	105,00	100,00	250,00
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0
Riau	0	0	0
Jambi	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0	0
Bengkulu	0	0	0
Lampung	155,00	20,00	360,00
Bangka Belitung	0	0	0
Kepulauan Riau	0	0	0
DKI Jakarta	0	0	0
Jawa Barat	530,00	1.128,00	250,00
Jawa Tengah	160,00	1.250,00	3.500,00
DI Yogyakarta	0	0	0
Jawa Timur	541,00	1.980,00	4.114,00
Banten	0	0	0
Bali	250,00	340,00	400,00
Nusa Tenggara Barat	110,00	1.469,00	500,00
Nusa Tenggara Timur	190,00	700,00	1.240,00
Kalimantan Barat	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0
Sulawesi Utara	90,00	585,00	0
Sulawesi Tengah	0	0	50,00
Sulawesi Selatan	0	520,00	500,00
Sulawesi Tenggara	15,00	150,00	280,00
Gorontalo	100,00	640,00	0
Sulawesi Barat	0	0	0
Maluku	0	0	0
Maluku Utara	0	0	0
Papua Barat	0	0	0
Papua	0	0	0
Indonesia	2.246,00	8.882,00	11.444,00

Sumber: Subdit Air Baku dan Air Tanah, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

**Tabel 4.9 Jumlah Sumur Air Tanah di Indonesia
Tahun 2011**

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumur
1	2	3
Nanggroe Aceh Darussalam	-	-
Sumatera Utara	-	-
Sumatera Barat	-	-
Riau	-	-
Jambi	-	-
Sumatera Selatan	-	-
Bengkulu	-	-
Lampung	Lampung Barat	1
	Lampung Selatan	55
	Lampung Tengah	41
	Lampung Timur	2
	Lampung Utara	6
	Tanggamus	2
	Tulangbawang	12
	Waykanan	9
Sub total		128
Kep. Bangka Belitung	-	-
Kepulauan Riau	-	-
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	-	-
Jawa Tengah	Blora	56
	Boyolali	1
	Brebes	2
	Cilacap	7
	Grobogan	2
	Jepara	1
	Kebumen	10
	Klaten	6
	Kudus	8
	Pati	10
	Pemalang	1
	Purworejo	10
	Sragen	69
	Tegal	3
Sub total		186
DI Yogyakarta	Gunungkidul	59
Sub total		59
Jawa Timur	-	-
Banten	-	-
Bali	-	-
Nusa Tenggara Barat	Bima	62
	Dompu	48
	Lombok Barat	112
	Lombok Tengah	16

Lanjutan Tabel 4.9

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumur
1	2	3
	Lombok Timur	152
	Sumbawa	59
Sub total		449
Nusa Tenggara Timur	-	0
Kalimantan Barat	Bengkayang	12
	Landak	1
	Pontianak	1
	Sambas	2
	Sintang	4
Sub total		20
Kalimantan Tengah	Kapuas	15
	Kotawaringin Timur	4
Sub total		19
Kalimantan Selatan	-	-
Kalimantan Timur	-	-
Sulawesi Utara	-	-
Sulawesi Tengah	Banggai	13
	Donggala	96
	Kodya Palu	13
	Kulawi	1
	Luwuk	2
	Morowali	121
	Parigimoutong	13
	Poso	10
	Tojounauna	6
Sub total		275
Sulawesi Selatan	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-
Gorontalo	Boalemo	25
	Bonebolango	5
	Gorontalo	89
	Pohuwato	2
Sub total		121
Sulawesi Barat	-	-
Maluku	-	-
Maluku Utara	-	-
Papua Barat	-	-
Papua	-	-
Indonesia		1.257

Sumber: <http://sda.pu.go.id/sdapu/sisda/airtanah.php?page=1>

Direkap tanggal 21 Juli 2011 oleh Pusdata

**Tabel 4.10 Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi (ha)
Tahun 2010**

Balai	Provinsi	Luas Areal Irigasi (ha)			
		Baku/ Rencana	Target Inpres 01/ 2010	Potensia I	Fungsiona I
1	2	3	4	5	6
Sumatera I	Nanggroe Aceh Darussalam	25.619	5.372	3.859	1.513
Sumatera II	Sumatera Utara	24.442	13.992	12.892	1.100
Sumatera III	Riau	0	1.000	500	500
Sumatera IV	Kepulauan Riau	0	1.259	0	1.259
Sumatera V	Sumatera Barat	38.846	10.451	1.930	8.521
Sumatera VI	Jambi	5.078	878	0	878
Sumatera VII	Bengkulu	13.871	2.000	0	2.000
Sumatera VIII	Sumatera Selatan, Bangka Belitung	43.308	22.555	6.063	16.492
Mesuji Sekampung	Lampung	3.200	2.500	0	2.500
Ciujung Cidanau Cudurian	Banten		0		
Ciliwung Cisadane	DKI Jakarta		0		
Citarum	Jawa Barat	0	0		
Cimanuk Cissanggarung	Jawa Barat		0		
Citanduy	Jawa Barat		0		
Pemali Juana	Jawa Tengah	1.900	900	0	900
Bengawan Solo	Jawa Tengah		0		
Serayu Opak	DI Yogyakarta	0	0		
Brantas	Jawa Timur		0		
Kalimantan I	Kalimantan Barat		0		
Kalimantan II	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan	13.886	9.886	7.534	2.352
Kalimantan III	Kalimantan Timur	9.660	9.660	4.830	4.830
Sulawesi I	Sulawesi Utara	4.604	3.194	1.800	1.394
Sulawesi II	Gorontalo	8.435	6.995	4.197	2.798
Sulawesi III	Sulawesi Tengah	3.008	2.000	1.296	704
Sulawesi IV	Sulawesi Tenggara		0		
Pompengan Jeneberang	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat	8.541	6.041		6.041
Bali Penida	Bali		0		
Nusa Tenggara I	Nusa Tenggara Barat		0		
Nusa Tenggara II	Nusa Tenggara Timur	10.647	4.007	0	4.007
Maluku	Maluku, Maluku Utara	10.866	8.684	435	8.249
Papua	Papua Barat, Papua	21.828	3.783	0	3.783
Indonesia		247.739	115.156	45.336	69.821

Sumber: Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

Catatan: Luas Baku: Luas areal irigasi yang berdasarkan perencanaan dapat diairi

Luas Potensial: Bagian dari luas baku yang telah terbangun saluran primernya

Luas Fungsional: Bagian dari luas potensial yang telah terbangun saluran sekundernya

**Tabel 4.11 Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
Dukungan Ketahanan Pangan
Tahun 2010-2011**

Kegiatan Prioritas	Unit	Pencapaian	Keterangan
1	2	3	4
Irigasi			
Peningkatan	ha	115.000	Di 22 provinsi, yaitu: NTT, Jatim, Jabar, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Gorontalo, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, NAD, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Sumut, Kep. Riau dan Lampung.
Rehabilitasi	ha	293.044	Di 12 provinsi, yaitu: Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DIY, Gorontalo, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel dan NAD.
Operasi dan Pemeliharaan	ha	2.315.000	Di 25 provinsi, yaitu: NAD, Sumut, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Bali, Sultra, Sulut, NTB, NTT, Maluku, Papua, Sulbar dan Papua Barat.
Rawa			
Peningkatan	ha	8.080	Di 7 provinsi, yaitu: NAD, Riau, Jambi, Sumsel, Kaltim, Gorontalo dan Papua.
Rehabilitasi	ha	79.373	Di 10 provinsi, yaitu: Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulteng dan Papua.
Operasi dan Pemeliharaan	ha	1.107.996	Di 19 provinsi, yaitu: NAD, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar dan Papua.
JIAT (Jaringan Irigasi Air Tanah)			
Peningkatan	ha	2.246	Di 11 provinsi, yaitu: NAD, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, NTB, Bali, Sulut, Gorontalo dan Sultra.
Rehabilitasi	ha	8.882	Di 11 provinsi, yaitu: NAD, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, NTB, Bali, Sulut, Gorontalo, Sultra dan Sulsel.
Operasi dan Pemeliharaan	ha	9.180	Di 10 provinsi, yaitu: NAD, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, NTB, Bali, Sultra, dan Sulsel.

Sumber: Pencapaian Infrastruktur Bidang PU dan Permukiman 2010-2011, dan Subdit Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

**Tabel 4.12 Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
Pengendalian Banjir dan Abrasi Pantai
Tahun 2010-2011**

Kegiatan Prioritas	Unit	Pencapaian	Keterangan
1	2	3	4
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir	km	321	Di 31 BBWS/ BWS, antara lain BKT, penanganan Pasca Banjir Sub DAS Bengawan Solo Hulu, Civil Works Bojonegoro (D8BJ-1), Perbaikan dan Pengaturan S. Bengawan Solo Hilir untuk Pengamanan Kota Cepu.
Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir	km	171,19	Di Kalbar, Sumbar, Jambi, Bali, Kalsel, NTB, NTT, Papua, Jateng, Sulbar, Sulsel, DIY, Papua Barat, Gorontalo dan Sultra.
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sedimen	buah	13	10 Sabo Dam di Kawasan Merapi, 2 Sabo Dam & 1 Konsolidasi Sabo Dam di Bawakaraeng.
Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sedimen	buah	5	3 Sabo Dam di Semeru dan 2 Sabo Dam di Kelud
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	km	611	Di 31 BBWS/BWS
Penyelesaian pembangunan Waduk Gonggang (Magetan)			Penyediaan pompa berikut pembangunan rumah pompa di Desa Glonggong, Kec. Balerejo, Kab. Madiun sebagai bagian dari prasarana pengendalian Banjir di DAS Bengawan Solo.
Rehabilitasi Waduk	buah	12	Lokasi: DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTB, Banten dan Papua.
Rehabilitasi Embung	buah	21	Lokasi: DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTB, Banten dan Papua.
Operasi dan Pemeliharaan Waduk	buah	14	Lokasi: Waduk Sempor (Jateng), Wadaslintang (Jateng), Kedungombo (Jateng), Lodan (Jateng), Batutegi (Lampung), Benel (Bali), Palasari (Bali), Telaga tunjung (Bali), Grogak (Bali), Batujahe (NTB), Batubulan (NTB), Tilong (NTT), Bili-Bili (Sulsel) dan Ponre-Ponre (Sulsel).
Pembangunan Pengamanan Pantai	km	25,11	Di 23 provinsi, yaitu: NAD, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalsel, Bali, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai	km	10	Lokasi : Bali, Sulut dan Sumbar

Sumber: Pencapaian Infrastruktur Bidang PU dan Permukiman 2010-2011, dan Subdit Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

**Tabel 4.13 Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
Penyediaan Air Baku
Tahun 2010-2011**

Kegiatan Prioritas	Unit	Pencapaian	Keterangan
1	2	3	4
Pembangunan Waduk	buah	0	Merupakan proyek multi years, belum selesai di tahun 2010. Lokasi: Waduk Jatigede (Jabar), Jatibarang (Jateng), Bajulmati (Jatim), Marangkayu (Kaltim), Tibtab (Bali), Karian (Banten), Rajui (Aceh), Gonggang (Jatim).
Pembangunan Prasarana Air Baku	l/det	6.310	Di 28 Propinsi, yaitu: NAD, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Bengkulu, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Rehabilitasi Prasarana Air Baku	l/det	3.760	Di 17 Propinsi, yaitu: NAD, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulsel dan Papua.
Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	l/det	9.880	Di 14 Propinsi, yaitu: NAD, Kep. Riau, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, Kalbar, Sulut, Sulteng dan Papua.

Sumber: Pencapaian Infrastruktur Bidang PU dan Permukiman 2010-2011, dan Subdit Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU

**Tabel 4.14 Data Bencana (Banjir & Tanah Longsor) dan Bangunan SDA
(Status Data Bencana 01 November 2009 - 31 Desember 2010)**

Provinsi	Bendungan	Bendung	Embung	Embung Potensi	Rawa	Frekuensi Bencana Banjir & Tanah Longsor
1	2	3	4	5	6	8
Nanggroe Aceh Darussalam	9	24	19	0	97	16
Sumatera Utara	4	0	0	63	123	52
Sumatera Barat	5	0	0	0	65	29
Riau	1	0	0	8	347	13
Jambi	0	0	0	0	89	22
Sumatera Selatan	0	0	0	0	175	20
Bengkulu	1	0	0	0	46	3
Lampung	23	0	49	30	27	16
Bangka Belitung	0	0	1	0	10	3
Kepulauan Riau	5	0	0	2	0	1
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	57
Jawa Barat	22	0	0	0	0	168
Jawa Tengah	50	20	275	56	0	157
DI Yogyakarta	2	2.025	13	34	0	8
Jawa Timur	99	13	2	246	0	171
Banten	14	243	0	0	23	62
Bali	7	0	1	29	0	6
Nusa Tenggara Barat	44	259	95	421	0	5
Nusa Tenggara Timur	12	0	184	165	0	21
Kalimantan Barat	0	18	0	0	193	12
Kalimantan Tengah	0	10	0	0	261	13
Kalimantan Selatan	1	0	0	0	242	22
Kalimantan Timur	19	19	0	0	118	13
Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	9
Sulawesi Tengah	0	164	0	17	12	19
Sulawesi Selatan	12	0	57	74	0	47
Sulawesi Tenggara	6	0	16	10	44	7
Gorontalo	3	0	0	0	5	7
Sulawesi Barat	0	0	57	74	0	23
Maluku	6	0	34	13	0	14
Maluku Utara	0	0	0	0	0	1
Papua Barat	0	0	0	0	0	2
Papua	0	1	21	24	35	5
Indonesia	345	2.796	824	1.266	1.912	1.024

Sumber: <http://www.pu.go.id/satminkal/>
dan Posko Bencana Kementerian PU

BAB V

INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

5.1 Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengalaman juga menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur memberikan efek yang berlipat bagi pembangunan terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang juga berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan kesempatan bisnis.

Infrastruktur jalan yang telah dibangun selama ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk menciptakan pondasi yang amat kuat dan mantap bagi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia. Pada Tabel 5.7 ditampilkan data panjang jalan di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan status kewenangannya. Jalan Negara relatif lebih panjang berada di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Lampung memiliki Jalan Provinsi yang juga lebih panjang. Sementara Jalan Kab/ Kota lebih panjang dimiliki oleh Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Jalan raya saat ini masih menjadi andalan bagi pergerakan orang dan barang ke berbagai pelosok negeri di wilayah Nusantara. Volume penggunaannya terus meningkat setiap tahun. Tidak hanya dalam hal jumlah, peningkatan juga terjadi dalam hal beban kendaraan, khususnya angkutan barang. Upaya efisiensi angkutan barang telah mendorong digunakannya kendaraan yang mempunyai daya angkut lebih besar. Dalam hal pertumbuhan ekonomi tentu menggembirakan, namun bagi Kementerian PU dan jajarannya, hal ini harus diwaspadai.

Beban jalan yang terus meningkat baik bobot maupun jumlah kendaraannya, menuntut tingginya kualitas jalan yang harus disediakan dan pemeliharaan secara berkelanjutan agar layanan infrastruktur tetap efektif. Di berbagai ruas jalan sering terlihat adanya upaya peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran dan *overlay* (pelapisan ulang) serta preservasi lainnya demi mempertahankan tingkat layanan jalan bahkan pembangunan jalan baru. Upaya-upaya tersebut menjadi prosesi tahunan jajaran Kementerian PU untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jalan.

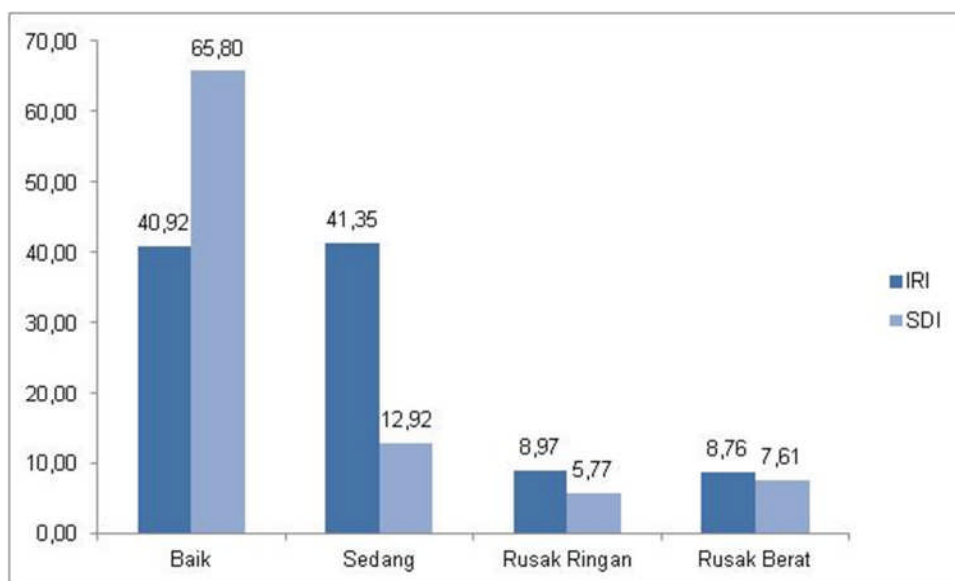
Pengelompokan jalan menurut kondisi berdasarkan *International Roughness Index (IRI)* dalam satu ruas jalan, kondisi jalan nasional hasil survei tahun 2010 disajikan pada Tabel 5.8 dan 5.9. Hasil survei menunjukkan 31.726,46 km atau 82,27% jalan nasional dalam kondisi mantap, dan 6.838,26 km atau 17,73% dalam kondisi yang tidak mantap. Dibandingkan dengan tahun 2009, panjang jalan dalam kondisi mantap di tahun 2010 mengalami peningkatan, namun dalam persentase mengalami yang sebaliknya. Panjang jalan dalam kondisi mantap di tahun 2009 tercatat 29.788,17 km atau 86,02%, dalam kondisi tidak mantap sepanjang 4.334,59 km atau 12,52%, dan yang tidak tembus sepanjang 506,07 km atau 1,46%.

Sementara berdasarkan survai SKJ/RCS yang dilakukan awal tahun 2011, kondisi Jalan Nasional berdasarkan *Surface Distress Index (SDI)* berada dalam kondisi mantap adalah sepanjang 30.373,24 km atau 78,72% dan dalam kondisi tidak mantap 5.164,63 km atau 13,39%. Dapat dilihat pada Tabel 5.10 dan 5.11.

Untuk jalan "Mantap" dan "Tidak Mantap" menggunakan kriteria yang sama dengan kondisi jalan secara fungsional, yaitu:

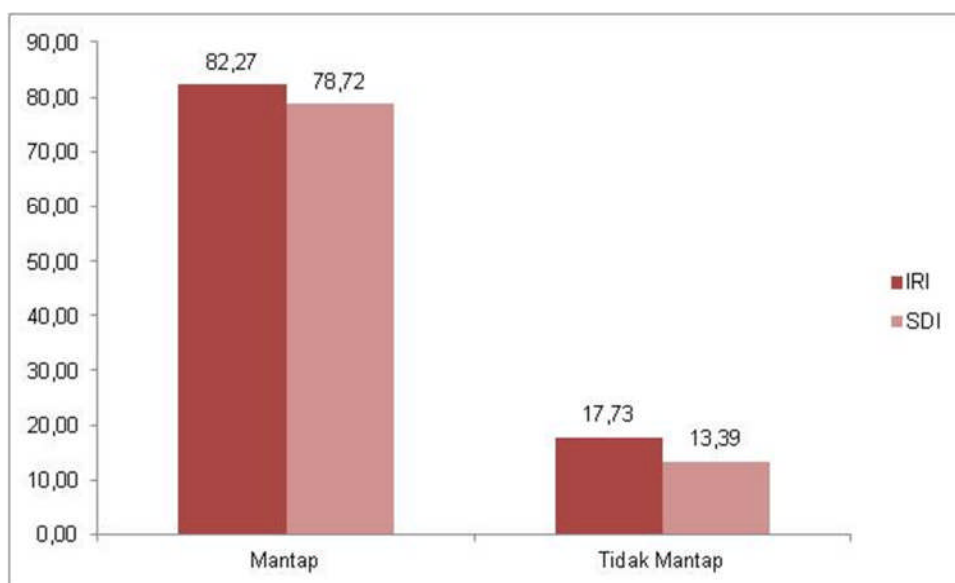
- Mantap jika kondisi jalan baik atau sedang
- Tidak Mantap jika kondisi jalan rusak ringan atau rusak berat.

Gambar 5.1 Persentase Kondisi Jalan Nasional (%) Tahun 2010



Sumber : Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU
 Catatan: IRI: Berdasarkan Survai IRI Akhir Desember 2010
 SDI: Berdasarkan Survai SKJ/RCS Awal 2011 Melalui SDM IRMS

Gambar 5.2 Persentase Kemantapan Jalan Nasional (%) Tahun 2010



Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU
 Catatan: IRI: Berdasarkan Survai IRI Akhir Desember 2010
 SDI: Berdasarkan Survai SKJ/RCS Awal 2011 Melalui SDM IRMS

Dari jenis permukaannya, jalan nasional yang sudah beraspal sepanjang 35.537,86 km atau 92,11 % dan yang masih tanah/ kerikil sepanjang 3.046,01 km atau 7,89 %. Rincian data Jalan Nasional berdasarkan jenis permukaan menurut provinsi terdapat pada Tabel 5.12

Rencana pembangunan jalan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengacu kepada rencana tata ruang dan mempertimbangkan aspek sosial penyediaan sarana angkutan umum dan sekaligus aspek lingkungan, sebagai sistem pengembangan terpadu mendukung "quality of life" masyarakat.

5.2 Jalan Tol

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan guna mendorong terciptanya pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. Namun rencana pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jalan membutuhkan dana yang besar, sementara pada sisi lain anggaran untuk pembangunan jalan baru maupun pemeliharaan jalan yang sudah ada sangat terbatas. Untuk mengatasinya, pemerintah memutuskan untuk melibatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Strategi ini membuka peluang investasi bagi sektor swasta yang dimungkinkan dengan adanya rencana pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan tol.

Selain kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan pengembalian investasi dari pendapatan tol, keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan jalan tol memberikan manfaat bagi masyarakat selaku pengguna jalan berupa penghematan biaya operasi kendaraan pengguna jalan tol, penghematan waktu tempuh dan peningkatan kenyamanan bagi pengguna jalan tol maupun non tol karena perpindahan sebagian kendaraan ke jalan tol. Manfaat lain bagi pemerintah adalah pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi sebagai hasil dari pengalihan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari kota besar, pada umumnya, ke daerah yang belum berkembang.

Pemerintah berupaya untuk membangun 3.085,65 km jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional dalam upaya penyempurnaan sistem jaringan jalan. Sepanjang 741,92 km jalan tol sudah beroperasi, 735,65 km sudah memiliki Perjanjian Pengusaha Jalan Tol (PPJT) di mana 173,25 km sedang dalam tahap konstruksi dan sisanya dalam proses pengadaan lahan, persiapan pengadaan lahan, persiapan penandatanganan PPJT serta persiapan tender. Informasi mengenai progres pembangunan jalan tol tahun 2011

serta informasi mengenai ruas dan panjang jalan tol yang telah beroperasi dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini dan Tabel 5.13.

**Tabel 5.1 Progres Pembangunan Jalan Tol
Tahun 2011**

Status	Jumlah Ruas	Panjang (km)
1	2	3
Beroperasi	28	741,92
PPJT*	20	735,65
Persiapan PPJT		
a. Tender Batch 2	2	35,53
b. Tender Batch 3**	2	118,71
Dibangun Oleh Pemerintah	4	78,01
Persiapan Tender		
a. Proyek Prioritas	15	397,30
b. Proyek Potensial	16	978,53
Jumlah	87	3.085,65

Sumber: Peluang Investasi Jalan Tol Di Indonesia 2011, BPJT, Kementerian PU

Catatan: * Bogor Ring Road Seksi I sudah beroperasi

** Pengadaan lahan dan sebagian konstruksinya oleh Pemerintah

5.3 Jembatan

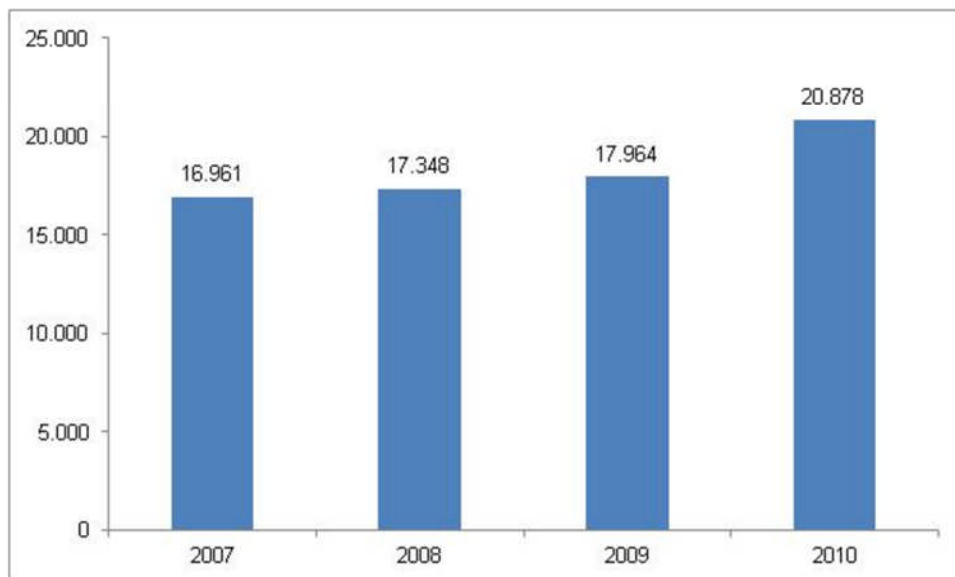
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan jembatan yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Jembatan (*Bridge Management System/BMS*). Salah satu aktivitas sistem ini adalah perencanaan dan pembuatan program penanganan jembatan, yang berfungsi untuk menjamin pengalokasian biaya pemeliharaan jembatan dilakukan secara optimal. Hal ini dilakukan dengan skrining teknis dan evaluasi ekonomi, untuk menentukan prioritas penanganan suatu jembatan. Menurut BMS, berdasarkan panjang jembatan, maka jembatan nasional dibagi atas :

- a) 0 – 20 m
- b) 20 – 30 m
- c) 30 – 60 m
- d) 60 – 100 m
- e) > 100 m

Rekapitulasi jumlah jembatan nasional menurut BMS berdasarkan panjang jembatan tahun 2011 disajikan pada Tabel 5.14 (unit) dan 5.15 (%). Data menunjukkan jumlah jembatan dengan panjang 0 – 20 m ada sebanyak 15.897 unit, 20 – 30 m sebanyak 2.041 unit, 30 – 60 m sebanyak 1.949 unit, 60 – 100 m sebanyak 544 unit, dan lebih dari 100 m sebanyak 447 unit. Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang paling banyak terdapat jembatan nasional dengan jumlah seluruhnya 2.921 unit.

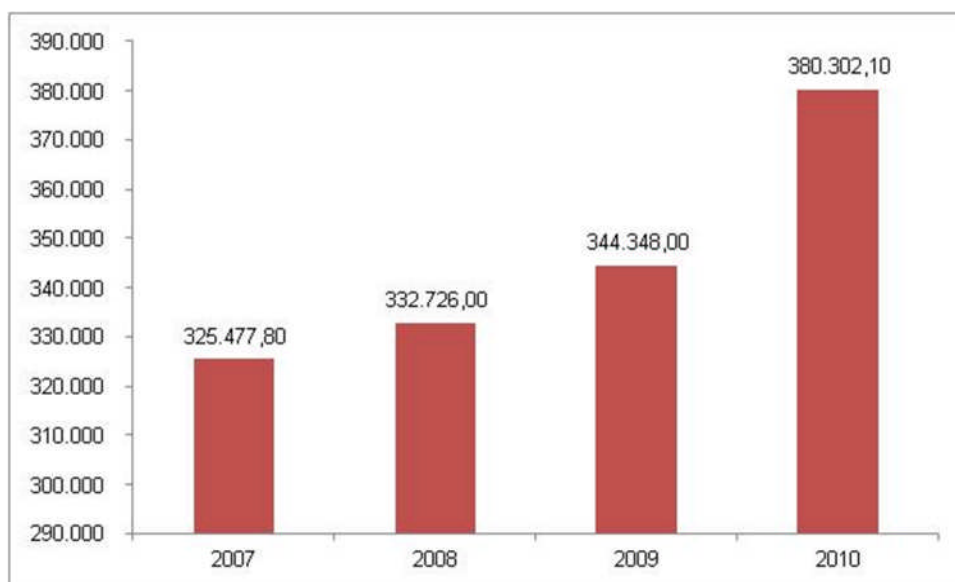
Sementara rekapitulasi panjang jembatan nasional menurut BMS tahun 2011 menunjukkan panjang jembatan dengan klasifikasi panjang 0 – 20 m sebanyak 33,15%, 20 – 30 m sebanyak 13,13%, 30 – 60 m sebanyak 21,48%, 60 – 100 m sebanyak 10,97% dan lebih dari 100 m sebanyak 21,28%. Rekapitulasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.16 dan 5.17. Sementara perkembangan jumlah dan panjang jembatan nasional dapat dilihat dari Gambar 5.3 dan 5.4.

**Gambar 5.3 Jumlah Jembatan Nasional (unit)
Tahun 2007-2011**



Sumber: Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU
Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU
Catatan: Data tahun 2007 status 11 Februari 2008
Data tahun 2008 status 10 Desember 2008
Data tahun 2009 status 05 Januari 2010
Data tahun 2010 status 26 Maret 2011

**Gambar 5.4 Panjang Jembatan Nasional (m)
Tahun 2007-2011**



Sumber: Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU
Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU
Catatan: Data tahun 2007 status 11 Februari 2008
Data tahun 2008 status 10 Desember 2008
Data tahun 2009 status 05 Januari 2010
Data tahun 2010 status 26 Maret 2011

5.4 Analisis Statistik Bidang Bina Marga

Seperti yang menjadi visi dan misi Ditjen Bina Marga, yaitu mewujudkan sistem jaringan jalan yang handal, terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat dan kesejahteraan sosial, analisa ini ditujukan untuk melihat ada tidaknya keterkaitan antara kondisi jalan nasional (jalan dalam kondisi mantap) dengan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan di Indonesia yang diasumsikan sebagai representasi keadaan ekonomi. Data yang digunakan dalam analisis ini untuk PDRB diperoleh dari BPS, dan data panjang jalan nasional dari Ditjen Bina Marga. Secara lengkap, data pada analisis ini ditampilkan pada Tabel 5.18.

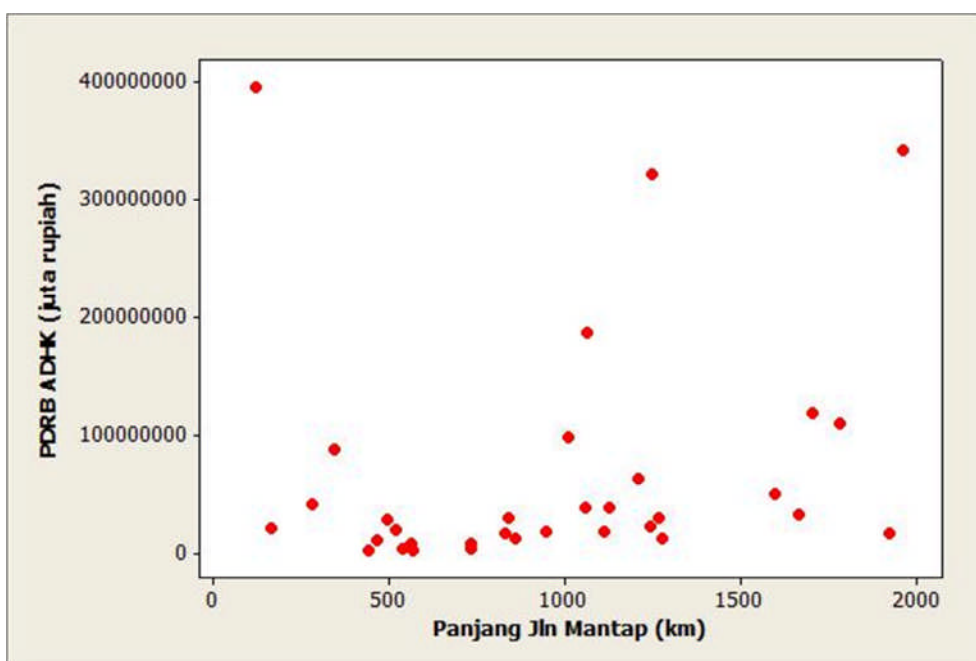
Dengan menggunakan analisa korelasi, terlihat bahwa korelasi antara panjang jalan dalam kondisi mantap dengan PDRB sebesar 0,173. Namun angka signifikansi sebesar 0,336 mengindikasikan bahwa korelasi ini tidak berarti, dan tidak ada keterkaitan antara panjang jalan di suatu provinsi dengan PDRBnya.

Tabel 5.2 Korelasi Antara Panjang Jalan Dengan PDRB

		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	Panjang Jalan Mantap IRI (km)	Persentase Jalan Mantap IRI (%)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	Pearson Correlation	1	.173	.208
	Sig. (2-tailed)		.336	.246
	N	33	33	33
Panjang Jalan Mantap IRI (km)	Pearson Correlation	.173	1	.118
	Sig. (2-tailed)	.336		.512
	N	33	33	33
Persentase Jalan Mantap IRI (%)	Pearson Correlation	.208	.118	1
	Sig. (2-tailed)	.246	.512	
	N	33	33	33

Jika diteliti lebih lanjut, pada Gambar 5.5 ditampilkan plot data antara panjang jalan mantap dengan PDRB setiap provinsi. Ada satu titik di kanan atas yang terletak jauh dari kumpulan titik yang lain. Titik ini merupakan plot dari DKI Jakarta dengan panjang jalan kondisi mantap 125,17 km dan PDRB sebesar 395.664.497,61 juta rupiah. Hal ini tentu mempengaruhi analisa karena nilai PDRB DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia, namun panjang jalan mantap relatif kecil dibanding dengan provinsi lain karena luas DKI Jakarta yang memang kecil.

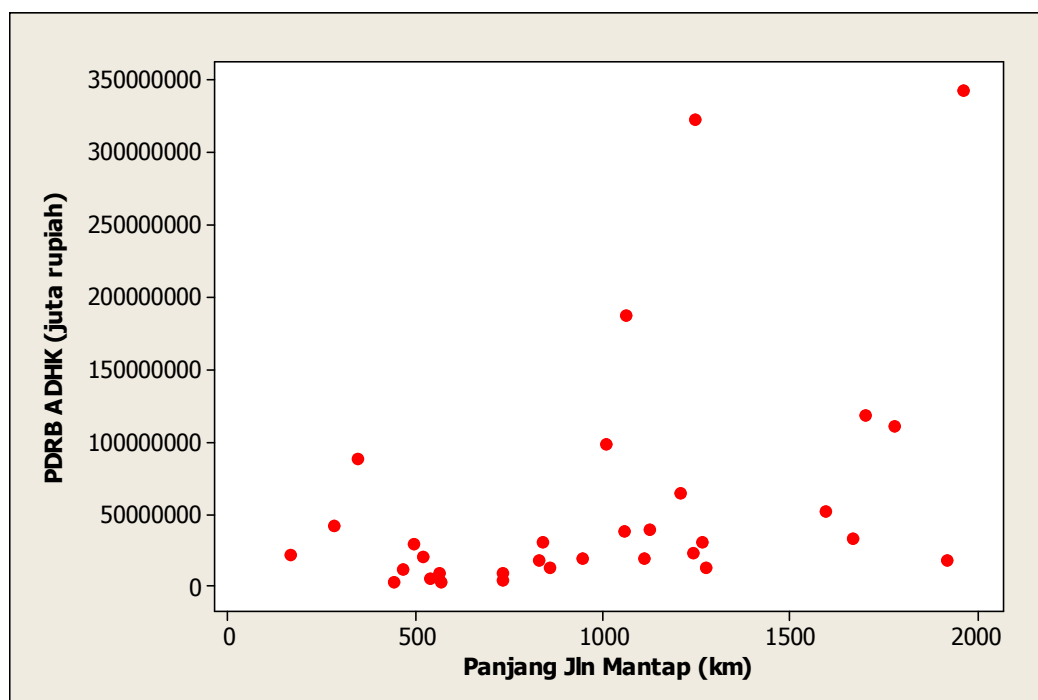
Gambar 5.5 Plot Panjang Jalan Kondisi Mantap (km) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010



Selanjutnya akan coba diplotkan dan dilakukan perhitungan korelasi kembali, namun tidak menyertakan DKI Jakarta dengan menganggap DKI Jakarta sebagai objek khusus. Yang dimaksud khusus di sini dikarenakan luas wilayah DKI Jakarta yang relatif kecil dibanding provinsi lain sehingga panjang jalannya juga kecil, namun menjadi pusat kegiatan ekonomi negara. Plot serta hasil analisa terdapat pada Gambar 5.6 dan Tabel 5.3.

Dari analisa kedua ternyata diperoleh hasil terdapat korelasi searah yang signifikan antara panjang jalan kondisi mantap dengan PDRB di setiap provinsi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa provinsi dengan panjang jalan kondisi mantap tinggi cenderung nilai PDRBnya juga tinggi dengan nilai korelasi sebesar 0,446 dan nilai signifikansi 0,011.

**Gambar 5.6 Plot Panjang Jalan Kondisi Mantap (km)
dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa DKI Jakarta
Tahun 2010**



Tabel 5.3 Korelasi Antara Panjang Jalan Dengan PDRB (tanpa DKI Jakarta)

		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	Panjang Jalan Mantap IRI (km)	Persentase Jalan Mantap IRI (%)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	Pearson Correlation	1	.446	.206
	Sig. (2-tailed)		.011	.258
	N	32	32	32
Panjang Jalan Mantap IRI (km)	Pearson Correlation	.446	1	.146
	Sig. (2-tailed)	.011		.426
	N	32	32	32
Persentase Jalan Mantap IRI (%)	Pearson Correlation	.206	.146	1
	Sig. (2-tailed)	.258	.426	
	N	32	32	32

Meskipun masih banyak faktor lain yang bisa menjadi parameter keadaan ekonomi dan keberhasilan pembangunan infrastruktur suatu provinsi, namun karena data yang tersedia pada saat ini baru memungkinkan untuk dilakukan analisa sederhana di atas, maka hal ini menguatkan pentingnya keberadaan infrastruktur yang baik untuk mendukung perekonomian rakyat dan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik.

**Tabel 5.4 Jalan Nasional Bukan Jalan Tol
(Menurut Kepmen PU No. 92 Tahun 2011)**

Provinsi	Panjang Ruas (km)
1	2
Aceh	1.803,354
Sumatera Utara	2.249,644
Sumatera Barat	1.212,889
Riau	1.134,466
Kepulauan Riau	333,995
Jambi	936,480
Bengkulu	783,867
Sumatera Selatan	1.444,261
Kepulauan Bangka Belitung	509,589
Lampung	1.159,573
DKI Jakarta	142,647
Banten	476,491
Jawa Barat	1.351,132
Jawa Tengah	1.390,571
DI Yogyakarta	223,161
Jawa Timur	2.027,005
Kalimantan Barat	1.664,553
Kalimantan Tengah	1.714,833
Kalimantan Timur	2.118,167
Kalimantan Selatan	866,086
Bali	535,230
Nusa Tenggara Barat	632,174
Nusa Tenggara Timur	1.406,681
Sulawesi Utara	1.319,231
Gorontalo	606,696
Sulawesi Tengah	2.181,945
Sulawesi Barat	571,981
Sulawesi Selatan	1.722,856
Sulawesi Tenggara	1.397,051
Maluku	1.066,650
Maluku Utara	511,889
Papua	2.111,437
Papua Barat	963,238
Indonesia	38.569,823

Sumber: Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 92/KPTS/M/2011
 Tanggal : 4 April 2011
 Provinsi : Seluruh Indonesia

**Tabel 5.5 Jalan Strategis Nasional Rencana
(Menurut Kepmen PU No. 92 Tahun 2011)**

Provinsi	Panjang Ruas (km)
1	2
Aceh	520,680
Sumatera Utara	483,187
Sumatera Barat	267,406
Riau	270,926
Kepulauan Riau	117,373
Jambi	347,915
Bengkulu	121,400
Sumatera Selatan	137,320
Lampung	18,160
DKI Jakarta	7,600
Banten	187,224
Jawa Barat	492,268
Jawa Tengah	414,436
DI Yogyakarta	145,521
Jawa Timur	726,841
Kalimantan Barat	528,689
Kalimantan Tengah	538,782
Kalimantan Timur	313,910
Kalimantan Selatan	238,597
Bali	2,330
Nusa Tenggara Barat	202,838
Nusa Tenggara Timur	1.103,585
Sulawesi Utara	293,052
Gorontalo	80,000
Sulawesi Tengah	359,463
Sulawesi Barat	120,750
Sulawesi Selatan	34,173
Sulawesi Tenggara	113,568
Maluku	289,682
Maluku Utara	486,805
Papua	1.387,260
Papua Barat	1.226,066
Indonesia	11.577,807

Sumber: Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 92/KPTS/M/2011
 Tanggal : 4 April 2011
 Provinsi : Seluruh Indonesia

**Tabel 5.6 Jalan Nasional Jalan Tol
(Menurut Kepmen PU No. 92 Tahun 2011)**

Pulau	Panjang Ruas (km)	
	Operasi	Rencana
1	2	3
Pulau Sumatera	42,700	2.805,200
Pulau Jawa	697,120	1.675,710
Pulau Bali		9,700
Pulau Kalimantan		84,000
Pulau Sulawesi	17,650	46,000
Indonesia	757,470	4.620,610

Sumber: Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 92/KPTS/M/2011
 Tanggal : 4 April 2011
 Provinsi : Seluruh Indonesia

**Tabel 5.7 Panjang Jalan Menurut Provinsi
dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)
Tahun 2007-2009¹**

Provinsi	Akhir Tahun	Negara ²	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	2007	1.783	1.702	15.197	18.682
	2008	1.783	1.702	15.417	18.902
	2009	1.803	1.702	17.115	20.620
Sumatera Utara	2007	2.098	2.752	32.114	36.964
	2008	2.098	2.752	32.672	37.522
	2009	2.250	2.752	32.467	37.469
Sumatera Barat	2007	1.200	1.131	15.459	17.790
	2008	1.200	1.131	15.887	18.218
	2009	1.213	1.154	16.081	18.448
Riau	2007 ³	1.126	1.796	18.520	21.442
	2008 ³	1.126	1.796	21.549	24.471
	2009	1.134	1.873	19.328	22.335
Kepulauan Riau	2007	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	334	512	4.453	5.299
Jambi	2007	820	1.525	8.132	10.477
	2008	820	1.525	8.132	10.477
	2009	936	1.025	8.990	10.951
Sumatera Selatan	2007	1.290	1.621	11.153	14.064
	2008	1.290	1.621	12.141	15.052
	2009	1.444	1.749	13.534	16.727
Kep. Bangka Belitung	2007	531	511	2.666	3.708
	2008	531	511	3.396	4.438
	2009	510	551	3.446	4.507
Bengkulu	2007	736	1.357	3.829	5.922
	2008	736	1.357	3.829	5.922
	2009	784	1.563	5.278	7.625
Lampung	2007	1.004	2.355	11.544	14.903
	2008	1.004	2.355	11.544	14.903
	2009	1.160	2.368	13.932	17.460
DKI Jakarta	2007	122	1.125	4.938	6.185
	2008	122	1.125	4.938	6.185
	2009	143	1.329	4.938	6.410
Jawa Barat	2007	1.141	2.141	22.397	25.679
	2008	1.141	2.141	22.575	25.857
	2009	1.351	2.199	23.331	26.881
Banten	2007	490	372	3.911	4.773
	2008	490	372	3.994	4.856
	2009	476	889	3.846	5.211
Jawa Tengah	2007	1.298	2.550	24.642	28.490
	2008	1.298	2.550	25.056	28.904
	2009	1.391	2.540	25.743	29.674

Lanjutan Tabel 5.7

Provinsi	Akhir Tahun	Negara ²	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	2	3	4	5	6
DI Yogyakarta	2007	169	690	3.974	4.833
	2008	169	690	4.000	4.859
	2009	223	690	3.977	4.890
Jawa Timur	2007	1.899	1.439	33.689	37.027
	2008	1.899	1.439	34.476	37.814
	2009	2.027	2.001	34.537	38.565
Bali	2007	502	840	6.018	7.360
	2008	502	840	6.018	7.360
	2009	535	883	5.842	7.260
Nusa Tenggara Barat	2007	602	1.416	5.329	7.347
	2008	602	1.416	5.333	7.351
	2009	632	1.842	5.499	7.973
Nusa Tenggara Timur	2007	1.273	2.627	16.497	20.397
	2008	1.273	2.627	16.497	20.397
	2009	1.407	1.737	15.335	18.479
Kalimantan Barat	2007	1.575	628	10.808	13.011
	2008	1.575	628	11.049	13.252
	2009	1.665	1.656	10.955	14.276
Kalimantan Tengah	2007	1.715	772	9.312	11.799
	2008	1.715	772	9.367	11.854
	2009	1.715	1.708	10.476	13.899
Kalimantan Selatan	2007	876	898	7.978	9.752
	2008	876	898	8.057	9.831
	2009	866	812	9.317	10.995
Kalimantan Timur	2007	1.540	1.442	6.804	9.786
	2008	1.540	1.442	6.804	9.786
	2009	2.118	1.554	7.720	11.392
Sulawesi Utara	2007	1.267	741	3.952	5.960
	2008	1.267	741	3.952	5.960
	2009	1.319	940	5.889	8.148
Gorontalo	2007	616	284	4.077	4.977
	2008	616	284	4.077	4.977
	2009	607	408	4.878	5.893
Sulawesi Tengah	2007	1.807	1.977	11.842	15.626
	2008	1.807	1.977	11.974	15.758
	2009	2.182	2.037	11.705	15.924
Sulawesi Selatan	2007	1.578	816	25.978	28.372
	2008	1.578	816	31.053	33.447
	2009	1.723	1.260	28.680	31.663
Sulawesi Barat	2007	530	670	6.137	7.337
	2008	530	670	6.137	7.337
	2009	572	441	7.311	8.324

Lanjutan Tabel 5.7

Provinsi	Akhir Tahun	Negara ²	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Sulawesi Tenggara	2007	1.294	489	6.409	8.192
	2008	1.294	489	6.409	8.192
	2009	1.397	1.187	6.013	8.597
Maluku	2007	985	998	4.001	5.984
	2008	985	998	4.274	6.257
	2009	1.067	1.612	4.297	6.976
Maluku Utara	2007	458	587	357	1.402
	2008	458	587	3.281	4.326
	2009	512	1.867	2.461	4.840
Papua	2007	1.795	1.119	5.597	8.511
	2008	1.795	1.119	5.597	8.511
	2009	2.111	1.873	11.865	15.849
Papua Barat	2007	508	754	3.521	4.783
	2008	508	754	3.521	4.783
	2009	963	2.253	5.630	8.846
Indonesia	2007	34.628	40.125	346.782	421.535
	2008	34.628	40.125	363.006	437.759
	2009	38.570	48.967	384.869 x	472.406

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Kab/Kota
Statistik Indonesia 2010, BPS RI

Catatan: ¹ Angka diperbaiki

^x Angka sementara

¹ Data tidak termasuk panjang jalan tol sepanjang 757,47 km

² Tahun 2009 Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No.630/KPTS/M/2009

³ Termasuk Kepulauan Riau

Tabel 5.8 Kondisi Jalan Nasional Tahun 2010 (km)
(Berdasarkan Survei IRI Akhir Desember 2010)

Status Tgl 09 Maret 2011

Provinsi	Panjang SK-09	Survei IRI	Kondisi Berdasarkan IRI				Kemantapan Jalan	
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
NAD	1.803,35	1.803,35	1.120,41	547,15	45,67	90,13	1.667,56	135,80
Sumatera Utara	2.249,64	2.249,64	245,41	1.459,22	294,98	250,03	1.704,63	545,01
Sumatera Barat	1.212,89	1.212,89	528,84	599,27	60,82	23,96	1.128,11	84,78
Riau	1.134,47	1.134,47	710,38	301,48	74,47	48,14	1.011,86	122,61
Kepulauan Riau	334,00	334,00	215,67	67,14	11,29	39,90	282,81	51,19
Jambi	936,48	936,48	237,41	592,96	85,16	20,96	830,36	106,12
Bengkulu	783,87	783,87	436,76	299,63	25,35	22,13	736,38	47,48
Sumatera Selatan	1.444,26	1.444,25	263,54	944,51	181,28	54,93	1.208,04	236,20
Kep. Bangka Belitung	509,59	509,59	159,74	308,21	39,16	2,48	467,95	41,64
Lampung	1.159,57	1.159,57	600,98	456,18	77,08	25,33	1.057,16	102,41
DKI Jakarta	142,65	142,65	32,81	92,36	16,97	0,50	125,17	17,47
Banten	476,49	476,49	31,67	313,69	66,31	64,82	345,37	131,12
Jawa Barat	1.351,13	1.351,13	557,24	690,62	85,55	17,73	1.247,85	103,28
Jawa Tengah	1.390,57	1.390,58	111,17	953,81	237,33	88,27	1.064,98	325,60
DI Yogyakarta	223,16	223,16	94,87	70,55	57,57	0,17	165,42	57,74
Jawa Timur	2.027,01	2.025,71	1.311,41	651,41	36,36	26,53	1.962,82	62,89
Kalimantan Barat	1.664,55	1.664,45	386,33	882,17	324,51	71,45	1.268,49	395,96
Kalimantan Tengah	1.714,83	1.714,84	850,23	263,80	106,86	493,95	1.114,03	600,81
Kalimantan Timur	2.118,17	2.118,17	433,72	1.348,37	255,00	81,08	1.782,09	336,08
Kalimantan Selatan	866,09	868,18	531,20	308,52	25,59	2,87	839,72	28,46
Bali	535,23	535,23	365,28	132,07	14,61	23,27	497,35	37,88
Nusa Tenggara Barat	632,17	629,22	170,21	352,23	38,87	67,92	522,44	106,79
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	1.406,68	826,97	449,27	83,44	47,00	1.276,24	130,44
Sulawesi Utara	1.319,23	1.319,23	24,31	924,39	222,61	147,92	948,70	370,53
Gorontalo	606,70	606,70	491,18	76,08	19,60	19,84	567,26	39,44
Sulawesi Tengah	2.181,95	2.181,97	1.489,54	433,43	144,38	114,62	1.922,97	259,00
Sulawesi Barat	571,98	571,99	405,71	136,23	14,85	15,21	541,93	30,06
Sulawesi Selatan	1.722,86	1.722,86	1.029,29	566,70	100,21	26,66	1.595,99	126,87
Sulawesi Tenggara	1.397,05	1.394,77	452,12	406,18	228,10	308,38	858,30	536,48
Maluku	1.066,65	1.066,65	535,27	198,28	69,73	263,37	733,55	333,10
Maluku Utara	511,89	511,78	302,05	139,21	13,92	56,60	441,26	70,52
Papua	2.111,44	2.110,93	567,40	675,61	347,14	520,78	1.243,01	867,92
Papua Barat	963,24	963,24	261,76	304,88	54,04	342,57	566,63	396,61
Indonesia	38.569,82	38.564,72	15.780,88	15.945,58	3.458,79	3.379,47	31.726,46	6.838,26

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 5.9 Kondisi Jalan Nasional Tahun 2010 (%)
(Berdasarkan Survei IRI Akhir Desember 2010)

Status Tgl 09 Maret 2011

Provinsi	Kondisi Berdasarkan IRI				Kemantapan Jalan	
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
1	2	3	4	5	6	7
NAD	62,13	30,34	2,53	5,00	92,47	7,53
Sumatera Utara	10,91	64,86	13,11	11,11	75,77	24,23
Sumatera Barat	43,60	49,41	5,01	1,98	93,01	6,99
Riau	62,62	26,57	6,56	4,24	89,19	10,81
Kepulauan Riau	64,57	20,10	3,38	11,95	84,67	15,33
Jambi	25,35	63,32	9,09	2,24	88,67	11,33
Bengkulu	55,72	38,22	3,23	2,82	93,94	6,06
Sumatera Selatan	18,25	65,40	12,55	3,80	83,65	16,35
Kep. Bangka Belitung	31,35	60,48	7,68	0,49	91,83	8,17
Lampung	51,83	39,34	6,65	2,18	91,17	8,83
DKI Jakarta	23,00	64,75	11,90	0,35	87,75	12,25
Banten	6,65	65,83	13,92	13,60	72,48	27,52
Jawa Barat	41,24	51,11	6,33	1,31	92,36	7,64
Jawa Tengah	7,99	68,59	17,07	6,35	76,59	23,41
DI Yogyakarta	42,51	31,61	25,80	0,08	74,13	25,87
Jawa Timur	64,74	32,16	1,79	1,31	96,90	3,10
Kalimantan Barat	23,21	53,00	19,50	4,29	76,21	23,79
Kalimantan Tengah	49,58	15,38	6,23	28,80	64,96	35,04
Kalimantan Timur	20,48	63,66	12,04	3,83	84,13	15,87
Kalimantan Selatan	61,19	35,54	2,95	0,33	96,72	3,28
Bali	68,25	24,68	2,73	4,35	92,92	7,08
Nusa Tenggara Barat	27,05	55,98	6,18	10,79	83,03	16,97
Nusa Tenggara Timur	58,79	31,94	5,93	3,34	90,73	9,27
Sulawesi Utara	1,84	70,07	16,87	11,21	71,91	28,09
Gorontalo	80,96	12,54	3,23	3,27	93,50	6,50
Sulawesi Tengah	68,27	19,86	6,62	5,25	88,13	11,87
Sulawesi Barat	70,93	23,82	2,60	2,66	94,75	5,25
Sulawesi Selatan	59,74	32,89	5,82	1,55	92,64	7,36
Sulawesi Tenggara	32,42	29,12	16,35	22,11	61,54	38,46
Maluku	50,18	18,59	6,54	24,69	68,77	31,23
Maluku Utara	59,02	27,20	2,72	11,06	86,22	13,78
Papua	26,88	32,01	16,44	24,67	58,88	41,12
Papua Barat	27,17	31,65	5,61	35,56	58,83	41,17
Indonesia	40,92	41,35	8,97	8,76	82,27	17,73

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 5.10 Kondisi Jalan Nasional (km)
(Berdasarkan Data Survai SKJ/RCS Awal 2011 Yang Diinput Melalui SDM IRMS)

Status Tgl 09 Maret 2011

Provinsi	Surai RCS	Kondisi Berdasarkan SDI					
		Panjang Kondisi Jalan				Kemantapan Jalan	
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
1	2	3	4	5	6	7	8
NAD	1.807,95	1.511,31	38,48	106,72	47,64	1.549,80	154,37
Sumatera Utara	2.249,64	1.249,41	498,37	182,61	269,76	1.747,77	452,37
Sumatera Barat	1.212,89	541,69	247,84	210,41	212,95	789,52	423,37
Riau	1.134,47	703,08	183,04	94,63	103,72	886,12	198,35
Kepulauan Riau	334,00	266,11	12,64	0,00	1,99	278,75	1,99
Jambi	936,48	812,54	74,43	36,68	12,84	886,97	49,51
Bengkulu	783,87	418,20	192,96	43,51	129,20	611,16	172,71
Sumatera Selatan	1.444,26	1.106,12	223,43	63,15	51,56	1.329,55	114,71
Kep. Bangka Belitung	509,59	432,45	25,79	25,99	25,36	458,24	51,35
Lampung	1.159,57	805,90	187,68	106,00	60,00	993,57	166,00
DKI Jakarta	142,65	119,44	12,45	1,91	8,85	131,88	10,76
Banten	476,49	470,49	1,00	4,00	1,00	471,49	5,00
Jawa Barat	1.351,13	942,11	219,80	59,54	129,68	1.161,91	189,23
Jawa Tengah	1.390,58	793,71	326,05	132,48	138,34	1.119,76	270,82
DI Yogyakarta	223,16	177,53	37,96	5,65	2,02	215,49	7,67
Jawa Timur	2.028,01	1.821,38	152,98	18,82	9,78	1.974,35	28,60
Kalimantan Barat	1.664,55	1.008,19	228,90	69,13	73,85	1.237,09	142,99
Kalimantan Tengah	1.714,83	978,29	78,74	50,20	76,00	1.057,03	126,20
Kalimantan Timur	2.118,12	1.045,84	263,90	199,12	391,16	1.309,73	590,29
Kalimantan Selatan	866,09	813,99	21,88	1,98	28,23	835,87	30,22
Bali	535,23	446,39	57,78	18,63	12,43	504,17	31,06
Nusa Tenggara Barat	632,17	491,13	37,60	14,21	89,23	528,73	103,45
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	1.017,22	203,58	51,13	133,69	1.220,80	184,82
Sulawesi Utara	1.319,23	968,63	175,78	51,18	69,45	1.144,41	120,63
Gorontalo	606,70	491,94	70,85	25,82	18,08	562,79	43,90
Sulawesi Tengah	2.181,96	1.419,13	332,46	114,91	260,00	1.751,59	374,91
Sulawesi Barat	571,99	407,96	74,45	50,12	39,46	482,41	89,58
Sulawesi Selatan	1.722,86	1.266,21	196,06	75,83	184,76	1.462,27	260,59
Sulawesi Tenggara	1.405,52	834,33	163,39	126,75	129,56	997,71	256,31
Maluku	1.066,65	737,42	64,31	6,00	32,64	801,73	38,64
Maluku Utara	511,89	409,84	26,36	12,00	18,00	436,20	30,00
Papua	2.111,44	684,91	371,28	184,44	51,26	1.056,18	235,70
Papua Barat	963,24	197,16	181,04	84,33	124,23	378,20	208,56
Indonesia	38.583,87	25.390,02	4.983,21	2.227,89	2.936,74	30.373,24	5.164,63

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 5.11 Kondisi Jalan Nasional (%)
(Berdasarkan Data Survei SKJ/RCS Awal 2011 Yang Diinput Melalui SDM IRMS)

Status Tgl 09 Maret 2011

Provinsi	Kondisi Berdasarkan SDI					
	Panjang Kondisi Jalan				Kemantapan Jalan	
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
1	2	3	4	5	6	7
NAD	83,59	2,13	5,90	2,64	85,72	8,54
Sumatera Utara	55,54	22,15	8,12	11,99	77,69	20,11
Sumatera Barat	44,66	20,43	17,35	17,56	65,09	34,91
Riau	61,97	16,13	8,34	9,14	78,11	17,48
Kepulauan Riau	79,67	3,78	0,00	0,60	83,46	0,60
Jambi	86,77	7,95	3,92	1,37	94,71	5,29
Bengkulu	53,35	24,62	5,55	16,48	77,97	22,03
Sumatera Selatan	76,59	15,47	4,37	3,57	92,06	7,94
Kep. Bangka Belitung	84,86	5,06	5,10	4,98	89,92	10,08
Lampung	69,50	16,18	9,14	5,17	85,68	14,32
DKI Jakarta	83,73	8,72	1,34	6,21	92,45	7,55
Banten	98,74	0,21	0,84	0,21	98,95	1,05
Jawa Barat	69,73	16,27	4,41	9,60	86,00	14,00
Jawa Tengah	57,08	23,45	9,53	9,95	80,52	19,48
DI Yogyakarta	79,55	17,01	2,53	0,91	96,56	3,44
Jawa Timur	89,81	7,54	0,93	0,48	97,35	1,41
Kalimantan Barat	60,57	13,75	4,15	4,44	74,32	8,59
Kalimantan Tengah	57,05	4,59	2,93	4,43	61,64	7,36
Kalimantan Timur	49,38	12,46	9,40	18,47	61,83	27,87
Kalimantan Selatan	93,99	2,53	0,23	3,26	96,51	3,49
Bali	83,40	10,80	3,48	2,32	94,20	5,80
Nusa Tenggara Barat	77,69	5,95	2,25	14,12	83,64	16,36
Nusa Tenggara Timur	72,31	14,47	3,63	9,50	86,79	13,14
Sulawesi Utara	73,42	13,32	3,88	5,26	86,75	9,14
Gorontalo	81,09	11,68	4,26	2,98	92,76	7,24
Sulawesi Tengah	65,04	15,24	5,27	11,92	80,28	17,18
Sulawesi Barat	71,32	13,02	8,76	6,90	84,34	15,66
Sulawesi Selatan	73,49	11,38	4,40	10,72	84,87	15,13
Sulawesi Tenggara	59,36	11,62	9,02	9,22	70,99	18,24
Maluku	69,13	6,03	0,56	3,06	75,16	3,62
Maluku Utara	80,06	5,15	2,34	3,52	85,21	5,86
Papua	32,44	17,58	8,74	2,43	50,02	11,16
Papua Barat	20,47	18,80	8,75	12,90	39,26	21,65
Indonesia	65,80	12,92	5,77	7,61	78,72	13,39

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

**Tabel 5.12 Kondisi Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan
(Berdasarkan Data Survei SKJ/RCS Awal 2011 Yang Diinput Melalui SDM IRMS)**

Status Tgl 09 Maret 2011

Provinsi	Panjang (km)		Persentase (%)	
	Aspal	Tanah/ Kerikil	Aspal	Tanah/ Kerikil
1	2	3	4	5
NAD	1.704,16	103,79	94,26	5,74
Sumatera Utara	2.200,14	49,50	97,80	2,20
Sumatera Barat	1.212,89	0,00	100,00	0,00
Riau	1.084,47	50,00	95,59	4,41
Kepulauan Riau	280,74	53,26	84,05	15,95
Jambi	936,48	0,00	100,00	0,00
Bengkulu	783,87	0,00	100,00	0,00
Sumatera Selatan	1.444,26	0,00	100,00	0,00
Kep. Bangka Belitung	509,59	0,00	100,00	0,00
Lampung	1.159,57	0,00	100,00	0,00
DKI Jakarta	142,65	0,00	100,00	0,00
Banten	476,49	0,00	100,00	0,00
Jawa Barat	1.351,13	0,00	100,00	0,00
Jawa Tengah	1.390,58	0,00	100,00	0,00
DI Yogyakarta	223,16	0,00	100,00	0,00
Jawa Timur	2.002,95	25,06	98,76	1,24
Kalimantan Barat	1.380,07	284,48	82,91	17,09
Kalimantan Tengah	1.183,23	531,60	69,00	31,00
Kalimantan Timur	1.900,02	218,10	89,70	10,30
Kalimantan Selatan	866,09	0,00	100,00	0,00
Bali	535,23	0,00	100,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	632,17	0,00	100,00	0,00
Nusa Tenggara Timur	1.405,62	1,06	99,92	0,08
Sulawesi Utara	1.265,04	54,19	95,89	4,11
Gorontalo	606,70	0,00	100,00	0,00
Sulawesi Tengah	2.126,50	55,46	97,46	2,54
Sulawesi Barat	571,99	0,00	100,00	0,00
Sulawesi Selatan	1.722,86	0,00	100,00	0,00
Sulawesi Utara	1.254,02	151,50	89,22	10,78
Maluku	840,37	226,28	78,79	21,21
Maluku Utara	466,20	45,69	91,07	8,93
Papua	1.291,88	819,55	61,19	38,81
Papua Barat	586,76	376,48	60,91	39,09
Indonesia	35.537,86	3.046,01	92,11	7,89

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 5.13 Jalan Tol Beroperasi

No.	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Investor	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
1	2	3	4	5	6
A Dikelola Oleh PT. Jasa Marga					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	50,00	9,00	PT. Jasa Marga	1978
2	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	PT. Jasa Marga	1983 - 1998
3	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	PT. Jasa Marga	1984
4	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	PT. Jasa Marga	1985
5	Padalarang - Cilununyi	35,63	28,77	PT. Jasa Marga	1986
6	Prof. DR Soedyatmo	14,30		PT. Jasa Marga	1986
7	Lingkar Dalam Kota Jakarta	23,55		PT. Jasa Marga	1988
8	Belmera	33,70	9,00	PT. Jasa Marga	1989 & 1996
9	Semarang Seksi A.B.C	24,75		PT. Jasa Marga	1983, 1987, 1998
10	Ulujami - Pondok Aren	5,55		PT. Jasa Marga	2001
11	Cirebon - Palimanan	26,30		PT. Jasa Marga	1998
12	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Veteran)			PT. Jasa Marga	1991
	JORR E1 Selatan (Taman Mini - Hankam Raya)	16,77		PT. Jasa Marga	1998
	JORR E2 (Cikunir - Cakung)			PT. Jasa Marga	2001 - 2003
13	Cikampek - Padalarang I	17,50		PT. Jasa Marga	2004
14	Cikampek - Padalarang II	41,00		PT. Jasa Marga	2005
15	JORR E1 - 3, W2 - S2, E3, E1 - 4	14,35		PT. Jasa Marga	2005
16	JORR Selatan (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25		PT. Jasa Marga	1995 - 1996
17	Jembatan Suramadu (Surabaya - Madura)	5,40		PT. Jasa Marga	10 Juni 2009
	TOTAL	465,05	69,77		
	SUB TOTAL A	534,82			
B Dikelola Oleh Badan Usaha					
1	Tangerang - Merak	73,00		PT. Marga Mandala Sakti	1987 & 1996
2	Ir.Wiyoto Wiyono, Msc	15,50		PT. Citra Marga Nusaphala Persada	1990
3	Surabaya - Gresik	20,70		PT. Margabumi Matraraya	1993 - 1996
4	Harbour Road	11,55		PT. Citra Marga Nusaphala Persada	1995 - 1996
5	Ujung Pandang Tahap I	6,05		Bosawa Marga Nusantara	1998
6	Serpong - Pondok Aren	7,25		PT. Bintaro Serpong Damai	1999
7	SS Waru - Bandara Juanda	12,80		PT. Citra Margatama Surabaya	27 April 2008
8	Makasar Seksi IV	11,60		PT. Jalan Tol Seksi Empat	26 Sept 2008
9	Bogor Ring Road Seksi I	3,80		PT. Marga Sarana Jabar	23 Nov 2009
10	Kanci Pejagan	35,00		PT. Semesta Marga Raya	26 Jan 2010
11	Jorr W1	9,85		PT. Jakarta Lingkar Barat I	22 Feb 2010
	TOTAL	207,10			
	SUB TOTAL B	207,10			
	TOTAL A+B	741,92			

Sumber: Peluang Investasi Jalan Tol Di Indonesia 2011, BPJT, Kementerian PU

**Tabel 5.14 Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi (unit)
Tahun Anggaran 2011**

Status 26 Maret 2011

Provinsi	Jumlah Jembatan (unit)					Total
	0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m	
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	801	107	132	48	34	1.122
Sumatera Utara	822	88	100	24	16	1.050
Sumatera Barat	424	74	78	30	12	618
Riau	286	60	77	20	18	461
Kepulauan Riau	21	10	3	5	8	47
Jambi	244	33	47	5	12	341
Bengkulu	178	51	75	25	10	339
Sumatera Selatan	434	129	49	20	41	673
Bangka Belitung	120	9	6	2	3	140
Lampung	302	63	34	24	15	438
DKI Jakarta	11	1	16	0	1	29
Banten	308	11	24	6	7	356
Jawa Barat	792	90	121	20	27	1.050
Jawa Tengah	1.059	87	120	39	27	1.332
DI Yogyakarta	86	22	21	18	16	163
Jawa Timur	1.196	77	113	17	14	1.417
Kalimantan Barat	638	80	38	14	18	788
Kalimantan Tengah	791	66	42	6	9	914
Kalimantan Timur	273	45	24	7	11	360
Kalimantan Selatan	483	57	53	10	7	610
Bali	247	46	50	14	3	360
Nusa Tenggara Barat	293	21	24	7	3	348
Nusa Tenggara Timur	513	45	57	6	7	628
Sulawesi Utara	593	99	97	12	11	812
Gorontalo	225	48	27	8	4	312
Sulawesi Tengah	2.295	287	226	66	47	2.921
Sulawesi Barat	226	35	39	11	8	319
Sulawesi Selatan	603	51	66	23	12	755
Sulawesi Tenggara	598	74	47	9	12	740
Maluku	335	45	53	21	15	469
Maluku Utara	271	31	32	5	2	341
Papua	287	57	38	13	7	402
Papua Barat	142	42	20	9	10	223
Indonesia	15.897	2.041	1.949	544	447	20.878

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 5.15 Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi (%)
Tahun Anggaran 2011

Status 26 Maret 2011

Provinsi	Jumlah Jembatan (%)				
	0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	71,39	9,54	11,76	4,28	3,03
Sumatera Utara	78,29	8,38	9,52	2,29	1,52
Sumatera Barat	68,61	11,97	12,62	4,85	1,94
Riau	62,04	13,02	16,70	4,34	3,90
Kepulauan Riau	44,68	21,28	6,38	10,64	17,02
Jambi	71,55	9,68	13,78	1,47	3,52
Bengkulu	52,51	15,04	22,12	7,37	2,95
Sumatera Selatan	64,49	19,17	7,28	2,97	6,09
Bangka Belitung	85,71	6,43	4,29	1,43	2,14
Lampung	68,95	14,38	7,76	5,48	3,42
DKI Jakarta	37,93	3,45	55,17	0,00	3,45
Banten	86,52	3,09	6,74	1,69	1,97
Jawa Barat	75,43	8,57	11,52	1,90	2,57
Jawa Tengah	79,50	6,53	9,01	2,93	2,03
DI Yogyakarta	52,76	13,50	12,88	11,04	9,82
Jawa Timur	84,40	5,43	7,97	1,20	0,99
Kalimantan Barat	80,96	10,15	4,82	1,78	2,28
Kalimantan Tengah	86,54	7,22	4,60	0,66	0,98
Kalimantan Timur	75,83	12,50	6,67	1,94	3,06
Kalimantan Selatan	79,18	9,34	8,69	1,64	1,15
Bali	68,61	12,78	13,89	3,89	0,83
Nusa Tenggara Barat	84,20	6,03	6,90	2,01	0,86
Nusa Tenggara Timur	81,69	7,17	9,08	0,96	1,11
Sulawesi Utara	73,03	12,19	11,95	1,48	1,35
Gorontalo	72,12	15,38	8,65	2,56	1,28
Sulawesi Tengah	78,57	9,83	7,74	2,26	1,61
Sulawesi Barat	70,85	10,97	12,23	3,45	2,51
Sulawesi Selatan	79,87	6,75	8,74	3,05	1,59
Sulawesi Tenggara	80,81	10,00	6,35	1,22	1,62
Maluku	71,43	9,59	11,30	4,48	3,20
Maluku Utara	79,47	9,09	9,38	1,47	0,59
Papua	71,39	14,18	9,45	3,23	1,74
Papua Barat	63,68	18,83	8,97	4,04	4,48
Indonesia	76,14	9,78	9,34	2,61	2,14

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

**Tabel 5.16 Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi (m)
Tahun Anggaran 2011**

Status 26 Maret 2011

Provinsi	Panjang Jembatan (m)					Total
	0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m	
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	6.987,70	2.629,70	5.391,10	3.739,50	4.982,10	23.730,10
Sumatera Utara	6.666,60	2.163,90	4.400,60	1.960,50	2.336,00	17.527,60
Sumatera Barat	3.607,40	1.869,40	3.374,60	2.473,70	1.562,10	12.887,20
Riau	2.671,00	1.520,50	3.433,00	1.477,40	3.671,50	12.773,40
Kepulauan Riau	286,60	247,80	150,90	360,70	2.543,70	3.589,70
Jambi	1.924,70	825,70	2.055,10	376,80	2.647,20	7.829,50
Bengkulu	1.440,60	1.233,00	3.092,20	1.995,10	1.334,60	9.095,50
Sumatera Selatan	4.469,80	3.102,80	2.035,00	1.577,30	8.044,30	19.229,20
Bangka Belitung	977,70	228,80	247,70	152,00	497,90	2.104,10
Lampung	3.012,40	1.499,40	1.424,80	1.767,10	1.796,90	9.500,60
DKI Jakarta	114,90	24,00	659,00	0,00	230,00	1.027,90
Banten	1.856,90	270,80	1.082,20	514,00	808,70	4.532,60
Jawa Barat	5.920,90	2.224,10	5.161,90	1.470,40	4.571,90	19.349,20
Jawa Tengah	6.657,10	2.206,40	5.040,00	2.818,60	4.382,30	21.104,40
DI Yogyakarta	717,90	543,70	771,10	1.287,30	3.969,40	7.289,40
Jawa Timur	7.624,70	1.922,60	4.633,50	1.329,40	2.533,40	18.043,60
Kalimantan Barat	6.055,20	2.048,20	1.794,20	1.159,00	3.431,70	14.488,30
Kalimantan Tengah	4.910,00	1.595,70	1.705,00	421,50	3.562,00	12.194,20
Kalimantan Timur	1.510,50	1.049,90	931,80	567,10	2.869,40	6.928,70
Kalimantan Selatan	4.352,40	1.418,30	2.182,10	798,80	4.812,20	13.563,80
Bali	1.863,20	1.186,70	2.106,00	967,90	426,40	6.550,20
Nusa Tenggara Barat	2.644,90	497,70	959,30	536,20	584,90	5.223,00
Nusa Tenggara Timur	4.204,10	1.051,40	2.392,50	514,00	971,80	9.133,80
Sulawesi Utara	5.433,80	2.429,40	4.036,30	1.047,40	1.358,90	14.305,80
Gorontalo	1.959,30	1.136,20	1.088,00	560,80	502,00	5.246,30
Sulawesi Tengah	16.140,20	6.739,40	9.151,60	4.953,20	6.391,00	43.375,40
Sulawesi Barat	1.804,50	824,10	1.641,40	743,30	1.267,00	6.280,30
Sulawesi Selatan	4.279,50	1.244,10	2.647,00	1.684,00	1.463,20	11.317,80
Sulawesi Tenggara	5.692,00	1.805,90	2.061,70	751,00	1.419,30	11.729,90
Maluku	3.108,50	1.212,50	2.249,50	1.767,40	2.497,60	10.835,50
Maluku Utara	2.346,80	754,90	1.253,50	375,10	300,10	5.030,40
Papua	3.175,60	1.427,00	1.637,40	928,80	1.530,00	8.698,80
Papua Barat	1.646,20	987,80	899,00	638,60	1.614,30	5.785,90
Indonesia	126.063,60	49.921,80	81.689,00	41.713,90	80.913,80	380.302,10

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

**Tabel 5.17 Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi (%)
Tahun Anggaran 2011**

Status 26 Maret 2011

Provinsi	Panjang Jembatan (%)				
	0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	29,45	11,08	22,72	15,76	20,99
Sumatera Utara	38,03	12,35	25,11	11,19	13,33
Sumatera Barat	27,99	14,51	26,19	19,2	12,12
Riau	20,91	11,9	26,88	11,57	28,74
Kepulauan Riau	7,98	6,9	4,2	10,05	70,86
Jambi	24,58	10,55	26,25	4,81	33,81
Bengkulu	15,84	13,56	34	21,94	14,67
Sumatera Selatan	23,24	16,14	10,58	8,2	41,83
Bangka Belitung	46,47	10,87	11,77	7,22	23,66
Lampung	31,71	15,78	15	18,6	18,91
DKI Jakarta	11,18	2,33	64,11	0	22,38
Banten	40,97	5,97	23,88	11,34	17,84
Jawa Barat	30,6	11,49	26,68	7,6	23,63
Jawa Tengah	31,54	10,45	23,88	13,36	20,76
DI Yogyakarta	9,85	7,46	10,58	17,66	54,45
Jawa Timur	42,26	10,66	25,68	7,37	14,04
Kalimantan Barat	41,79	14,14	12,38	8	23,69
Kalimantan Tengah	40,27	13,09	13,98	3,46	29,21
Kalimantan Timur	21,8	15,15	13,45	8,18	41,41
Kalimantan Selatan	32,09	10,46	16,09	5,89	35,48
Bali	28,44	18,12	32,15	14,78	6,51
Nusa Tenggara Barat	50,64	9,53	18,37	10,27	11,2
Nusa Tenggara Timur	46,03	11,51	26,19	5,63	10,64
Sulawesi Utara	37,98	16,98	28,21	7,32	9,5
Gorontalo	37,35	21,66	20,74	10,69	9,57
Sulawesi Tengah	37,21	15,54	21,1	11,42	14,73
Sulawesi Barat	28,73	13,12	26,14	11,84	20,17
Sulawesi Selatan	37,81	10,99	23,39	14,88	12,93
Sulawesi Tenggara	48,53	15,4	17,58	6,4	12,1
Maluku	28,69	11,19	20,76	16,31	23,05
Maluku Utara	46,65	15,01	24,92	7,46	5,97
Papua	36,51	16,4	18,82	10,68	17,59
Papua Barat	28,45	17,07	15,54	11,04	27,9
Indonesia	33,15	13,13	21,48	10,97	21,28

Sumber: Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

**Tabel 5.18 PDRB dan Jalan Dalam Kondisi Mantap Menurut Provinsi
Tahun 2010**

Provinsi	PDRB ADHK (juta rupiah)	Jalan Kondisi Mantap Berdasarkan Survei IRI Akhir Desember 2010	
		Panjang (km)	Persentase (%)
1	2	3	4
Nanggroe Aceh Darussalam	33.071.136,66	1.667,56	92,47
Sumatera Utara	118.640.902,74	1.704,63	75,77
Sumatera Barat	38.860.187,68	1.128,11	93,01
Riau	97.701.683,19	1.011,86	89,19
Jambi	17.465.253,43	830,36	88,67
Sumatera Selatan	63.735.999,00	1.208,04	83,65
Bengkulu	8.330.345,23	736,38	93,94
Lampung	38.305.277,00	1.057,16	91,17
Bangka Belitung	10.866.810,93	467,95	91,83
Kepulauan Riau	41.083.258,84	282,81	84,67
DKI Jakarta	395.664.497,61	125,17	87,75
Jawa Barat	321.875.841,47	1.247,85	92,36
Jawa Tengah	186.995.480,65	1.064,98	76,59
DI Yogyakarta	21.042.267,31	165,42	74,13
Jawa Timur	342.280.765,51	1.962,82	96,90
Banten	88.393.769,65	345,37	72,48
Bali	28.880.686,20	497,35	92,92
Kalimantan Barat	30.292.393,42	1.268,49	76,21
Kalimantan Tengah	18.788.977,84	1.114,03	64,96
Kalimantan Selatan	30.674.123,86	839,72	96,72
Kalimantan Timur	110.579.888,26	1.782,09	84,13
Sulawesi Utara	18.371.201,12	948,70	71,91
Sulawesi Tengah	17.437.129,13	1.922,97	88,13
Sulawesi Selatan	51.197.034,67	1.595,99	92,64
Sulawesi Tenggara	12.226.376,73	858,30	61,54
Gorontalo	2.917.412,57	567,26	93,50
Sulawesi Barat	4.744.309,49	541,93	94,75
Nusa Tenggara Barat	20.056.796,12	522,44	83,03
Nusa Tenggara Timur	12.531.629,66	1.276,24	90,73
Maluku	4.251.356,30	733,55	68,77
Maluku Utara	3.035.124,59	441,26	86,22
Papua Barat	8.685.647,99	566,63	58,83
Papua	22.620.295,88	1.243,01	58,88

Sumber: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=52¬ab=2;

Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS RI; dan

Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Catatan: ADHK: Atas Dasar Harga Konstan

BAB VI

INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

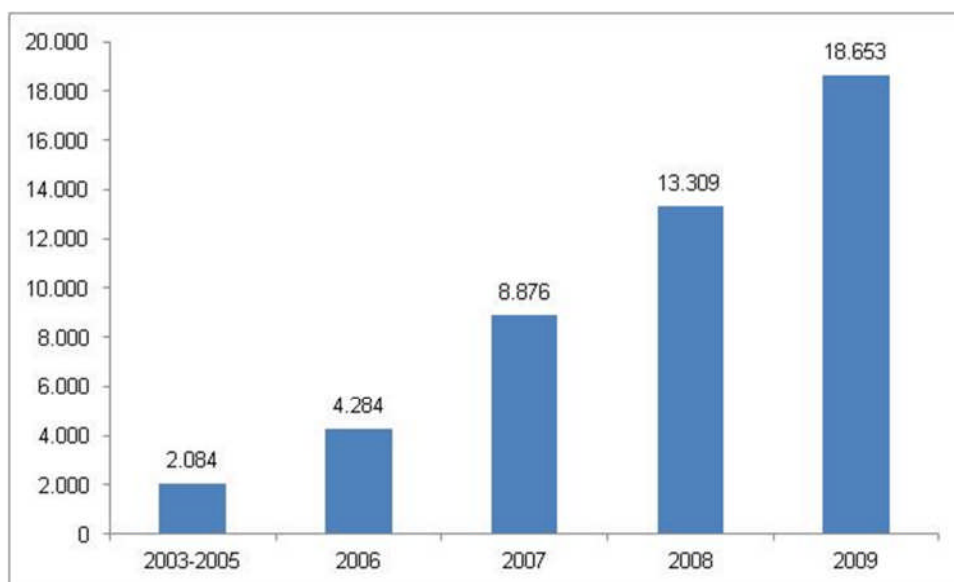
6.1 Pengembangan Permukiman

Permukiman merupakan kawasan baik di perkotaan maupun perdesaan yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat tinggal. Kelayakan suatu permukiman tidak hanya ditentukan oleh lokasi/ wilayahnya, namun juga kelengkapan infrastruktur pendukung. Seperti yang menjadi visi Ditjen Cipta Karya, yaitu terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan. Layak didefinisikan sebagai permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.

Salah satu upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dilaksanakan dengan pembangunan rumah vertikal atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) beserta infrastruktur pendukungnya. Rusunawa menjadi upaya untuk memberikan hunian dan fasilitas yang layak bagi MBR dan dapat menjadi solusi atas keterbatasan lahan yang tersedia, tingginya harga lahan, serta upaya peremajaan kota.

Rusunawa telah dirintis oleh Kementerian PU sejak tahun 2003. Ketika itu hanya tujuh provinsi yang menjadi lokasi pembangunan Rusunawa, yaitu Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tak kurang dari 1.240 unit hunian dibangun pada waktu itu, dan mendapat tanggapan positif baik dari pemda maupun masyarakat setempat. Selama kurun 2005 hingga 2009, pembangunan rusunawa mengalami peningkatan dari jumlah unit, tipe hunian, maupun cakupan wilayahnya. Di tahun 2009, sebanyak 5.344 unit telah dibangun di 24 provinsi. Sedangkan di tahun 2010 rusunawa terbangun sebanyak 3.840 unit. Informasi ini dapat dilihat pada Tabel 6.3 dan Tabel 6.4.

**Gambar 6.1 Pencapaian Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (unit)
Tahun 2005-2009**



Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum
Catatan: Data pada grafik merupakan kumulatif

Kemudian, dalam rangka pengembangan permukiman di perkotaan, Ditjen Cipta Karya memiliki kegiatan berupa penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini pada tahun 2010 dilaksanakan di 95 kawasan di perkotaan atau setara dengan 190 ha.

Selain itu, di tahun 2010 Cipta Karya juga telah menyediakan infrastruktur permukiman di kawasan perumahan bagi MBR di 107 kawasan. Sedangkan pada kawasan rawan bencana telah terbangun di 4 kawasan.

Pada pengembangan permukiman perdesaan, upaya untuk menekan laju urbanisasi dan memberikan keadilan pemerataan pembangunan dilakukan dengan mengembangkan potensi daerah seperti dalam program Agropolitan, PISEW, Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal/ PPIP, dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.

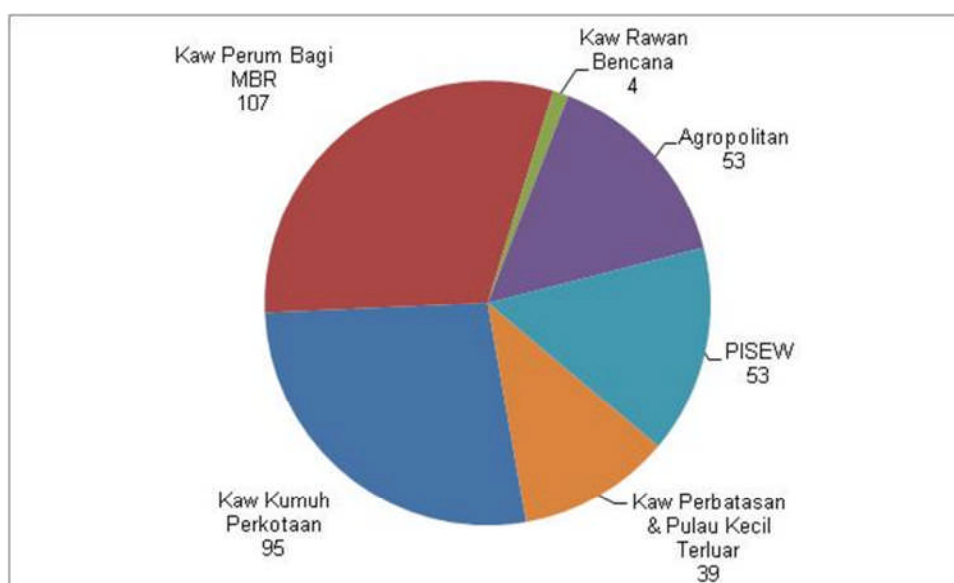
Pengembangan kawasan Agropolitan dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan jalan desa, pembangunan saluran drainase, pembangunan jembatan, saluran irigasi, pasar,

gudang, sub terminal agropolitan, dan penyusunan bantuan teknis. Pengembangan kawasan Agropolitan bertujuan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing, serta sarana dan prasarana umum dan sosial yang mendukung kelancaran usaha ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan usaha masyarakat di kawasan agropolitan. Selama tahun 2010, agropolitan telah dibangun di 53 kawasan atau sekitar 158 ha. Sedangkan PISEW dibangun di 53 kawasan.

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan pada skala lingkungan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan seperti jalan poros desa, saluran irigasi, talud, jembatan desa, dll. PPIP pada tahun 2010 dilaksanakan di 3.900 desa.

Selain PPIP ada pula Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar yang berhasil dibangun di 39 kawasan, atau setara dengan 191 ha.

**Gambar 6.2 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Pengembangan Permukiman (kawasan)
Tahun 2010**



Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU
Catatan: Grafik hanya mewakili yang berskala kawasan, rusunawa dengan satuan unit dan PPIP yang berskala desa tidak disertakan

6.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Indonesia berkisar 14% di tahun 2009 dan 13% di tahun 2010. Meskipun angka ini mengalami penurunan, pemerintah perlu tetap melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Kumuh dan Nelayan dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) yang kemudian disebut PNPM Perkotaan. P2KP dan PNPM-Mandiri merupakan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat dan sektor lokal lainnya. Pemberdayaan dilaksanakan melalui proses pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat akan tumbuh kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai universal.

P2KP berupaya menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah yang digerakkan melalui pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai penggerak masyarakat dengan menyusun Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang berkelanjutan, serta bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

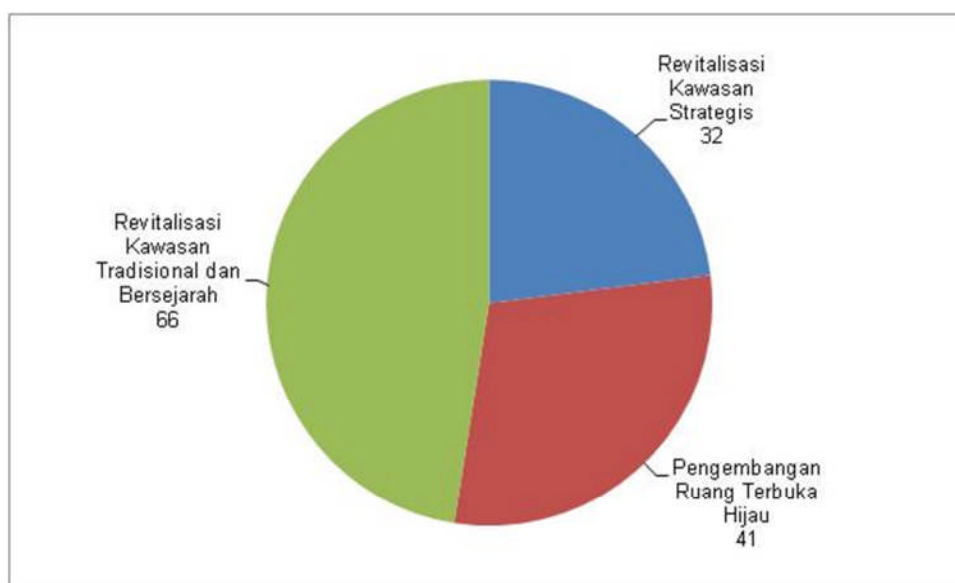
Selama tahun 2005-2009, P2KP-PNPM mampu mengakomodir sebanyak 12.443 kelurahan/desa di wilayah Indonesia. Kemudian di tahun 2010 program ini dilaksanakan di 10.948 kelurahan/desa. Informasi mengenai program P2KP-PNM dapat dilihat pada Tabel 6.5 dan 6.6.

Selain P2KP-PNPM, PBL juga melaksanakan revitalisasi kawasan strategis yang sudah dilakukan di 32 kawasan atau setara dengan 1.554 hektar, dan revitalisasi kawasan tradisional bersejarah sebanyak 66 kawasan atau 180 hektar. Sementara wujud dari dukungan penghijauan kota adalah dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama 2010 telah dilakukan di 41 kawasan atau 71 hektar.

Kemudian untuk semakin memudahkan peran pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B). Selama tahun 2010, Ditjen Cipta Karya telah membangun dan meningkatkan PIP2B di 32 provinsi.

Untuk dapat berperan dalam mendukung dan meningkatkan kemanfaatan dari implementasi program PBL, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengelola infrastruktur yang telah dibangun harus selalu ditingkatkan. Karena itu diperlukan penguatan terhadap lembaga komunitas dan kepedulian dari pemda dalam memberikan fasilitas yang berkelanjutan.

**Gambar 6.3 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (kawasan)
Tahun 2010**



Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU

Catatan: Grafik hanya mewakili yang berskala kawasan, PIP2B yang skala provinsi dan PNPM-P2KP yang berskala kelurahan/ desa tidak disertakan

6.3 Pengembangan Air Minum

Air bersih menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Namun sumber kehidupan ini justru tidak tersedia dengan layak dan memadai di kawasan permukiman kumuh perkotaan, perdesaan tertinggal/ terpencil, serta kawasan perbatasan. Dalam peringatan hari Air Dunia

XIX Tahun 2011, Menteri PU mengatakan saat ini hanya 50% masyarakat di Indonesia yang terpenuhi kebutuhannya akan air bersih. Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 angka tersebut akan meningkat hingga mencapai 68%.

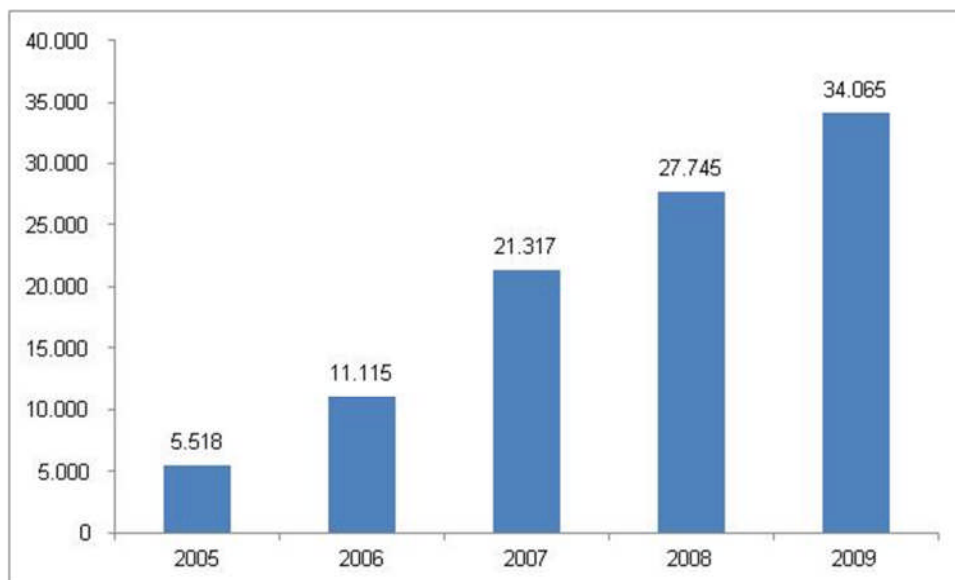
Keterbatasan akan air bersih sering kali berdampak munculnya masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fokus dari program Ditjen Cipta Karya adalah pengadaan prasarana dan sarana air bersih guna meningkatkan cakupan masyarakat akan kebutuhan air bersih.

Prasarana dan sarana air bersih yang dibangun meliputi mata air, sumur dalam/ bor, hidran umum, dan pipa distribusi. Infrastruktur air bersih akan dibangun di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan nelayan serta kawasan perdesaan rawan air, terpencil, dan pulau kecil terluar.

Selama periode 2005 hingga 2009, pengadaan air minum yang dilakukan Ditjen CK mencapai 34.064 ltr/dtk dan dari jumlah penerima manfaat berkisar 15,67 juta jiwa. Pendistribusian manfaat air bersih mengalami kemajuan di tahun 2009 yang terlihat dari jumlah penerima manfaat mencapai angka tertinggi, yaitu 4,32 juta jiwa.

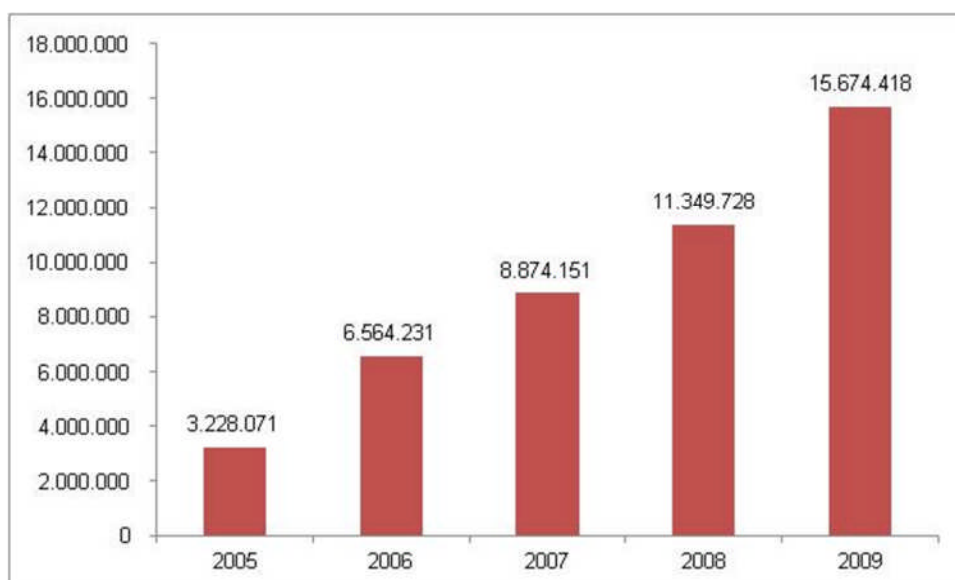
Kegiatan pengadaan prasarana dan sarana air minum selama periode 2005-2009 terdiri dari kegiatan air minum perkotaan dan perdesaan. Kegiatan air minum perkotaan memiliki sembilan kelompok kegiatan di antaranya adalah IKK, MBR Perkotaan (RSH & Kumuh, Nelayan), Penyehatan PDAM, Ibukota Kabupaten Pemekaran, Perbatasan, dan beberapa kegiatan lain. Sementara kegiatan air minum perdesaan terdiri dari Pamsimas/ Desa Rawan Air, Terpencil, dan DAK/ APBD. Informasi mengenai pencapaian pengadaan prasarana dan sarana air minum tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 6.7 dan 6.8, serta Gambar 6.4 dan 6.5.

**Gambar 6.4 Pencapaian Prasarana dan Sarana Air Minum
Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota (ltr/dtk)
Tahun 2005-2009**



Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum
Catatan: Data pada grafik merupakan kumulatif

**Gambar 6.5 Pencapaian Prasarana dan Sarana Air Minum
Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota (jiwa terlayani)
Tahun 2005-2009**



Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum
Catatan: Data pada grafik merupakan kumulatif

Berlanjut pada program pengembangan air minum yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya di tahun 2010. Pada tahun ini ada yang baru dari tahun sebelumnya, yaitu edukasi/ kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku. Program ini sudah dilaksanakan di 32 provinsi. Kemudian bantuan teknis dan manajemen pengelolaan air minum (PDAM) tetap dilaksanakan dan telah dilakukan di 35 kab/ kota, dan pada non PDAM dilakukan di 30 kab/ kota.

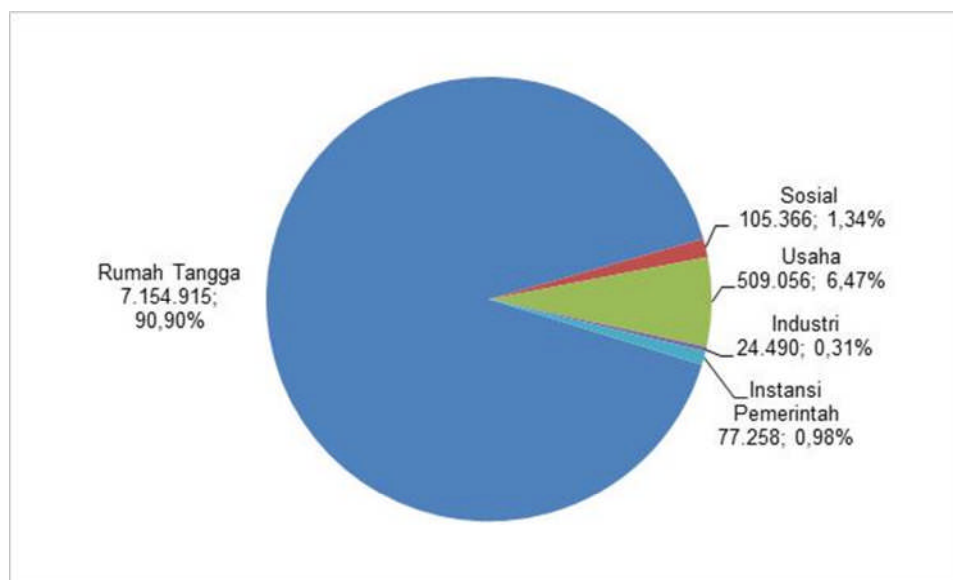
Fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana air minum MBR Perkotaan dilakukan di 74 kawasan dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana air minum perkotaan/ IKK di 144 IKK dan menghasilkan kapasitas air 1.440 liter per detik. Di perdesaan, Ditjen Cipta Karya telah memenuhi 1.472 desa untuk dikembangkan prasarana dan sarana air minumnya.

Dalam meningkatkan air minum dilakukan dua kegiatan, yaitu peningkatan pelayanan air minum kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET di 18 kawasan (173 liter per detik) dan pelayanan air minum untuk mendukung pelabuhan perikanan di 13 kawasan (76 liter per detik). Capaian pengembangan air minum di tahun 2010 terdapat pada Tabel 6.9.

Data tahun 2009 mencatat terdapat 280 PDAM kota dan 1.134 PDAM IKK di Indonesia. Dari jumlah tersebut, memiliki kapasitas yang terpasang sebesar 127.931 liter per detik dan kapasitas produksi 103.017 liter per detik. Jumlah SR yang terpasang sebanyak 6.968.434 unit.

Sementara data dari Direktori Perpamsi 2010, menunjukkan jumlah pelanggan PDAM di seluruh provinsi di Indonesia tercatat 8.046.520 dan jumlah instalasi pengolahan sebanyak 1.942 unit. Pelanggan PDAM yang berasal dari rumah tangga sebanyak 7.154.915 sambungan atau 90,90%, lalu kemudian badan sosial sebanyak 105.366 sambungan atau 1,34%. Pelanggan yang berasal dari badan usaha sebanyak 509.056 sambungan atau 6,47%, industri 24.490 sambungan atau 0,31%, dan instansi pemerintah 77.258 sambungan atau 0,98%.

Gambar 6.6 Jumlah dan Persentase Pelanggan Air Minum Tahun 2010



Sumber: Direktori Perpamsi 2010

Air bersih merupakan salah satu infrastruktur dasar dalam suatu lingkungan permukiman. Upaya pengadaannya disertai dengan infrastruktur dasar lain dapat mengubah suatu kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi layak huni. Masyarakat juga harus terlibat dalam pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian sumber air baku yang dilaksanakan secara terpadu agar keberadaan sumber air bersih yang diperlukan dalam kehidupan manusia tetap terjaga.

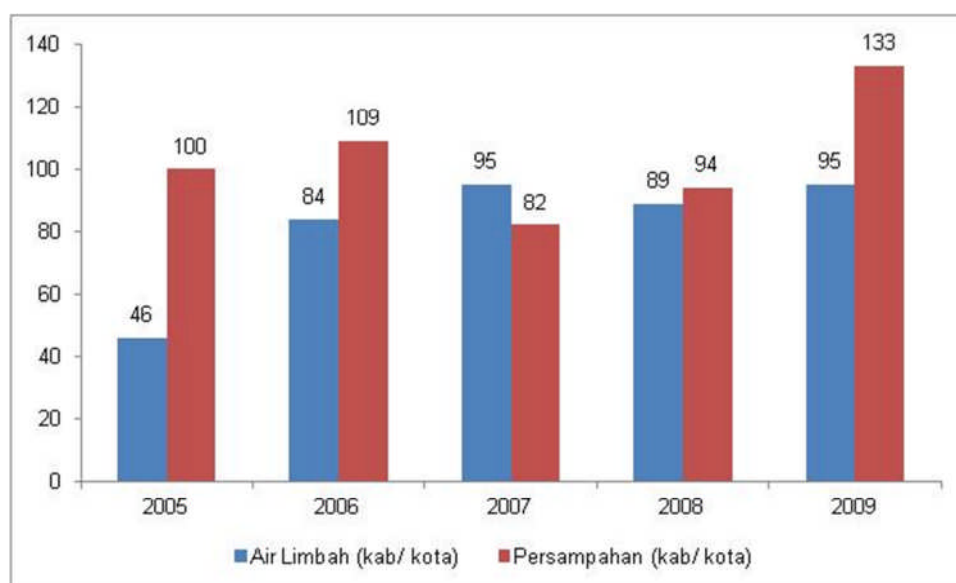
6.4 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Selain prasarana dan sarana air bersih, sistem drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan, serta sanitasi juga menjadi infrastruktur prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan dalam suatu lingkungan permukiman agar menjadi layak huni. Program prasarana dan sarana pengelolaan air limbah bersama dengan pengelolaan persampahan dan sistem drainase diharapkan mampu membantu masyarakat mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam periode 2005-2009, program prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan di 195 kab/ kota. Pencapaian tersebut dapat melayani sebanyak 1.716.361 jiwa. Sementara dalam program prasarana dan sarana pengelolaan persampahan telah terealisasi di 284 kab/ kota dengan jumlah penerima manfaat terus bertambah dalam kurun 5 tahun, hingga pada tahun 2009 saja penerima manfaat mencapai 7.543.756 jiwa. Secara keseluruhan, penduduk yang dapat terlayani oleh sarana pengelolaan sampah ini sebanyak 19.021.933 jiwa. Pencapaian prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dan persampahan dalam jumlah kab/ kota tidak merupakan jumlah pencapaian kab/ kota tiap tahunnya, dikarenakan ada kabupaten atau kota yang melaksanakan program lebih dari 1 kali di tahun yang berbeda.

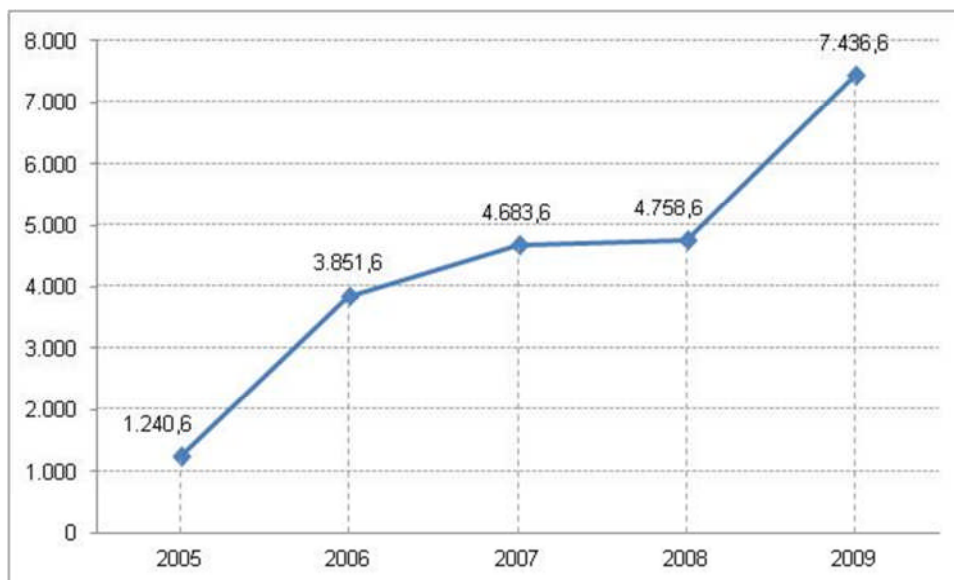
Untuk drainase, prasarana dan sarana yang dibangun meliputi saluran terbuka, *plat duicker*, gorong-gorong bulat/ kotak, dan bangunan pelengkap drainase. Pencapaian yang dicatat selama 2005 hingga 2009 mencakup wilayah seluas 7.436,63 hektar di 329 kawasan. Luasan cakupan program prasarana dan sarana drainase menurun cukup signifikan hingga 75 hektar di tahun 2008 dan paling tinggi terjadi di tahun 2009, yaitu 2.678 hektar. Data mengenai pencapaian prasarana dan sarana pengelolalan air limbah, persampahan dan drainase Tahun 2005-2009 terangkum dalam Tabel 6.12-6.14 serta Gambar 6.7 dan 6.8.

Gambar 6.7 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan (kab/ kota)
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009



Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Gambar 6.8 Prasarana dan Sarana Drainase (ha)
Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009**

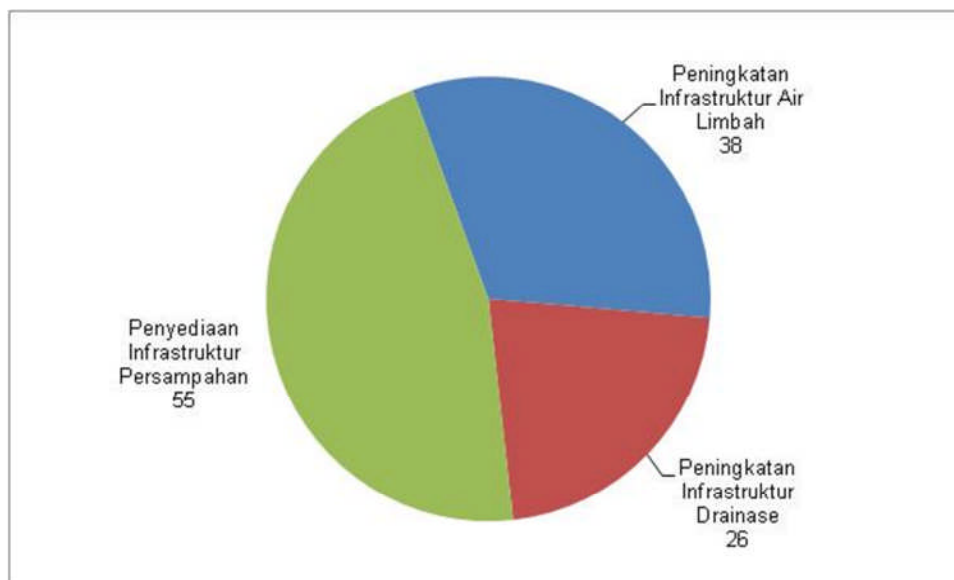


Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum
Catatan: Data pada grafik merupakan kumulatif

Program prasarana dan sarana pengelolaan air limbah bersama dengan pengelolaan persampahan dan drainase tetap dilaksanakan pada tahun 2010, karena pembangunan bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman baru bisa terasa manfaatnya dengan dibangunnya prasarana dan sarana ini. Pelaksanaan pengembangan sanitasi lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah sistem *off-site* di 11 kawasan, dan sistem *on-site* di 27 kawasan. Selain itu, dilaksanakan juga peningkatan pelayanan infrastruktur drainase di 26 kawasan yang mencakup 2.392 hektar.

Penyehatan Lingkungan Permukiman di tahun 2010 juga melaksanakan kegiatan pengembangan persampahan melalui penyediaan infrastruktur persampahan di 55 kawasan dan fasilitasi pengurangan sampah melalui 3R (*reuse, reduce, recycle*) di 49 lokasi. Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.15 dan Gambar 6.9.

**Gambar 6.9 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (kawasan)
Tahun 2010**



Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU
 Catatan: 1. Peningkatan Infrastruktur Air Limbah terdiri dari sistem *off-site* dan *on-site*.
 2. Tidak termasuk program 3R yang berskala lokasi.

6.5 Analisis Statistik Bidang Cipta Karya

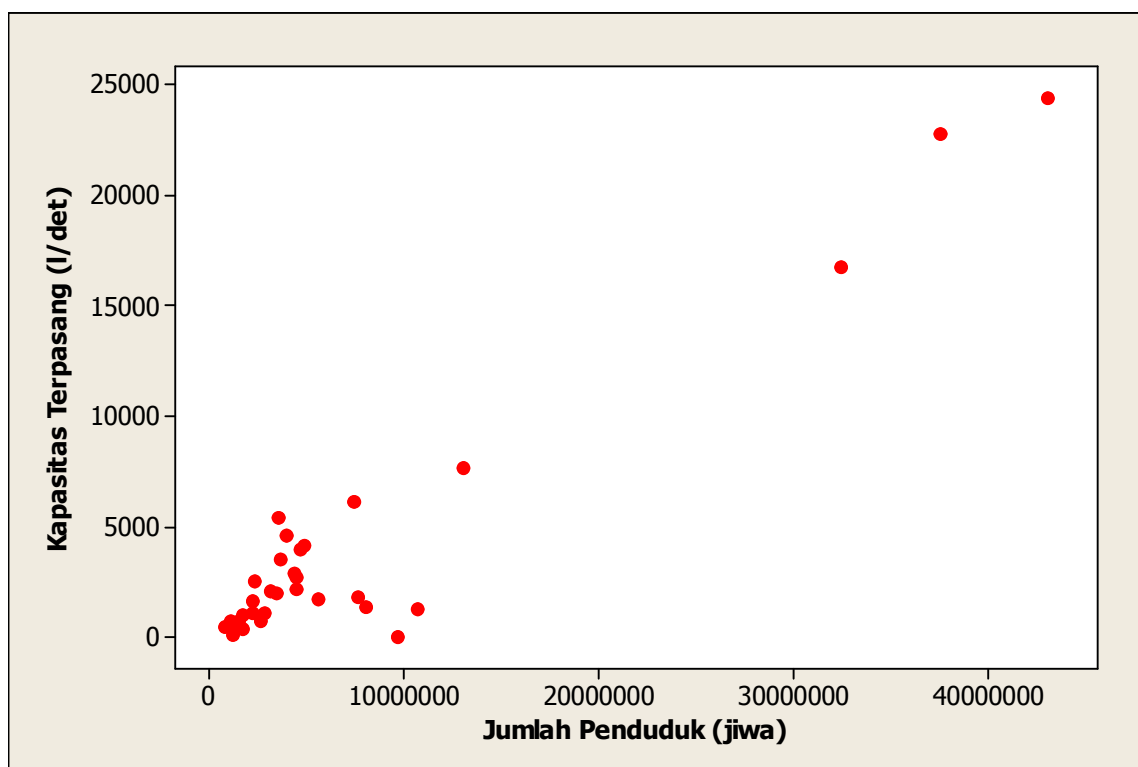
Dalam rangka menciptakan permukiman yang layak huni, Ditjen Cipta Karya berusaha untuk menyediakan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Data eksisting mengenai penyediaan air minum melalui PDAM tahun 2009 menginformasikan tentang Kapasitas Terpasang, Kapasitas Produksi, Jumlah Saluran Rumah Tangga serta presentase kehilangan air.

Sebuah analisa dilakukan untuk melihat ada tidaknya keterkaitan antara kapasitas terpasang dengan jumlah penduduk di setiap provinsi dan antara kapasitas produksi dengan jumlah sambungan rumah tangga (SR). Analisa ini bertujuan untuk melihat efektifitas dari pembangunan sarana PDAM disetiap provinsi. Meskipun parameter efektifitas dapat berarti luas, namun dalam analisa ini sesuai dengan ketersediaan datanya hanya berusaha untuk melihat efektifitas terhadap sasarannya yaitu penduduk. Diasumsikan pembangunan sarana PDAM dengan kapasitas yang besar akan efektif jika dilakukan di daerah yang jumlah

penduduknya juga besar, dan kapasitas produksi yang besar juga di provinsi dengan SR yang besar. Data yang digunakan dalam analisis ini terdapat pada Tabel 6.16. Dengan ketiadaan data di provinsi DKI Jakarta, maka dalam melakukan analisa tidak menyertakan provinsi DKI Jakarta.

Dari plot antara Kapasitas Terpasang dengan Jumlah Penduduk pada Gambar 6.10, mengindikasikan adanya suatu pola yang searah, yaitu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, kapasitas terpasangnya pun besar. Hal ini dikuatkan dengan nilai korelasi antara Jumlah Penduduk serta Kapasitas Terpasang juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 0,953 dengan nilai signifikansi 0.000. Maka dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang besar juga memiliki kapasitas terpasang pada PDAMnya yang relatif besar. Artinya pembangunan PDAM dengan kapasitasnya berbanding searah dengan jumlah penduduk di suatu provinsi.

Gambar 6.10 Plot Kapasitas Terpasang PDAM (l/det) dan Jumlah Penduduk (jiwa)

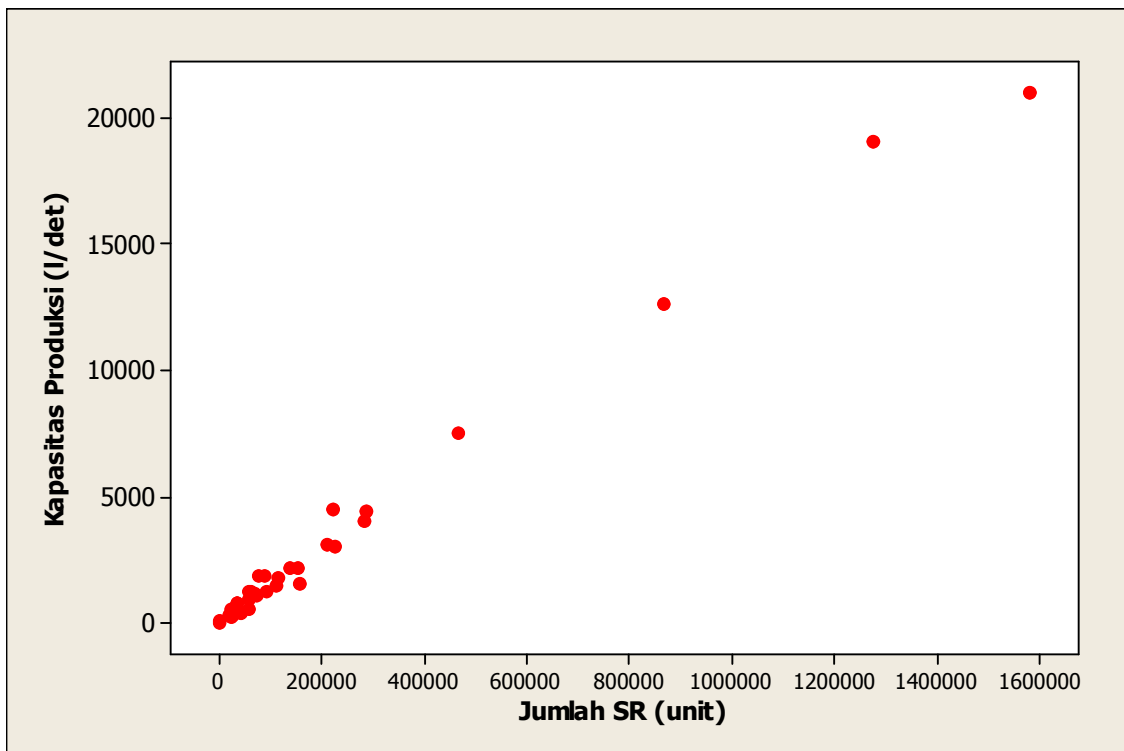


Tabel 6.1 Korelasi Antara Kapasitas Terpasang PDAM Dengan Jumlah Penduduk

		Jumlah Penduduk (jiwa)	Kapasitas Terpasang (l/det)
Jumlah Penduduk (jiwa)	Pearson Correlation	1	0.953
	Sig. (2-tailed)		0.000
	N	33	33
Kapasitas Terpasang (l/det)	Pearson Correlation	0.953	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	33	33

Sementara dari plot antara Kapasitas Produksi dengan Jumlah SR di Gambar 6.11 juga mengindikasikan adanya suatu pola yang searah, yaitu provinsi dengan Jumlah SR yang besar, kapasitas produksinya pun besar. Nilai korelasi antara Jumlah SR serta Kapasitas Produksi menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 0,995 dengan nilai signifikansi 0.000. Maka dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan jumlah SR yang besar juga memiliki kapasitas produksi pada PDAMnya yang relatif besar.

Gambar 6.11 Plot Kapasitas Produksi PDAM (l/det) dan Jumlah SR (unit)



Tabel 6.2 Korelasi Antara Kapasitas Produksi PDAM Dengan Jumlah SR

		Jumlah SR (unit)	Kapasitas Produksi (l/det)
Jumlah SR (unit)	Pearson Correlation	1	0.995
	Sig. (2-tailed)		0.000
	N	33	33
Kapasitas Produksi (l/det)	Pearson Correlation	0.995	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	33	33

Dari rata-rata persentase kehilangan air selama tahun 2009 di seluruh PDAM di Indonesia, yaitu sebesar 32,66%, dengan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat diprediksi rata-rata persentase kehilangan air untuk setiap tahunnya berkisar antara 28,88% hingga 36,71%. Hal ini diasumsikan jika tidak terjadi sesuatu yang di luar kondisi normal. Penyaluran air PDAM ke masyarakat akan semakin baik jika persentase kehilangan air dapat diturunkan.

Air yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia berperan sangat penting dalam membentuk budaya hidup sehat. Oleh karena itu, keberadaan/ pasokan air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan air bersih. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dilaksanakan, selain masyarakat juga memiliki kewajiban dalam menjaga ketersediaan air baku dari lingkungan yang paling kecil untuk menjaga ketersediaan air di musim kemarau, serta mencegah terjadinya bencana di musim penghujan.

**Tabel 6.3 Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009**

Provinsi	Jumlah		Tahun Pencapaian			
	Kab/ Kota	Lokasi/ Kawasan	2003-2005		2006	
			Twin Block	Unit	Twin Block	Unit
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	1	1	0	0	0	0
Sumatera Utara	3	4	1	96	2	192
Sumatera Barat	1	1	0	0	0	0
Kepulauan Riau	1	3	2	160	0	0
Bengkulu	1	1	0	0	0	0
Sumatera Selatan	1	2	0	0	1	96
Bangka Belitung	1	1	0	0	0	0
Lampung	1	1	0	0	0	0
Banten	2	3	1,5	144	0	0
DKI Jakarta	2	6	3	300	2	200
Jawa Barat	7	11	6	544	5	464
Jawa Tengah	10	14	1	96	2	192
DI Yogyakarta	3	9	2	168	1	96
Jawa Timur	6	12	5	480	3	288
Kalimantan Barat	2	2	0	0	1	96
Kalimantan Tengah	1	1	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	1	1	0	0	0	0
Kalimantan Timur	4	4	0	0	1	96
Sulawesi Utara	2	3	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	1	1	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	2	7	1	96	3	288
Sulawesi Tenggara	3	3	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	1	1	0	0	0	0
Papua	1	2	0	0	2	192
Indonesia	58	94	22,5	2.084	23	2.200

Lanjutan Tabel 6.3

Provinsi	Tahun Pencapaian						Total	
	2007		2008		2009		Twin Block	Unit
	Twin Block	Unit	Twin Block	Unit	Twin Block	Unit		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0	2	198	2	198
Sumatera Utara	3	288	1	96	4	396	11	1.068
Sumatera Barat	1	96	0	0	0	0	1	96
Kepulauan Riau	0	0	4	396	2	198	8	754
Bengkulu	0	0	1	96	0	0	1	96
Sumatera Selatan	2	192	0	0	0	0	3	288
Bangka Belitung	0	0	0	0	2	198	2	198
Lampung	1	96	1	96	0	0	2	192
Banten	0	0	0	0	3	294	4,5	438
DKI Jakarta	0	0	10	960	5	499	20	1.959
Jawa Barat	7	656	2	176	5	495	25	2.335
Jawa Tengah	11	1.056	11	1.068	6	594	31	3.006
DI Yogyakarta	6	576	2	192	3	297	14	1.329
Jawa Timur	11	1.056	3	288	9	891	31	3.003
Kalimantan Barat	0	0	0	0	1	99	2	195
Kalimantan Tengah	0	0	1	96	0	0	1	96
Kalimantan Selatan	1	96	0	0	1	96	2	192
Kalimantan Timur	0	0	2	195	1	99	4	390
Sulawesi Utara	1	96	0	0	3	297	4	393
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	1	99	1	99
Sulawesi Selatan	3	288	5	480	3	297	15	1.449
Sulawesi Tenggara	0	0	3	294	2	198	5	492
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	1	99	1	99
Papua	1	96	0	0	0	0	3	288
Indonesia	48	4.592	46	4.433	54	5.344	193,5	18.653

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Tabel 6.4 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Pengembangan Permukiman
Tahun 2010**

Kelompok Kegiatan	Sasaran 2010		Realisasi	
	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5
Pengembangan Permukiman Perkotaan				
Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh Perkotaan	95	kawasan	95	kawasan
	190	ha		ha
Pembangunan Rusunawa dan Infrastruktur Pendukungnya	3.960	unit	3.840	unit
Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perumahan Bagi MBR	104	kawasan	107	kawasan
Penyediaan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Rawan Bencana (Sumatera Barat, dll)	3	kawasan	4	kawasan
Pengembangan Permukiman Perdesaan				
Agropolitan/ Perdesaan Potensial	55	kawasan	53	kawasan
	161	ha		ha
PISEW	50	kawasan	53	kawasan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal/ PPIP	1.500	desa	3.900	desa
Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar	39	kawasan	39	kawasan
	191	ha		ha

Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU

**Tabel 6.5 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM)
Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009**

Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kawasan	Pencapaian Jumlah Kelurahan					Total
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nanggroe Aceh Darussalam	15	14	0	400	400	329	403	564
Sumatera Utara	14	14	0	177	360	500	606	615
Sumatera Barat	14	14	0	107	214	318	372	418
Riau	7	7	0	35	35	59	124	145
Kepulauan Riau	4	4	0	15	15	53	113	113
Jambi	9	9	0	95	132	76	82	168
Bengkulu	6	6	0	172	251	126	122	262
Sumatera Selatan	9	7	0	182	276	286	313	314
Bangka Belitung	6	6	0	54	71	68	84	102
Lampung	5	5	0	118	152	144	152	190
Banten	6	6	0	0	250	337	426	437
DKI Jakarta	6	6	0	0	44	160	267	267
Jawa Barat	26	25	151	0	794	1.653	1.707	1.811
Jawa Tengah	35	35	462	0	1.363	1.883	2.004	2.028
DI Yogyakarta	5	5	0	0	106	166	178	206
Jawa Timur	36	32	302	0	898	869	1.893	1.893
Kalimantan Barat	8	7	203	0	115	65	88	168
Kalimantan Tengah	4	4	46	0	44	30	38	80
Kalimantan Selatan	10	10	83	0	108	214	243	246
Kalimantan Timur	13	13	0	84	115	95	169	206
Sulawesi Utara	10	9	0	0	118	242	296	301
Gorontalo	4	3	12	0	61	76	70	91
Sulawesi Tengah	4	4	9	0	49	58	65	74
Sulawesi Barat	2	2	0	0	23	16	18	24
Sulawesi Selatan	23	23	107	0	357	276	313	504
Sulawesi Tenggara	8	8	10	0	159	105	118	186
Bali	5	5	481	0	130	130	130	130
Nusa Tenggara Barat	7	7	169	0	217	149	188	256
Nusa Tenggara Timur	9	9	0	38	135	137	138	138
Maluku	5	4	0	51	78	61	85	114
Maluku Utara	6	6	0	159	161	69	146	297
Papua Barat	2	2	0	0	11	32	32	32
Papua	4	3	0	39	31	31	31	63
Indonesia	327	314	2.096	1.726	7.273	8.813	11.014	12.443

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Tabel 6.6 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Tahun 2010**

Kelompok Kegiatan 1	Sasaran 2010		Realisasi	
	Jumlah 2	Satuan 3	Jumlah 4	Satuan 5
Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan				
Revitalisasi Kawasan Strategis	32	kawasan	32	kawasan
	1.554	ha		ha
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	39	kawasan	41	kawasan
	70	ha		ha
Revitalisasi Kawasan Tradisional dan Bersejarah	65	kawasan	66	kawasan
	180	ha		ha
Pemb. Dan Peningkatan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)	22	provinsi	32	provinsi
Bantek, Bimtek serta Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat PNPM-P2KP	9.556	kel/ desa	10.948	kel/ desa

Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU

Tabel 6.7 Prasarana dan Sarana Air Minum Menurut Provinsi
Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009

Provinsi	Tahun Pencapaian					
	2005		2006		2007	
	Lt/dt	Jiwa	Lt/dt	Jiwa	Lt/dt	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	223	127.157	188	80.151	53	28.650
Sumatera Utara	83	32.215	165	74.581	1.208	193.110
Sumatera Barat	47	27.300	218	78.859	194	14.750
Riau	67	291.831	43	81.390	155	52.700
Kepulauan Riau	12	7.983	43	24.217	59	14.980
Jambi	102	48.229	60	55.291	57	16.000
Bengkulu	33	60.060	97	114.036	336	598.684
Sumatera Selatan	64	50.830	53	29.772	28	30.235
Bangka Belitung	69	18.368	70	38.793	373	18.499
Lampung	71	28.619	278	79.779	258	35.920
Banten	65	53.006	53	32.570	633	77.400
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat	12	4.600	133	57.587	548	130.800
Jawa Tengah	386	151.806	795	191.885	555	91.490
DI Yogyakarta	149	84.560	195	83.115	113	32.675
Jawa Timur	70	28.050	225	86.633	1.080	231.600
Kalimantan Barat	73	58.239	80	82.135	117	129.005
Kalimantan Tengah	60	54.617	50	20.000	464	43.920
Kalimantan Selatan	93	93.105	560	247.500	271	64.115
Kalimantan Timur	1.757	601.631	218	151.215	910	72.740
Sulawesi Utara	257	162.007	285	239.897	441	92.545
Gorontalo	25	35.317	136	112.500	65	1.955
Sulawesi Tengah	188	186.526	100	114.726	88	12.970
Sulawesi Selatan	265	130.711	130	34.444	380	31.365
Sulawesi Barat	77	43.223	51	25.000	191	48.720
Sulawesi Tenggara	125	46.045	325	204.864	367	25.930
Bali	27	19.590	50	34.500	104	41.140
Nusa Tenggara Barat	207	150.847	112	115.250	108	13.500
Nusa Tenggara Timur	108	35.663	230	97.086	444	16.625
Maluku	189	184.892	208	197.050	109	112.400
Maluku Utara	159	137.172	153	163.775	122	19.135
Papua	336	223.495	105	78.859	238	10.515
Papua Barat	126	50.377	194	308.700	135	5.847
Indonesia	5.518	3.228.071	5.597	3.336.160	10.202	2.309.920

Lanjutan Tabel 6.7

Provinsi	Tahun Pencapaian				Total	
	2008		2009		Lt/dt	Jiwa
	Lt/dt	Jiwa	Lt/dt	Jiwa		
1	8	9	10	11	12	13
Nanggroe Aceh Darussalam	184	36.732	108	73.730	754	346.420
Sumatera Utara	251	109.022	222	380.030	1.928	788.958
Sumatera Barat	165	40.542	286	217.927	910	379.378
Riau	116	33.370	301	129.675	681	588.966
Kepulauan Riau	82	16.462	79	22.860	274	86.502
Jambi	94	30.142	62	17.092	375	166.754
Bengkulu	175	37.072	166	62.277	808	872.129
Sumatera Selatan	221	80.392	275	148.457	641	339.686
Bangka Belitung	112	28.000	137	76.095	761	179.755
Lampung	104	32.202	58	39.227	769	215.747
Banten	189	350.622	232	187.840	1.171	701.438
DKI Jakarta	0	0	480	10.100	480	10.100
Jawa Barat	447	227.276	446	341.865	1.584	762.128
Jawa Tengah	918	214.322	474	380.164	3.127	1.029.667
DI Yogyakarta	87	21.932	54	26.160	598	248.442
Jawa Timur	615	267.203	252	341.661	2.242	955.147
Kalimantan Barat	179	53.162	121	44.890	570	367.431
Kalimantan Tengah	144	77.620	196	95.070	913	291.227
Kalimantan Selatan	122	45.812	312	186.860	1.358	637.392
Kalimantan Timur	446	130.830	184	252.830	3.514	1.209.246
Sulawesi Utara	127	30.512	160	167.485	1.269	692.446
Gorontalo	81	54.372	118	144.290	424	348.434
Sulawesi Tengah	82	41.342	50	40.670	507	396.234
Sulawesi Selatan	263	29.332	107	37.486	1.145	263.338
Sulawesi Barat	72	31.562	69	63.770	458	212.275
Sulawesi Tenggara	127	55.972	312	206.890	1.256	539.701
Bali	155	72.592	126	67.170	462	234.992
Nusa Tenggara Barat	216	125.322	136	82.792	779	487.711
Nusa Tenggara Timur	124	62.282	238	143.722	1.145	355.378
Maluku	144	62.777	107	81.865	755	638.984
Maluku Utara	116	16.422	169	84.070	719	420.574
Papua	179	27.642	133	84.250	991	424.761
Papua Barat	91	32.742	152	85.420	697	483.086
Indonesia	6.428	2.475.577	6.320	4.324.690	34.064	15.674.418

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Tabel 6.8 Prasarana dan Sarana Air Minum
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009**

Uraian	Tahun Pencapaian					
	2005		2006		2007	
	Lt/dt	Jiwa	Lt/dt	Jiwa	Lt/dt	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan Air Minum Perkotaan						
1.A. IKK	1.093	693.664	907	473.620	1.586	67.400
1.B. MBR Perkotaan (RSH & Kumuh, Nelayan)	1.120	704.262	537	392.848	266	26.025
1.C. Penyehatan PDAM	580	249.500	901	791.400	0	0
1.D. Ibukota Kabupaten Pemekaran	65	28.000	0	0	20	575
1.E. Perbatasan	0	0	0	0	0	0
1.F. Insentif Inpres 99	0	0	0	0	0	0
1.G. Stimulus Fiskal	0	0	0	0	0	0
1.H. Masyarakat Menengah Ke Atas (KPS/Turnkey/ Swasta)	400	260.000	500	180.000	345	50.000
1.I. APBD/PDAM	1.191	394.407	833	416.190	4.086	1.560.000
Kegiatan Air Minum Perdesaan						
2.A. Pansimas/Desa Rawan Air, Terpencil	405	469.918	366	239.382	616	75.950
2.B. DAK/APDB	665	428.320	1.553	842.720	3.283	529.970
Jumlah	5.518	3.228.071	5.597	3.336.160	10.202	2.309.920

Lanjutan Tabel 6.8

Uraian	Tahun Pencapaian				Total	
	2008		2009		Lt/dt	Jiwa
	Lt/dt	Jiwa	Lt/dt	Jiwa		
1	8	9	10	11	12	13
Kegiatan Air Minum Perkotaan						
1.A. IKK	3.181	116.710	1.678	70.000	8.445	1.421.394
1.B. MBR Perkotaan (RSH & Kumuh, Nelayan)	485	647.430	272	29.950	2.680	1.800.515
1.C. Penyehatan PDAM	0	250.000	43	4.375	1.524	1.295.275
1.D. Ibukota Kabupaten Pemekaran	255	179.700	290	21.890	630	230.165
1.E. Perbatasan	0	0	118	12.125	118	12.125
1.F. Insentif Inpres 99	0	466.361	0	466.361	0	932.723
1.G. Stimulus Fiskal	357	307.085	357	307.085	714	614.170
1.H. Masyarakat Menengah Ke Atas (KPS/ Turnkey/ Swasta)	500	25.000	0	0	1.745	515.000
1.I. APBD/PDAM	500	249.980	1.294	1.110.110	7.902	3.730.687
Kegiatan Air Minum Perdesaan						
2.A. Pansimas/Desa Rawan Air, Terpencil	150	48.000	1.570	1.339.854	3.107	2.173.104
2.B. DAK/APDB	1.000	185.310	700	962.940	7.201	2.949.260
Jumlah	6.428	2.475.577	6.320	4.324.690	34.064	15.674.418

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Tabel 6.9 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Pengembangan Air Minum
Tahun 2010**

Kelompok Kegiatan 1	Sasaran 2010		Realisasi	
	Jumlah 2	Satuan 3	Jumlah 4	Satuan 5
Pengembangan Air Minum				
Bantuan Teknis dan Manajemen Pengelolaan Air Minum PDAM	35	PDAM	35	PDAM
Bantuan teknis pengelolaan untuk pengelola air minum non PDAM	30	non PDAM	30	non PDAM
Edukasi/ kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku air minum	32	provinsi	32	provinsi
Fasilitasi Pengembangan PS air minum MBR Perkotaan	74	kawasan	74	kawasan
Fasilitasi Pengembangan PS air minum perkotaan IKK	144	IKK	144	IKK
	1.440	ltr/det		ltr/det
Fasilitasi pengembangan PS air minum Perdesaan	1.472	desa	1.472	desa
Peningk. Pelayanan Air Minum Kawasan pemekaran, Pulau Terluar, Perbatasan, Terpencil, KAPET	18	kawasan	18	kawasan
	173	ltr/det		ltr/det
Peningk. Pelayanan Air Minum Untuk Mendukung Pelabuhan Perikanan	13	kawasan	13	kawasan
	76	ltr/det		ltr/det

Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU

**Tabel 6.10 Rekapitulasi Kondisi Eksisting PDAM di Indonesia
Tahun 2009**

Provinsi	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (l/det)	Kapasitas Produksi (l/det)	Kehilangan Air	Jumlah SR (unit)	Cakupan Pelayanan (%)
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	14 kota; 20 IKK	2.164	1.782	43,86	115.894	30,86
Sumatera Utara	6 kota; 16 IKK	7.670	7.492	22,80	465.483	25,92
Sumatera Barat	8 kota; 83 IKK	4.133	3.021	37,38	227.399	39,83
Riau	3 kota; 44 IKK	1.708	1.192	43,09	59.419	22,07
Jambi	5 kota; 7 IKK	2.012	1.514	30,85	157.172	23,77
Sumatera Selatan	10 kota; 93 IKK	6.108	4.469	34,13	220.842	14,37
Bengkulu	-	931	775	46,81	35.359	58,82
Lampung	6 kota; 49 IKK	1.739	1.238	42,58	61.092	13,92
Bangka Belitung	4 IKK	90	80	39,00	1.856	13,17
Kepulauan Riau	1 kota; 3 IKK	340	237	42,55	22.874	52,67
DKI Jakarta	-	0	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	32 kota; 107 IKK	24.391	20.987	33,05	1.581.094	30,75
Jawa Tengah	33 kota; 134 IKK	16.774	12.599	34,43	867.552	23,99
DI Yogyakarta	9 kota; 35 IKK	1.951	1.485	36,92	109.297	36,57
Jawa Timur	46 kota; 218 IKK	22.776	19.064	32,40	1.273.980	30,07
Banten	4 kota; 21 IKK	1.268	1.108	27,38	70.865	16,34
Bali	14 kota; 31 IKK	4.602	3.978	24,78	283.030	52,31
Nusa Tenggara Barat	8 kota; 14 IKK	2.643	2.116	27,23	153.345	24,65
Nusa Tenggara Timur	14 kota; 10 IKK	3.938	1.870	32,41	76.529	34,99
Kalimantan Barat	11 kota; 54 IKK	2.834	2.125	36,27	136.763	49,46
Kalimantan Tengah	7 kota; 64 IKK	1.607	1.228	18,58	90.214	32,06
Kalimantan Selatan	-	3.500	3.087	28,72	211.643	28,35
Kalimantan Timur	5 kota; 33 IKK	5.390	4.421	26,30	288.045	57,87
Sulawesi Utara	5 kota; 80 IKK	2.519	1.851	58,76	89.838	45,28
Sulawesi Tengah	5 kota; 18 IKK	691	508	10,84	31.656	15,75
Sulawesi Selatan	6 kota; 28 IKK	1.353	1.045	33,07	72.353	46,33
Sulawesi Tenggara	7 kota; 25 IKK	1.054	920	32,38	57.472	45,03
Gorontalo	1 kota; 10 IKK	500	406	35,04	44.173	35,23
Sulawesi Barat	4 kota	395	305	29,31	26.800	23,21
Maluku	3 kota; 8 IKK	687	539	37,64	22.918	27,57
Maluku Utara	6 kota; 17 IKK	662	536	25,76	57.299	56,39
Papua Barat	3 kota	441	261	51,14	19.624	30,11
Papua	4 kota; 1 IKK	1.065	781	26,73	36.554	63,17
Indonesia	280 kota; 1.134 IKK	127.931	103.017	32,66	6.968.434	33,36

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU

**Tabel 6.11 Jumlah Penduduk Terlayani dan Jumlah Pelanggan Air Minum
Tahun 2010**

Provinsi	Jumlah Pend. Adm. (jiwa)	Jumlah Pend. Wil. Pelayanan (jiwa)	Jumlah Pelanggan	Rumah Tangga	Sosial
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	3.914.068	1.192.043	149.097	124.183	1.278
Sumatera Utara	9.410.940	7.898.328	606.635	532.159	9.603
Sumatera Barat	4.501.929	1.943.337	205.252	182.750	1.816
Riau	3.385.413	119.065	54.021	37.963	561
Jambi	2.542.281	671.146	122.761	102.036	1.265
Sumatera Selatan	6.600.209	3.054.873	225.676	198.031	2.057
Bengkulu	1.572.994	651.451	65.643	44.127	667
Lampung	6.695.539	1.332.400	64.005	48.839	702
Bangka Belitung	668.212	206.419	11.980	11.428	122
Kepulauan Riau	1.417.670	209.006	203.601	166.950	1.443
DKI Jaya	9.233.000	0	795.149	690.329	1.850
Jawa Barat	37.238.127	12.038.386	1.009.571	923.993	11.183
Jawa Tengah	32.864.563	10.565.157	999.041	931.782	15.667
DI Yogyakarta	3.501.869	882.979	114.814	106.836	2.009
Jawa Timur	37.395.775	12.596.301	1.280.441	1.175.243	20.158
Banten	10.131.941	3.300.819	187.409	172.848	2.014
Bali	3.652.850	1.653.249	311.246	273.326	5.779
Nusa Tenggara Barat	3.708.141	2.572.683	135.688	123.369	2.615
Nusa Tenggara Timur	3.563.908	321.374	95.684	79.693	1.429
Kalimantan Barat	3.987.972	971.259	137.905	110.252	1.654
Kalimantan Tengah	2.085.819	827.555	80.389	73.277	1.107
Kalimantan Selatan	3.324.629	1.626.953	232.225	206.740	3.062
Kalimantan Timur	3.151.413	1.373.457	281.524	258.220	3.266
Sulawesi Utara	2.014.641	1.234.730	93.144	65.437	959
Sulawesi Tengah	1.898.389	771.835	60.926	51.626	671
Sulawesi Selatan	7.351.249	1.496.198	304.957	280.367	9.482
Sulawesi Tenggara	1.778.433	376.801	56.425	40.645	413
Gorontalo	983.952	206.252	33.164	29.121	806
Sulawesi Barat	936.589	102.067	18.486	15.582	301
Maluku	950.345	120.837	19.583	18.243	163
Maluku Utara	807.107	291.384	26.601	21.548	362
Papua	673.606	433.717	42.915	38.961	613
Papua Barat	387.485	279.420	20.562	19.011	289
Indonesia	212.331.058	71.321.481	8.046.520	7.154.915	105.366

Lanjutan Tabel 6.11

Provinsi	Usaha	Industri	Instansi Pemerintah	Jumlah Instalasi Pengolahan (unit)
1	7	8	9	10
Nanggroe Aceh Darussalam	12.311	25	2.614	63
Sumatera Utara	50.692	753	5.647	79
Sumatera Barat	9.554	697	2.930	92
Riau	8.287	17	2.171	30
Jambi	12.308	495	1.541	87
Sumatera Selatan	16.724	1.185	1.235	125
Bengkulu	2.095	7	786	46
Lampung	3.241	42	525	20
Bangka Belitung	206	5	171	15
Kepulauan Riau	20.941	1.507	1.718	14
DKI Jaya	89.873	0	3.766	6
Jawa Barat	49.630	5.084	7.135	125
Jawa Tengah	43.382	725	12.482	96
DI Yogyakarta	2.276	41	1.918	36
Jawa Timur	63.261	3.024	9.426	148
Banten	6.064	207	696	56
Bali	23.868	1.233	4.255	66
Nusa Tenggara Barat	5.399	358	1.198	6
Nusa Tenggara Timur	3.869	114	1.631	6
Kalimantan Barat	13.165	205	1.233	67
Kalimantan Tengah	4.049	216	1.232	97
Kalimantan Selatan	11.494	268	3.028	92
Kalimantan Timur	8.675	7.338	1.519	195
Sulawesi Utara	1.368	90	1.003	106
Sulawesi Tengah	2.577	30	1.164	51
Sulawesi Selatan	16.630	304	2.370	85
Sulawesi Tenggara	10.627	58	1.079	16
Gorontalo	1.449	15	651	25
Sulawesi Barat	1.483	27	227	20
Maluku	1.033	5	346	62
Maluku Utara	9.300	377	586	1
Papua	2.370	14	722	4
Papua Barat	855	24	253	5
Indonesia	509.056	24.490	77.258	1.942

Sumber: Direktori Perpamsi 2010

**Tabel 6.12 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009**

Provinsi	Tahun Pencapaian					
	2005		2006		2007	
	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	2	4.867	1	0
Sumatera Utara	4	13.333	3	14.667	8	8.892
Sumatera Barat	3	10.000	3	24.417	9	4.500
Riau	1	3.333	4	9.000	1	4.000
Kepulauan Riau	1	6.667	0	0	2	6.333
Jambi	1	0	4	24.500	2	3.000
Bengkulu	1	3.333	1	14.333	1	3.000
Sumatera Selatan	1	2.100	3	4.000	1	3.000
Bangka Belitung	1	6.667	1	3.248	1	3.000
Lampung	0	0	1	4.049	2	3.000
DKI Jakarta	0	0	0	0	1	417
Banten	0	0	3	4.443	4	3.000
Jawa Barat	1	5.000	4	7.360	3	20.015
Jawa Tengah	2	3.867	2	41.006	8	6.983
DI Yogyakarta	3	2.100	4	6.302	3	6.335
Jawa Timur	10	7.733	5	29.297	10	7.500
Kalimantan Barat	1	3.333	3	15.003	2	3.000
Kalimantan Tengah	0	0	4	24.265	3	4.024
Kalimantan Selatan	1	6.667	3	22.158	2	12.321
Kalimantan Timur	2	3.333	4	20.407	3	4.453
Sulawesi Utara	2	6.667	3	16.631	1	3.000
Gorontalo	1	10.000	2	2.000	4	2.500
Sulawesi Tengah	3	13.333	3	22.100	1	13.000
Sulawesi Selatan	0	0	4	6.000	1	2.000
Sulawesi Barat	0	0	3	30.867	2	2.000
Sulawesi Tenggara	0	0	2	24.650	4	2.000
Bali	3	106.667	4	196.938	5	140.488
Nusa Tenggara Barat	0	0	1	15.333	4	2.500
Nusa Tenggara Timur	0	0	2	4.000	1	3.000
Maluku	1	133	1	3.333	2	0
Maluku Utara	1	133	1	12.500	1	0
Papua	0	0	2	3.000	1	0
Papua Barat	2	6.667	2	5.250	1	0
Indonesia	46	221.067	84	615.894	95	277.261

Lanjutan Tabel 6.12

Provinsi	Tahun Pencapaian				Total	
	2008		2009		Kab/ Kota	Jiwa
	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa		
1	8	9	10	11	12	13
Nanggroe Aceh Darussalam	1	3.083	2	2.500	3	10.450
Sumatera Utara	1	9.973	7	16.783	14	63.649
Sumatera Barat	8	26.969	3	6.500	12	72.386
Riau	1	0	1	1.250	4	17.583
Kepulauan Riau	1	0	2	1.250	2	14.250
Jambi	1	2.000	2	2.500	6	32.000
Bengkulu	1	0	1	4.000	1	24.666
Sumatera Selatan	1	4.623	1	1.250	3	14.973
Bangka Belitung	1	1.500	3	2.250	7	16.665
Lampung	1	2.667	2	1.250	3	10.966
DKI Jakarta	1	3.875	1	1.667	2	5.959
Banten	2	4.152	3	4.000	7	15.595
Jawa Barat	2	56.893	4	38.273	8	127.542
Jawa Tengah	11	13.023	14	22.694	17	87.573
DI Yogyakarta	1	27.288	1	22.671	4	64.696
Jawa Timur	18	24.253	17	26.667	25	95.450
Kalimantan Barat	1	0	2	1.250	4	22.586
Kalimantan Tengah	1	22.250	1	1.250	5	51.759
Kalimantan Selatan	2	5.660	1	24.278	3	71.083
Kalimantan Timur	3	5.123	4	9.000	6	42.316
Sulawesi Utara	2	833	1	1.250	4	28.381
Gorontalo	1	2.750	1	2.250	4	19.500
Sulawesi Tengah	1	20.000	0	0	6	68.433
Sulawesi Selatan	6	6.517	2	4.500	10	19.017
Sulawesi Barat	2	4.007	3	5.250	3	42.124
Sulawesi Tenggara	1	66.311	2	4.000	4	96.961
Bali	6	3.000	2	61.028	8	508.120
Nusa Tenggara Barat	5	4.350	4	4.500	6	26.683
Nusa Tenggara Timur	1	1.500	1	1.250	2	9.750
Maluku	1	0	0	0	2	3.466
Maluku Utara	1	0	1	0	2	12.633
Papua	1	0	1	2.500	2	5.500
Papua Barat	1	1.727	5	0	6	13.643
Indonesia	89	324.328	95	277.811	195	1.716.361

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Tabel 6.13 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009**

Provinsi	Jumlah Pencapaian					
	2005		2006		2007	
	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	8	65.000	2	57.601	2	52.400
Sumatera Utara	8	123.574	3	28.002	3	150.640
Sumatera Barat	6	135.000	2	96.977	5	69.027
Riau	5	198.600	2	43.506	1	3.440
Kepulauan Riau	3	58.480	2	50.000	0	0
Jambi	3	33.000	2	28.800	1	2.400
Bengkulu	1	30.600	1	31.200	1	9.606
Sumatera Selatan	7	35.400	6	45.600	1	2.400
Bangka Belitung	4	28.200	4	48.000	5	3.059
Lampung	1	45.000	5	212.199	1	106.000
DKI Jakarta	0	0	0	0	2	21.322
Banten	2	25.800	4	190.800	3	41.654
Jawa Barat	2	53.800	6	438.650	6	378.640
Jawa Tengah	3	13.950	7	104.971	10	9.600
DI Yogyakarta	2	56.400	2	58.969	2	58.986
Jawa Timur	6	56.970	2	115.833	8	474.823
Kalimantan Barat	4	28.200	6	84.000	1	192.266
Kalimantan Tengah	3	35.400	3	75.943	1	2.400
Kalimantan Selatan	4	104.198	8	60.508	2	63.730
Kalimantan Timur	0	0	5	84.000	3	66.665
Sulawesi Utara	3	60.400	2	12.797	3	24.966
Gorontalo	1	13.800	1	33.600	2	189.600
Sulawesi Tengah	4	50.200	7	24.400	3	0
Sulawesi Selatan	2	40.200	4	86.400	1	0
Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	10.248
Sulawesi Tenggara	9	264.600	6	36.000	1	37.260
Bali	1	35.400	2	41.300	4	523.340
Nusa Tenggara Barat	0	0	1	91.267	2	14.999
Nusa Tenggara Timur	1	40.200	3	50.400	1	3.200
Maluku	1	6.600	6	67.200	2	0
Maluku Utara	3	37.609	3	22.800	1	95.760
Papua	1	11.400	1	64.800	0	0
Papua Barat	2	16.200	1	28.800	3	0
Indonesia	100	1.704.181	109	2.415.323	82	2.608.432

Lanjutan Tabel 6.13

Provinsi	Jumlah Pencapaian				Total	
	2008		2009		Kab/ Kota	Jiwa
	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa		
1	8	9	10	11	12	13
Nanggroe Aceh Darussalam	2	36.717	3	408.571	12	620.289
Sumatera Utara	2	67.657	2	357.143	12	727.016
Sumatera Barat	4	513.200	6	410.500	11	1.224.704
Riau	1	60.171	3	100.000	7	405.717
Kepulauan Riau	1	53.314	4	114.286	6	276.080
Jambi	2	54.229	4	171.429	6	289.858
Bengkulu	2	75.572	3	85.714	3	232.692
Sumatera Selatan	1	64.343	1	142.857	10	290.600
Bangka Belitung	3	34.971	4	100.000	7	214.230
Lampung	3	85.371	6	114.286	8	562.856
DKI Jakarta	1	99.063	3	10.400	6	130.785
Banten	2	72.216	4	142.857	6	473.327
Jawa Barat	5	553.831	8	714.286	16	2.139.207
Jawa Tengah	6	62.000	7	228.571	20	419.092
DI Yogyakarta	1	77.086	2	285.714	3	537.155
Jawa Timur	12	1.127.447	10	342.857	19	2.117.930
Kalimantan Barat	3	113.780	6	142.857	11	561.103
Kalimantan Tengah	1	42.571	2	114.286	5	270.600
Kalimantan Selatan	2	58.446	4	228.571	12	515.453
Kalimantan Timur	4	100.626	5	214.286	9	465.577
Sulawesi Utara	4	252.886	4	142.857	9	493.906
Gorontalo	3	142.086	3	285.714	4	664.800
Sulawesi Tengah	3	77.373	3	100.000	9	251.973
Sulawesi Selatan	2	31.688	7	100.000	11	258.288
Sulawesi Barat	2	253.386	2	285.714	3	549.348
Sulawesi Tenggara	1	4.800	3	71.429	9	414.089
Bali	6	173.971	6	885.714	9	1.659.725
Nusa Tenggara Barat	2	235.429	3	642.857	4	984.552
Nusa Tenggara Timur	6	7.200	4	157.143	8	258.143
Maluku	2	75.657	3	128.571	8	278.028
Maluku Utara	1	42.743	2	71.429	6	270.341
Papua	2	34.469	3	85.714	4	196.383
Papua Barat	2	65.943	3	157.143	11	268.086
Indonesia	94	4.750.241	133	7.543.756	284	19.021.933

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 6.14 Prasarana dan Sarana Drainase
Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota
Pencapaian Renstra Cipta Karya Tahun 2005-2009

Provinsi	Tahun Pencapaian					
	2005		2006		2007	
	Luas (Ha)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	124,35	7	139,00	4	51,70	1
Sumatera Utara	226,95	18	443,00	4	22,50	2
Riau	29,80	2	24,00	2	36,45	1
Kepulauan Riau	15,60	1	22,00	2	13,59	1
Bangka Belitung	16,25	1	15,00	3	4,13	1
Sumatera Barat	70,00	4	39,00	0	22,20	0
Jambi	27,60	4	29,00	4	27,50	1
Bengkulu	66,50	4	31,00	3	13,85	1
Sumatera Selatan	21,68	5	12,00	1	50,37	1
Lampung	29,40	3	117,00	4	75,09	1
Banten	64,53	3	41,00	1	16,59	1
DKI Jakarta	3,25	1	0,00	0	2,53	0
Jawa Barat	16,58	10	45,00	7	0,00	1
Jawa Tengah	14,80	3	43,00	5	73,91	3
DI Yogyakarta	0,00	1	20,00	2	0,00	0
Jawa Timur	30,00	6	102,00	10	71,62	3
Kalimantan Barat	12,58	7	36,00	5	15,38	1
Kalimantan Tengah	26,65	4	223,00	5	10,75	1
Kalimantan Selatan	12,43	3	198,00	6	0,00	1
Kalimantan Timur	20,00	2	15,00	1	12,00	1
Bali	68,50	6	37,00	7	0,00	2
Nusa Tenggara Barat	42,38	5	44,00	5	15,00	1
Nusa Tenggara Timur	45,27	5	65,00	3	20,00	1
Sulawesi Selatan	23,34	5	103,00	6	27,08	1
Sulawesi Barat	0,00	0	58,00	5	28,92	1
Sulawesi Tenggara	0,00	0	108,00	8	18,39	1
Sulawesi Tengah	15,93	6	108,00	6	13,50	1
Sulawesi Utara	42,32	7	211,00	7	45,00	1
Gorontalo	97,89	4	170,00	5	13,00	1
Maluku	3,09	3	19,00	4	77,51	1
Maluku Utara	4,90	1	15,00	2	23,40	1
Papua	33,58	2	46,00	2	0,00	0
Papua Barat	34,45	3	33,00	3	30,07	1
Indonesia	1.240,60	136	2.611,00	132	832,03	35

Lanjutan Tabel 6.14

Provinsi	Tahun Pencapaian				Total	
	2008		2009		Luas (Ha)	Jumlah Kawasan
	Luas (Ha)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Kawasan		
1	8	9	10	11	12	13
Nanggroe Aceh Darussalam	0,00	0	550,00	4	865,05	16
Sumatera Utara	0,00	0	50,00	1	742,45	25
Riau	0,00	0	0,00	0	90,25	5
Kepulauan Riau	0,00	0	70,00	1	121,19	5
Bangka Belitung	0,00	0	0,00	0	35,38	5
Sumatera Barat	0,00	0	50,00	1	181,20	5
Jambi	0,00	0	80,00	1	164,10	10
Bengkulu	0,00	0	0,00	0	111,35	8
Sumatera Selatan	0,00	0	70,00	1	154,05	8
Lampung	0,00	0	0,00	0	221,49	8
Banten	0,00	0	0,00	0	122,12	5
DKI Jakarta	0,00	0	250,00	1	255,78	2
Jawa Barat	0,00	0	0,00	0	61,58	18
Jawa Tengah	0,00	0	450,00	2	581,71	13
DI Yogyakarta	0,00	0	0,00	0	20,00	3
Jawa Timur	11,00	1	500,00	3	714,62	23
Kalimantan Barat	0,00	0	0,00	0	63,96	13
Kalimantan Tengah	0,00	0	0,00	0	260,40	10
Kalimantan Selatan	0,00	0	50,00	1	260,43	11
Kalimantan Timur	0,00	0	50,00	1	97,00	5
Bali	24,00	1	100,00	1	229,50	17
Nusa Tenggara Barat	0,00	0	50,00	1	151,38	12
Nusa Tenggara Timur	0,00	0	0,00	0	130,27	9
Sulawesi Selatan	0,00	0	108,00	1	261,42	13
Sulawesi Barat	0,00	0	150,00	1	236,92	7
Sulawesi Tenggara	0,00	0	0,00	0	126,39	9
Sulawesi Tengah	0,00	0	0,00	0	137,43	13
Sulawesi Utara	0,00	0	0,00	0	298,32	15
Gorontalo	40,00	1	0,00	0	320,89	11
Maluku	0,00	0	0,00	0	99,60	8
Maluku Utara	0,00	0	0,00	0	43,30	4
Papua	0,00	0	50,00	1	129,58	5
Papua Barat	0,00	0	50,00	1	147,52	8
Indonesia	75,00	3	2.678,00	23	7.436,63	329

Sumber: Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, Kementerian Pekerjaan Umum

**Tabel 6.15 Capaian Pembangunan Cipta Karya
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Tahun 2010**

Kelompok Kegiatan	Sasaran 2010		Realisasi	
	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5
Pengembangan Sanitasi Lingkungan				
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Limbah Sistem off-site	11	kawasan	11	kawasan
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Limbah Sistem on-site	30	kawasan	27	kawasan
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Drainase	26	kawasan	26	kawasan
	2.392	ha		ha
Pengembangan Persampahan				
Penyediaan Infrastruktur Persampahan	55	kawasan	55	kawasan
Fasilitasi Pengurangan Sampah Melalui 3R	50	lokasi	49	lokasi

Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, Kementerian PU

**Tabel 6.16 Kondisi Eksisting PDAM Tahun 2009
dan Jumlah Penduduk di Indonesia**

Provinsi	Kapasitas Terpasang (l/det)	Kapasitas Produksi (l/det)	Kehilangan Air	Jumlah SR (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	2.164	1.782	43,86	115.894	4.494.410
Sumatera Utara	7.670	7.492	22,80	465.483	12.982.204
Sumatera Barat	4.133	3.021	37,38	227.399	4.846.909
Riau	1.708	1.192	43,09	59.419	5.538.367
Jambi	2.012	1.514	30,85	157.172	3.092.265
Sumatera Selatan	6.108	4.469	34,13	220.842	7.450.394
Bengkulu	931	775	46,81	35.359	1.715.518
Lampung	1.739	1.238	42,58	61.092	7.608.405
Bangka Belitung	90	80	39,00	1.856	1.223.296
Kepulauan Riau	340	237	42,55	22.874	1.679.163
DKI Jakarta	0	0	0,00	0	9.607.787
Jawa Barat	24.391	20.987	33,05	1.581.094	43.053.732
Jawa Tengah	16.774	12.599	34,43	867.552	32.382.657
DI Yogyakarta	1.951	1.485	36,92	109.297	3.457.491
Jawa Timur	22.776	19.064	32,40	1.273.980	37.476.757
Banten	1.268	1.108	27,38	70.865	10.632.166
Bali	4.602	3.978	24,78	283.030	3.890.757
Nusa Tenggara Barat	2.643	2.116	27,23	153.345	4.500.212
Nusa Tenggara Timur	3.938	1.870	32,41	76.529	4.683.827
Kalimantan Barat	2.834	2.125	36,27	136.763	4.395.983
Kalimantan Tengah	1.607	1.228	18,58	90.214	2.212.089
Kalimantan Selatan	3.500	3.087	28,72	211.643	3.626.616
Kalimantan Timur	5.390	4.421	26,30	288.045	3.553.143
Sulawesi Utara	2.519	1.851	58,76	89.838	2.270.596
Sulawesi Tengah	691	508	10,84	31.656	2.635.009
Sulawesi Selatan	1.353	1.045	33,07	72.353	8.034.776
Sulawesi Tenggara	1.054	920	32,38	57.472	2.232.586
Gorontalo	500	406	35,04	44.173	1.040.164
Sulawesi Barat	395	305	29,31	26.800	1.158.651
Maluku	687	539	37,64	22.918	1.533.506
Maluku Utara	662	536	25,76	57.299	1.038.087
Papua Barat	441	261	51,14	19.624	760.422
Papua	1.065	781	26,73	36.554	2.833.381
Indonesia	127.931	103.017	32,66	6.968.434	237.641.326

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dan Sensus Penduduk 2010 BPS RI

BAB VII

INFORMASI STATISTIK BIDANG PENATAAN RUANG

7.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang melingkupi struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

- a. rencana tata ruang pulau/ kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c. rencana detail tata ruang kabupaten/ kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.

Rencana tata ruang kemudian dijadikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar memiliki ketetapan hukum. RTRW Nasional (RTRWN) menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota. Perda RTRW menjadi pedoman pembangunan di daerah agar lebih fokus dan terarah.

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011, progres penyelesaian Perda RTRW menghasilkan 10 Perda RTRW provinsi dari 33 provinsi, 43 Perda RTRW kabupaten dari 398 kabupaten, dan 13 Perda RTRW Kota dari 93 kota yang ada. Jumlahnya semua terdapat 66 Perda RTRW provinsi, kabupaten dan kota. Meskipun belum menjadi Perda, ada sebanyak 30 RTRW Provinsi atau 90,9% yang telah mendapat persetujuan substansi. Sedangkan RTRW Kabupaten yang telah mendapat persetujuan substansi sebanyak 192 atau 48,2% dan RTRW Kota sebanyak 41 atau 44,1%.

Lambannya pengesahan RTRW dapat menimbulkan dampak buruk seperti semakin menyempit atau bahkan habisnya lahan-lahan produktif strategis karena dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Namun membuat Perda RTRW tidaklah sembarangan, jika dulu RTRW kabupaten/ kota bisa dibuat oleh masing-masing pemerintah kabupaten, pada saat ini tidak lagi demikian. Membuat RTRW kabupaten/ kota tidak dapat sembarangan karena harus melalui persetujuan pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau yang menjadi Lampiran II mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau, antara lain menyebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Empat Pulau, yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Fungsi kota sebagai pusat permukiman disini meliputi PKN, PKW, dan PKSN.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan PKN, PKW dan PKSN menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional, dengan kriteria penentuan: kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/ bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional/ beberapa provinsi, pusat pengolahan/ pengumpul barang secara nasional/ beberapa provinsi, simpul transportasi secara nasional/ beberapa provinsi, jasa pemerintahan untuk Nasional/ beberapa provinsi, jasa publik yang lain untuk Nasional/ beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, dengan kriteria penentuan : pusat jasa pelayanan keuangan/ bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat pengolahan/ pengumpul barang yang melayani kabupaten, simpul transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa kabupaten.
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah pusat perkotaan yang ditetapkan secara nasional dalam RTRW Nasional untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara; Kawasan yang ditetapkan sebagai PKSN tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan.

PKSN ditetapkan dengan kriteria :

- a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

7.2 Pengembangan Kawasan

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008) telah ditetapkan 70 kawasan andalan yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi darat dan laut.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategi Nasional (KSN) bertujuan agar terjadi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional. Nantinya, kondisi itu berimbas pada peningkatan daya saing pada perekonomian internasional. Selain itu KSN ini bisa menyokong pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar kawasan.

Salah satu unsur pembentuk pola ruang dalam Rencana Tata Ruang adalah terdapatnya penetapan kawasan lindung pada suatu wilayah. Kawasan lindung memiliki peran yang penting, karena berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan hilirnya dan pelestarian terhadap kawasan lindung. Fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang merupakan hal utama yang harus ditingkatkan dalam pelestarian kawasan lindung. Adanya RTR dapat menjadi pedoman dalam penentuan siapa yang bertanggung jawab dalam

pengawasan kawasan-kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing lembaga pemerintahan. Terkait upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya tata ruang dalam pelestarian kawasan lindung, diperlukan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan tentang arti pentingnya RTR bagi pengembangan suatu wilayah.

**Tabel 7.1 Status Perda RTRW di Indonesia
Tahun 2011**

Provinsi	Total Wilayah	Lingkup			Proses RTRW	
		Prov	Kab	Kota	Revisi	Rekomendasi Gubernur
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	18	5
Sumatera Utara	34	1	25	8	7	4
Sumatera Barat	20	1	12	7	2	4
Riau	13	1	10	2	5	1
Jambi	12	1	9	2	8	3
Sumatera Selatan	16	1	11	4	4	3
Bengkulu	11	1	9	1	1	2
Lampung	15	1	12	2	1	1
Bangka Belitung	8	1	6	1	1	0
Kepulauan Riau	8	1	5	2	2	0
DKI Jakarta	1	1	0	0	0	0
Jawa Barat	27	1	17	9	1	2
Jawa Tengah	36	1	28	6	0	0
DI Yogyakarta	6	1	4	1	0	0
Jawa Timur	39	1	29	9	0	2
Banten	9	1	4	4	0	0
Bali	10	1	8	1	0	3
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	1	0
Nusa Tenggara Timur	22	1	20	1	4	0
Kalimantan Barat	15	1	12	2	4	4
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	7	7
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	9	3
Kalimantan Timur	15	1	10	4	10	0
Sulawesi Utara	16	1	11	4	1	7
Sulawesi Tengah	12	1	10	1	0	0
Sulawesi Selatan	25	1	21	3	3	4
Sulawesi Tenggara	13	1	10	2	7	0
Gorontalo	7	1	5	1	0	0
Sulawesi Barat	6	1	5	0	2	0
Maluku	12	1	9	2	0	1
Maluku Utara	10	1	7	2	1	1
Papua Barat	12	1	10	1	1	0
Papua	30	1	28	1	13	2
Indonesia	524	33	398	93	113	59

Lanjutan Tabel 7.1

Provinsi	Sudah Pembahasan BKPRN		Sudah Mendapatkan Persetujuan Substansi		Perda
	Proses Kehutanan	Sedang Perbaiki di Daerah	Sedang Proses Kehutanan	Sedang Pembahasan DPRD	
1	8	9	10	11	12
Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0	1
Sumatera Utara	7	1	13	1	1
Sumatera Barat	0	1	9	3	1
Riau	7	0	0	0	0
Jambi	1	0	0	0	0
Sumatera Selatan	1	1	6	1	0
Bengkulu	0	0	0	8	0
Lampung	0	0	0	12	1
Bangka Belitung	0	1	6	0	0
Kepulauan Riau	1	2	0	3	0
DKI Jakarta	0	0	0	0	1
Jawa Barat	0	4	1	15	4
Jawa Tengah	0	5	0	15	16
DI Yogyakarta	0	1	0	1	4
Jawa Timur	0	4	0	20	13
Banten	0	3	0	2	4
Bali	0	0	0	6	1
Nusa Tenggara Barat	0	4	0	4	2
Nusa Tenggara Timur	0	6	0	4	8
Kalimantan Barat	6	0	1	0	0
Kalimantan Tengah	0	0	1	0	0
Kalimantan Selatan	0	0	1	1	0
Kalimantan Timur	2	0	1	2	0
Sulawesi Utara	5	0	3	0	0
Sulawesi Tengah	4	0	6	1	1
Sulawesi Selatan	0	6	0	7	5
Sulawesi Tenggara	1	0	3	2	0
Gorontalo	0	2	0	5	0
Sulawesi Barat	2	0	2	0	0
Maluku	0	0	10	1	0
Maluku Utara	1	0	7	0	0
Papua Barat	4	0	7	0	0
Papua	6	0	6	0	3
Indonesia	48	41	83	114	66

Sumber: <http://www.pu.go.id/punetnew2010/subindex.asp?pid=0406>

Catatan: Data direkap tanggal 31 Oktober 2011 oleh Pusdata

BAB VIII

DATA GENDER KEMENTERIAN PU

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, lanjut usia, remaja putra dan putri, maupun anak usia dini. Hasil pembangunan di Indonesia yang belum termanfaatkan secara setara oleh kaum laki-laki dan perempuan menunjukkan masih adanya kesenjangan yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan dibanding dengan laki-laki.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Secara umum tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Sesuai arah kebijakan dalam Renstra Kementerian PU 2010-2014, untuk memperkuat dimensi keadilan, PUG di lingkungan Kementerian PU diupayakan melalui implementasi tugas dan fungsinya, yaitu: penyediaan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum yang meliputi kebijakan dan strategi penataan ruang dan pembangunan kawasan, serta pembinaan bidang penataan ruang; pembinaan dan penyediaan jalan dan jembatan; pembinaan dan penyediaan air baku, air irigasi, serta pengembangan daerah rawa dan pengendalian banjir; pembinaan dan penyediaan perumahan dan permukiman; pembinaan dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan, seperti air bersih, persampahan, drainase dan sanitasi.

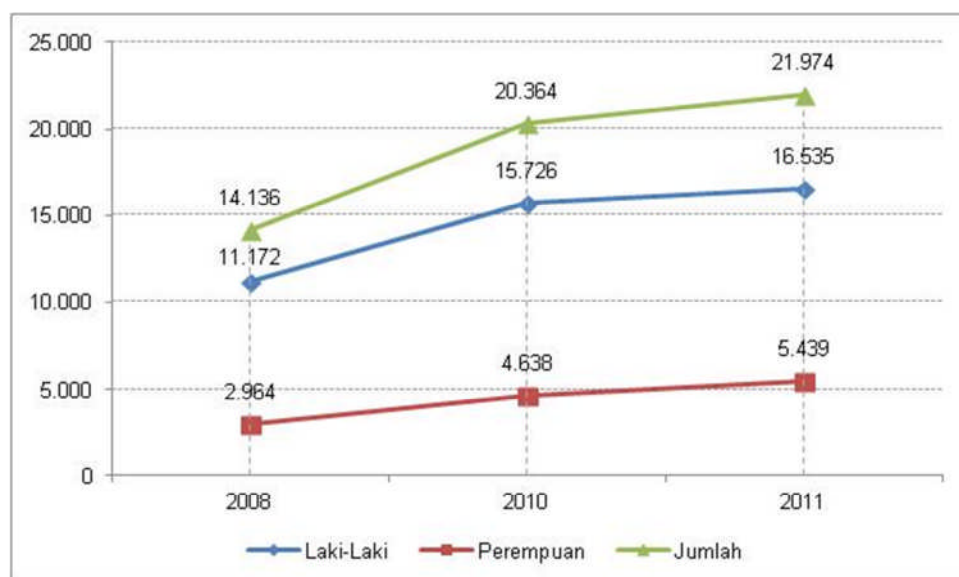
8.1 Perkembangan Jumlah Sumber Daya Manusia Kementerian PU

8.1.1 Analisis Perkembangan SDM Tahun 2008, 2010 dan 2011

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur ke-PU-an, jumlah pegawai merupakan salah satu faktor penentu karena berperan sebagai perencana, penyusun, pelaksana, hingga pemantau, walaupun dalam pelaksanaan tentunya juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pegawai di Kementerian PU perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PU meningkat dari tahun 2008 hingga 2011. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penerimaan secara *online* yang dilakukan beberapa tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan pegawai baru. Pada tahun 2011, tercatat PNS Kementerian PU berjumlah 21.974 orang baik yang di pusat maupun daerah. Jumlah tersebut terdiri dari 16.535 laki-laki dan 5.439 perempuan seperti yang tampak pada Gambar 8.1 berikut dan Tabel 8.1.

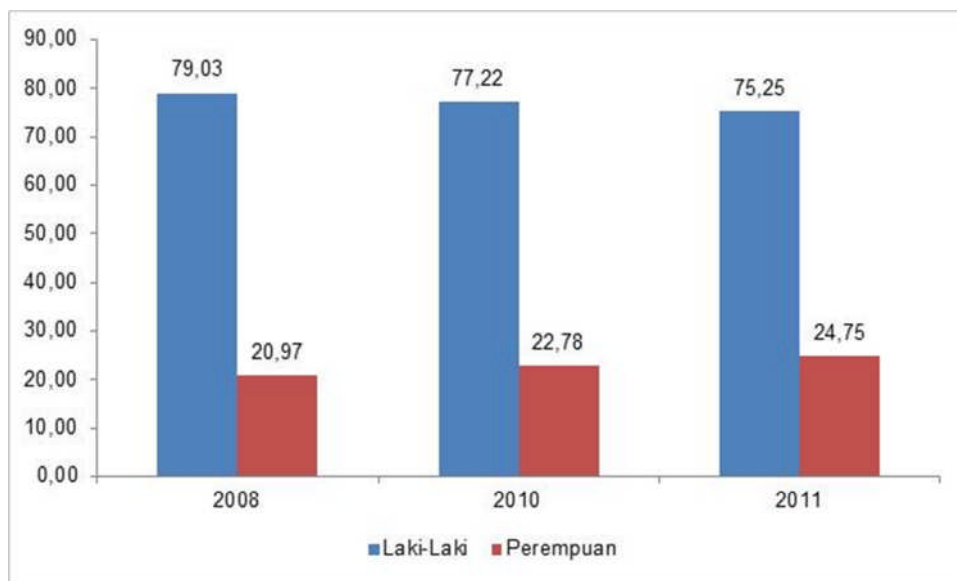
**Gambar 8.1 Jumlah SDM Kementerian PU
Tahun 2008-2011
(Status: Juni 2011)**



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Secara persentase, meskipun jumlah perempuan di Kementerian PU tidak mencapai seperempatnya, namun menunjukkan peningkatan dari 2008 yang tercatat hanya 20,97% hingga di tahun 2011 menjadi 24,75%. Sementara persentase laki-laki dari 79,03% di tahun 2008 menjadi 75,25% di tahun 2011.

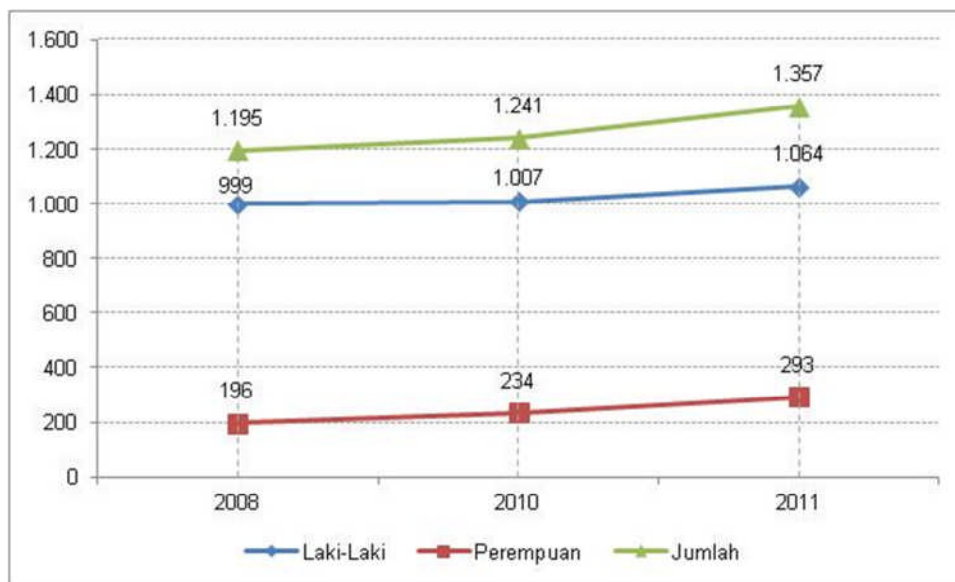
Gambar 8.2 Persentase SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Status: Juni 2011)



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

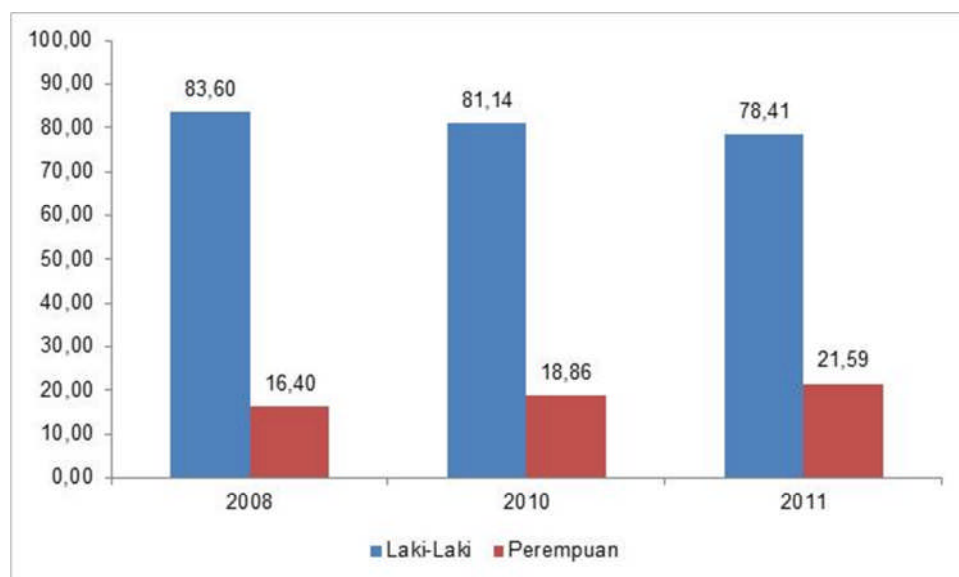
Jumlah dan komposisi pejabat di Kementerian PU akan mengalami perubahan seiring dengan terjadinya proses mutasi atau reorganisasi. Pada bulan Juni 2011, ada sebanyak 1.357 pegawai yang menduduki jabatan mulai dari Eselon IV hingga Eselon I. Jumlah tersebut terdiri dari 1.064 laki-laki dan 293 perempuan. Dilihat dari persentase, pegawai perempuan yang menjabat di Kementerian PU meningkat menjadi 21,59% di tahun 2011, yang sebelumnya 18,86%. Sedangkan laki-laki yang menjabat ada sebanyak 78,41% di tahun 2011 dari yang sebelumnya 81,14% di tahun 2010. Rangkuman mengenai jumlah serta persentase pejabat di Kementerian PU dapat dilihat pada Tabel 8.3 – 8.4 dan Gambar 8.3 – 8.4.

**Gambar 8.3 Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2008-2011
(Status: Juni 2011)**



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

**Gambar 8.4 Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2008-2011
Status: Juni 2011**



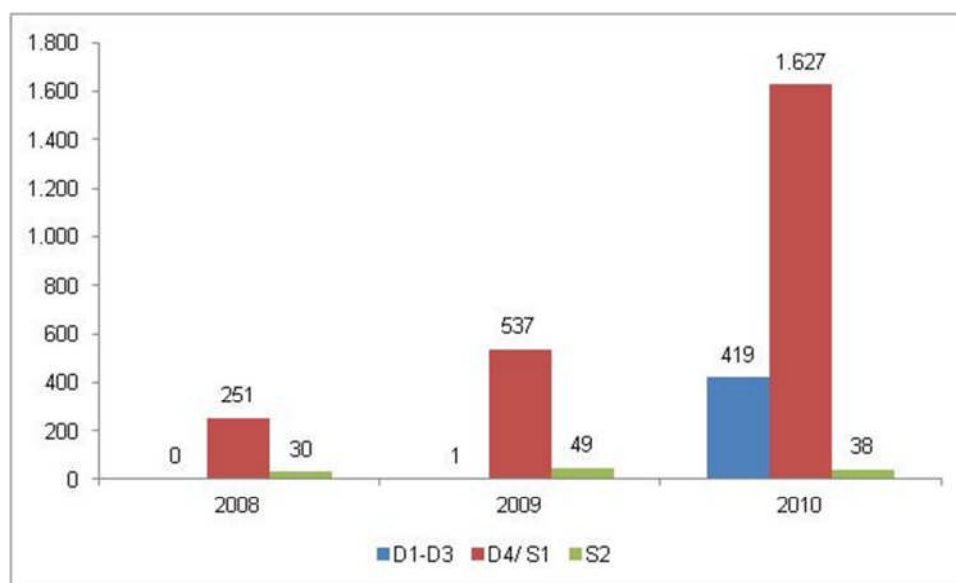
Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian PU beberapa tahun terakhir dilakukan secara *online* melalui media PU-net. Proses ini menjadikan rekrutmen pegawai yang

semakin terbuka, kompetitif dan membuka peluang bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon pegawai, baik laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian PU tahun 2010 mensyaratkan minimal D3.

Formasi yang dibutuhkan pada penerimaan tahun 2008 sebanyak 281 yang terdiri dari 251 untuk lulusan D4/ S1, dan 30 untuk S2. Di tahun 2009, formasi meningkat menjadi 587 dengan 1 untuk D3, 537 untuk D4/ S1 dan 49 untuk S2. Penerimaan terbesar di tahun 2010 dibuka untuk 2.084 orang yang terdiri dari 419 untuk D3, 1.627 untuk D4/ S1, dan 38 untuk S2.

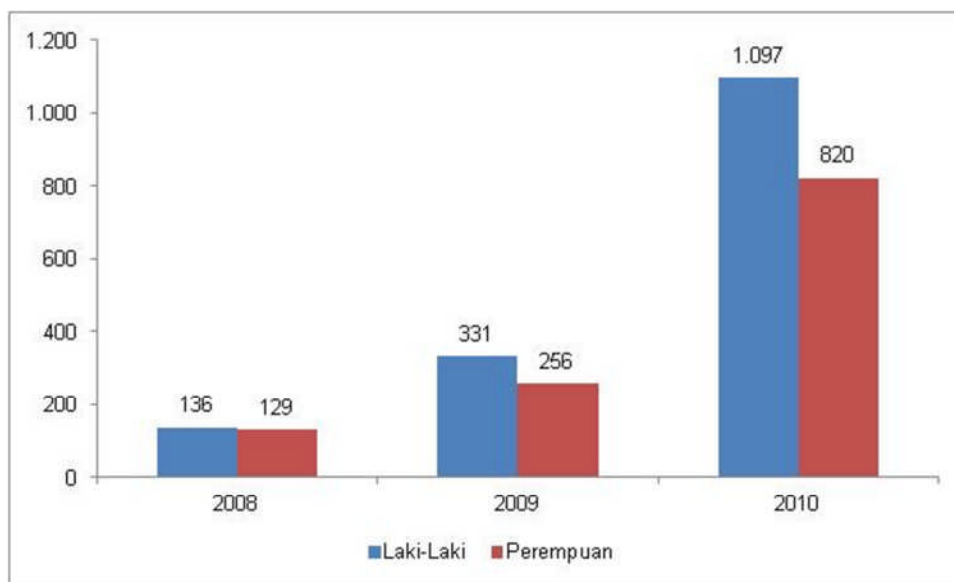
**Gambar 8.5 Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir
(2008, 2009, 2010)
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
(Status: 21 Juni 2011)**



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Tahun 2010 menjadi tahun yang paling tinggi penyerapan pegawainya dengan 1.917 orang yang terdiri dari 1.097 orang atau 57,22% laki-laki dan 820 orang atau 42,78% perempuan. Sementara di tahun 2008 dan 2009 penerimaan pegawai masing-masing sebanyak 265 dan 587 orang. Lebih lengkap data pada Tabel 8.5 – 8.8 dan Gambar 8.5 – 8.6.

**Gambar 8.6 Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir
(2008, 2009, 2010)
Menurut Jenis Kelamin
(Status: 21 Juni 2011)**

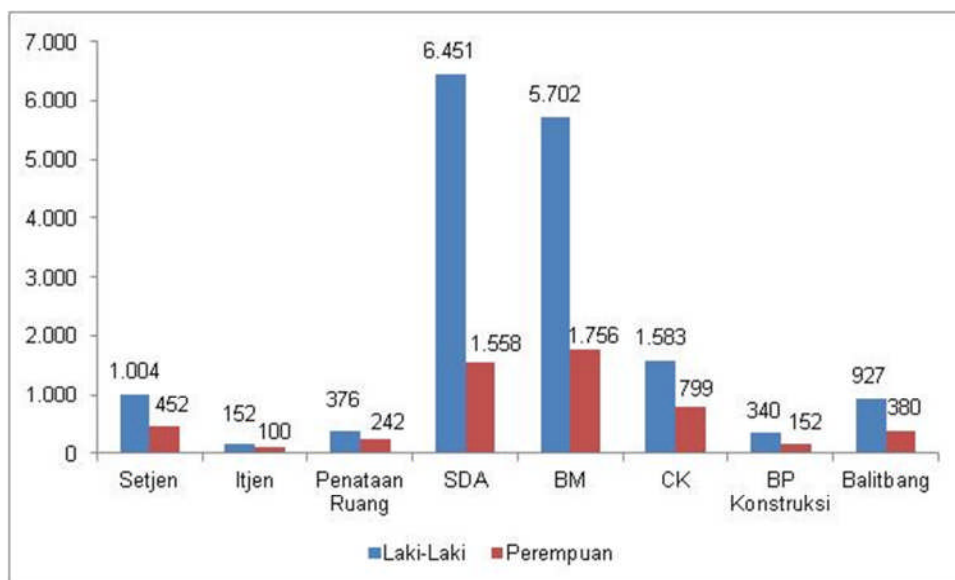


Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

8.1.2 Analisis Keseluruhan SDM PU Tahun 2011

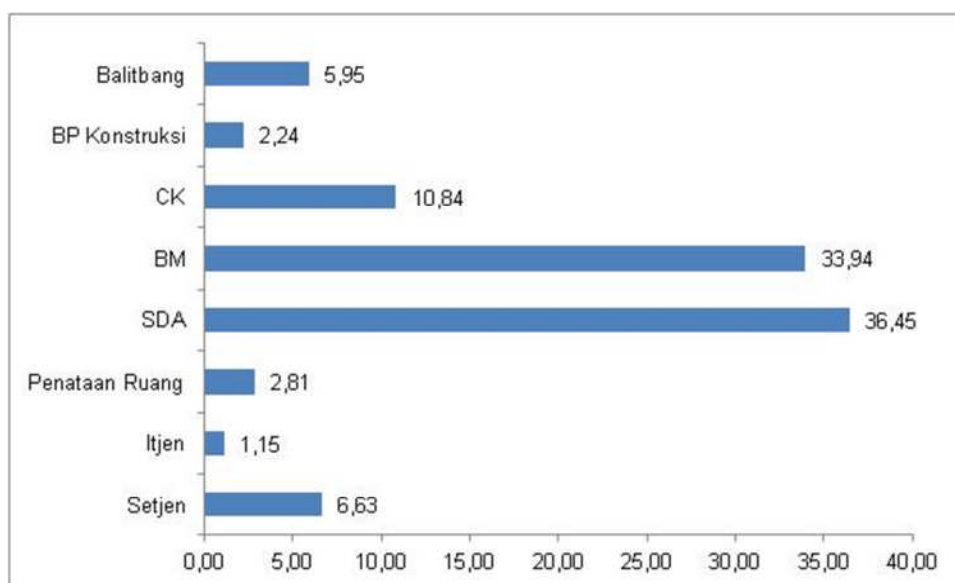
Penetapan kebutuhan PNS Kementerian PU disesuaikan dengan prioritas pemenuhan pegawai yang mengutamakan pada bidang tugas pelayanan teknis bidang ke-PU-an. Jumlah pegawai paling banyak berada di tiga satminkal yang menjadi fokus kegiatan pembangunan Kementerian PU, yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya dengan persentase masing-masing 36,45%, 33,94% dan 10,84%. Sementara persentase pegawai perempuan di ketiga satminkal tersebut meskipun relatif kecil namun masih paling tinggi jika dibandingkan dengan satminkal yang lain, yaitu 7,09% di Sumber Daya Air, 7,99% di Bina Marga, dan 3,64% di Cipta Karya. Distribusi pegawai ini dapat dilihat pada Gambar 8.7 – 8.8 dan Tabel 8.9.

**Gambar 8.7 Jumlah SDM Kementerian PU
Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Tahun 2011
(Status: 21 Juni 2011)**



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

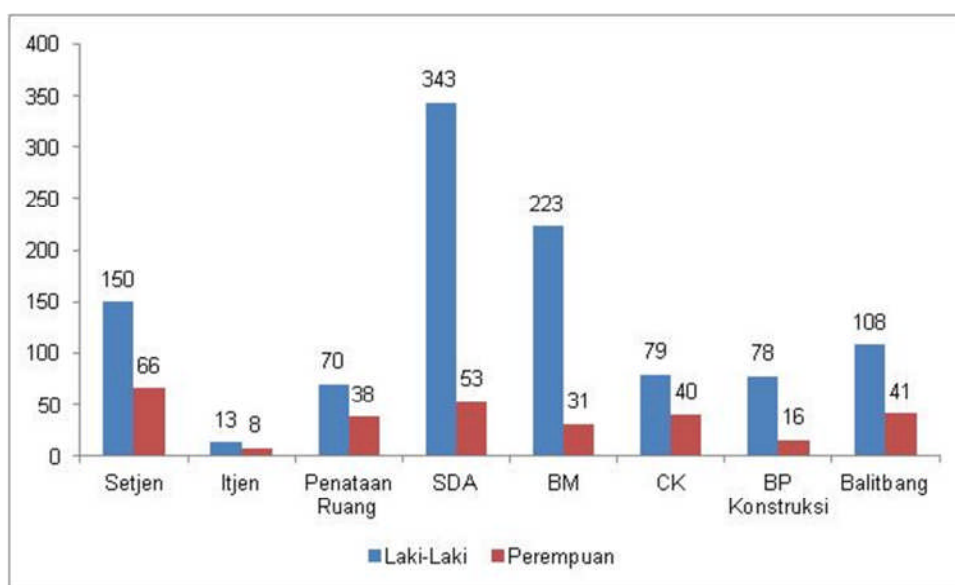
**Gambar 8.8 Persentase SDM Kementerian PU Menurut Satminkal
Tahun 2011
(Status: 21 Juni 2011)**



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan, khususnya sebagai pegambil kebijakan, salah satunya terlihat dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Di Kementerian PU, meskipun jumlah laki-laki yang menduduki jabatan masih dominan, namun kaum perempuan tetap mendapat peran sesuai dengan kapasitasnya. Gambar 8.8 di bawah ini menampilkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan mulai dai Eselon I sampai Eselon IV pada Juni 2011, ternyata paling banyak berada di Sekretariat Jenderal, yaitu 66 orang atau 4,86%, lalu kemudian di Ditjen SDA sebanyak 53 orang atau 3,91%. Sementara pejabat laki-laki paling banyak berada di Ditjen SDA dan Bina Marga dengan masing-masing 25,28% dan 16,43%.

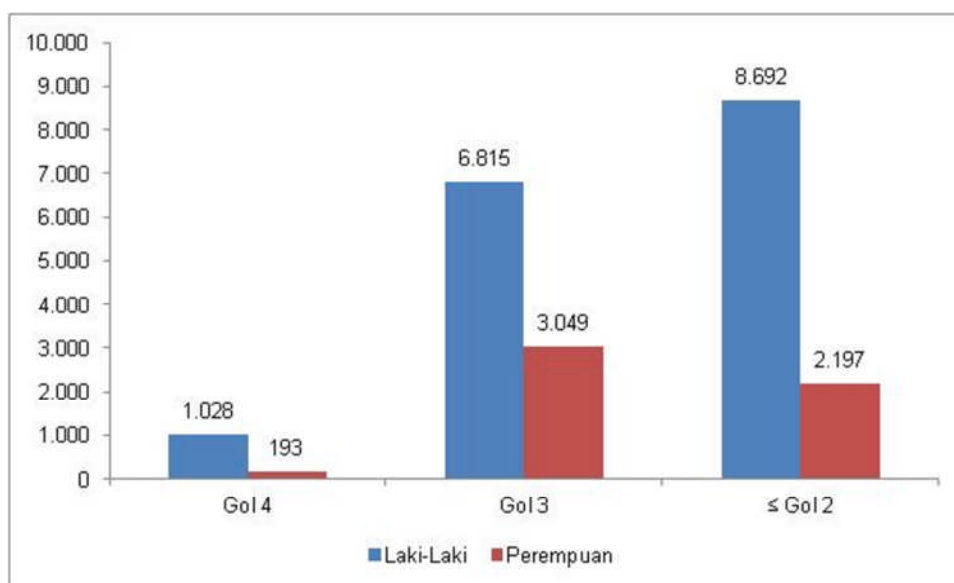
Gambar 8.9 Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: Juni 2011)



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Jika dilihat dari golongan kepangkatan, golongan 4 di Kementerian PU terdiri dari 1.028 orang atau 4,68% pegawai laki-laki dan 193 orang atau 0,88% pegawai perempuan. Untuk golongan 3 ada sebanyak 6.815 orang atau 31,01% laki-laki dan 3.049 orang atau 13,88% perempuan, serta golongan 2 atau kurang terdiri dari 8.692 orang atau 39,56% laki-laki dan 2.197 orang atau 10% perempuan. Gambar 8.8 berikut serta Tabel 8.12 – 8.13 menginformasikan jumlah serta persentase SDM Kementerian PU menurut golongan dan jenis kelamin.

Gambar 8.10 Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 (Status: Juni 2011)

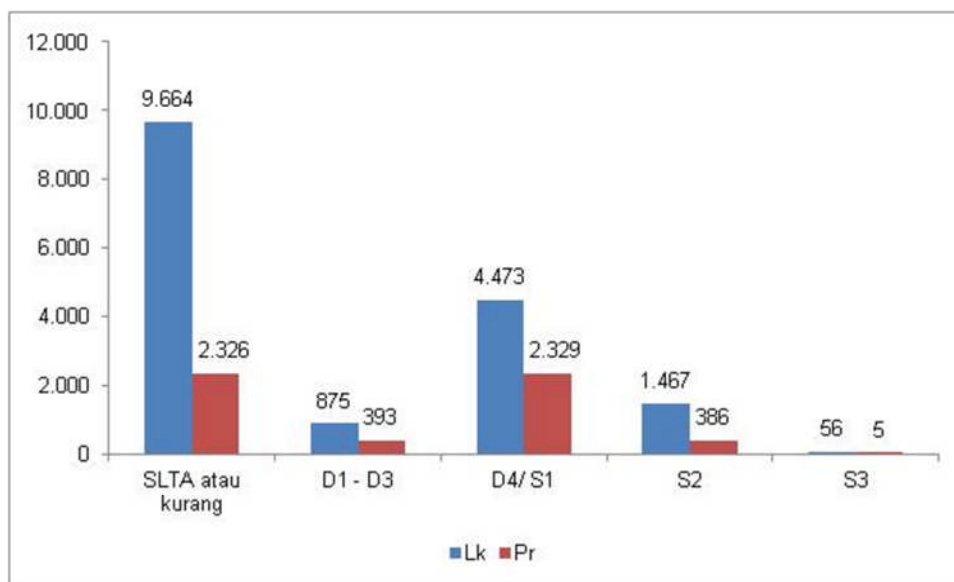


Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu pula di Kementerian PU. SDM yang berkualitas salah satunya diperoleh dari pendidikan yang telah ditamatkan, meskipun hal ini bukan satu-satunya parameter baik tidaknya kualitas SDM.

Berkaitan dengan pendidikan yang ditamatkan, SDM di Kementerian PU yang berpendidikan SLTA atau kurang terdiri ada sebanyak 11.990 orang yang terdiri dari 9.664 laki-laki dan 2.326 perempuan. Lalu kemudian yang berpendidikan D4/ S1 sebanyak 6.802 dengan laki-laki sebanyak 4.473 dan perempuan 2.329. Jumlah ini mengalami peningkatan setelah penerimaan *online* yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir yang mensyaratkan tingkat pendidikan tersebut. Informasi mengenai hal ini terdapat dalam Tabel 8.14 – 8.15 dan Gambar 8.11.

**Gambar 8.11 Jumlah SDM Kementerian PU
Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2011
(Status: Juni 2011)**



Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

8.2 Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PU

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pemahaman TIK yang demikian ini mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur computer maupun (tele)komunikasi.

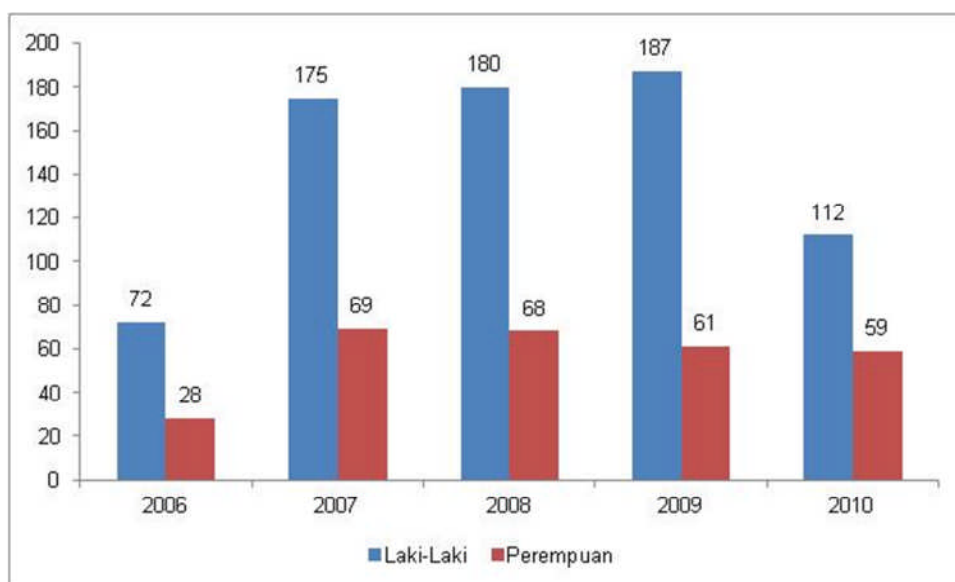
Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pelatihan untuk membentuk keahlian dan ketrampilan pegawai dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Inisiatif Pusdata menyelenggarakan pelatihan di bidang TIK adalah sebagai salah satu upaya melakukan penyebaran informasi ke Balai/ Satker/ SNVT yang tersebar di seluruh

Indonesia, merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pembelajaran masyarakat.

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang *e-Government*, maka program pelatihan TIK yang diselenggarakan Pusdata dimulai sejak tahun 2006-2010 dan untuk jumlah pesertanya dapat diilustrasikan pada Gambar 8.12 dan secara lengkap pada Tabel 8.16. Komposisi peserta pelatihan dari tahun 2006-2009 hampir sama untuk laki-laki (3/4) dan perempuan (1/4). Sedangkan tahun 2010 komposisi menjadi 65,50% laki-laki dan 34,50% perempuan.

Pelaksanaan pelatihan ini tiap tahun diadakan empat sampai lima angkatan di berbagai provinsi yang berbeda. Provinsi yang telah dipakai sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan TIK ini, antara lain Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

**Gambar 8.12 Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun 2006-2010**



Sumber: Pusdata Kementerian PU

**Tabel 8.1 Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Tahun 2008-2011
(Status: Juni 2011)**

Satminkal	2008			2010			2011		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	1.059	429	1.488	1.227	556	1.783	1.004	452	1.456
Inspektorat Jenderal	111	47	158	130	60	190	152	100	252
Ditjen Penataan Ruang	232	100	332	320	173	493	376	242	618
Ditjen Sumber Daya Air	3.492	613	4.105	6.115	1.280	7.395	6.451	1.558	8.009
Ditjen Bina Marga	3.851	946	4.797	5.282	1.522	6.804	5.702	1.756	7.458
Ditjen Cipta Karya	1.196	476	1.672	1.453	646	2.099	1.583	799	2.382
BP Konstruksi	355	83	438	340	97	437	340	152	492
Balitbang	876	270	1.146	859	304	1.163	927	380	1.307
Kementerian PU	11.172	2.964	14.136	15.726	4.638	20.364	16.535	5.439	21.974

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.2 Persentase SDM Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Tahun 2008-2011
(Status: Juni 2011)**

Satminkal	2008			2010			2011		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	7,49	3,03	10,53	6,03	2,73	8,76	4,57	2,06	6,63
Inspektorat Jenderal	0,79	0,33	1,12	0,64	0,29	0,93	0,69	0,46	1,15
Ditjen Penataan Ruang	1,64	0,71	2,35	1,57	0,85	2,42	1,71	1,10	2,81
Ditjen Sumber Daya Air	24,70	4,34	29,04	30,03	6,29	36,31	29,36	7,09	36,45
Ditjen Bina Marga	27,24	6,69	33,93	25,94	7,47	33,41	25,95	7,99	33,94
Ditjen Cipta Karya	8,46	3,37	11,83	7,14	3,17	10,31	7,20	3,64	10,84
BP Konstruksi	2,51	0,59	3,10	1,67	0,48	2,15	1,55	0,69	2,24
Balitbang	6,20	1,91	8,11	4,22	1,49	5,71	4,22	1,73	5,95
Kementerian PU	79,03	20,97	100,00	77,22	22,78	100,00	75,25	24,75	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.3 Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Tahun 2008-2011
(Status: Juni 2011)**

Satminkal	2008			2010			2011		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	140	52	192	131	54	185	150	66	216
Inspektorat Jenderal	14	7	21	15	8	23	13	8	21
Ditjen Penataan Ruang	68	24	92	65	29	94	70	38	108
Ditjen Sumber Daya Air	305	23	328	322	42	364	343	53	396
Ditjen Bina Marga	205	24	229	211	28	239	223	31	254
Ditjen Cipta Karya	83	21	104	78	25	103	79	40	119
BP Konstruksi	79	15	94	78	15	93	78	16	94
Balitbang	105	30	135	107	33	140	108	41	149
Kementerian PU	999	196	1.195	1.007	234	1.241	1.064	293	1.357

Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Catatan: Pejabat terdiri dari Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV

Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.4 Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Tahun 2008-2011
(Status: Juni 2011)**

Satminkal	2008			2010			2011		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	11,72	4,35	16,07	10,56	4,35	14,91	11,05	4,86	15,92
Inspektorat Jenderal	1,17	0,59	1,76	1,21	0,64	1,85	0,96	0,59	1,55
Ditjen Penataan Ruang	5,69	2,01	7,70	5,24	2,34	7,57	5,16	2,80	7,96
Ditjen Sumber Daya Air	25,52	1,92	27,45	25,95	3,38	29,33	25,28	3,91	29,18
Ditjen Bina Marga	17,15	2,01	19,16	17,00	2,26	19,26	16,43	2,28	18,72
Ditjen Cipta Karya	6,95	1,76	8,70	6,29	2,01	8,30	5,82	2,95	8,77
BP Konstruksi	6,61	1,26	7,87	6,29	1,21	7,49	5,75	1,18	6,93
Balitbang	8,79	2,51	11,30	8,62	2,66	11,28	7,96	3,02	10,98
Kementerian PU	83,60	16,40	100,00	81,14	18,86	100,00	78,41	21,59	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Catatan: Pejabat terdiri dari Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV

Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.5 Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir
(2008, 2009, 2010)
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
(Status: 21 Juni 2011)**

Pendidikan	2008			2009			2010		
	Lk	Pr	Lk+ Pr	Lk	Pr	Lk+ Pr	Lk	Pr	Lk+ Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SLTA atau kurang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1-D3	0	0	0	0	1	1	223	196	419
D4/ S1	135	116	251	305	232	537	943	684	1.627
S2	16	14	30	26	23	49	25	13	38
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	151	130	281	331	256	587	1.191	893	2.084

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.6 Persentase SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir
(2008, 2009, 2010)
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
(Status: 21 Juni 2011)**

Pendidikan	2008			2009			2010		
	Lk	Pr	Lk+ Pr	Lk	Pr	Lk+ Pr	Lk	Pr	Lk+ Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SLTA atau kurang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	10,70	9,40	20,11
D4/ S1	48,04	41,28	89,32	51,96	39,52	91,48	45,25	32,82	78,07
S2	5,69	4,98	10,68	4,43	3,92	8,35	1,20	0,62	1,82
S3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	53,74	46,26	100,00	56,39	43,61	100,00	57,15	42,85	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.7 Jumlah SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir
(2008, 2009, 2010)
Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
(Status: 21 Juni 2011)**

Satminkal	2008			2009			2010		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	18	15	33	37	38	75	53	77	130
Inspektorat Jenderal	5	7	12	15	12	27	21	33	54
Ditjen Penataan Ruang	13	19	32	34	39	73	41	43	84
Ditjen Sumber Daya Air	32	14	46	71	50	121	393	230	623
Ditjen Bina Marga	32	20	52	83	33	116	385	210	595
Ditjen Cipta Karya	17	28	45	37	36	73	100	114	214
Balitbang	14	19	33	29	28	57	71	65	136
BP Konstruksi	5	7	12	25	20	45	33	48	81
Kementerian PU	136	129	265	331	256	587	1.097	820	1.917

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.8 Persentase SDM Kementerian PU Perekrutan Tiga Tahun Terakhir
(2008, 2009, 2010)
Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Status: 21 Juni 2011**

Satminkal	2008			2009			2010		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	6,79	5,66	12,45	6,30	6,47	12,78	2,76	4,02	6,78
Inspektorat Jenderal	1,89	2,64	4,53	2,56	2,04	4,60	1,10	1,72	2,82
Ditjen Penataan Ruang	4,91	7,17	12,08	5,79	6,64	12,44	2,14	2,24	4,38
Ditjen Sumber Daya Air	12,08	5,28	17,36	12,10	8,52	20,61	20,50	12,00	32,50
Ditjen Bina Marga	12,08	7,55	19,62	14,14	5,62	19,76	20,08	10,95	31,04
Ditjen Cipta Karya	6,42	10,57	16,98	6,30	6,13	12,44	5,22	5,95	11,16
Balitbang	5,28	7,17	12,45	4,94	4,77	9,71	3,70	3,39	7,09
BP Konstruksi	1,89	2,64	4,53	4,26	3,41	7,67	1,72	2,50	4,23
Kementerian PU	51,32	48,68	100,00	56,39	43,61	100,00	57,22	42,78	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.9 Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PU
Menurut Satminkal dan Jenis Kelamin
Tahun 2011
(Status: 21 Juni 2011)**

Satminkal	Jumlah			Persentase		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7
Sekretariat Jenderal	1.004	452	1.456	4,57	2,06	6,63
Inspektorat Jenderal	152	100	252	0,69	0,46	1,15
Ditjen Penataan Ruang	376	242	618	1,71	1,10	2,81
Ditjen Sumber Daya Air	6.451	1.558	8.009	29,36	7,09	36,45
Ditjen Bina Marga	5.702	1.756	7.458	25,95	7,99	33,94
Ditjen Cipta Karya	1.583	799	2.382	7,20	3,64	10,84
BP Konstruksi	340	152	492	1,55	0,69	2,24
Balitbang	927	380	1.307	4,22	1,73	5,95
Kementerian PU	16.535	5.439	21.974	75,25	24,75	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.10 Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011
(Status: 21 Juni 2011)**

Satminkal	Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sekretariat Jenderal	5	1	6	10	0	10	37	18	55	98	47	145
Inspektorat Jenderal	1	0	1	5	1	6	3	1	4	4	6	10
Ditjen Penataan Ruang	1	0	1	5	1	6	26	4	30	38	33	71
Ditjen Sumber Daya Air	1	0	1	19	0	19	103	6	109	220	47	267
Ditjen Bina Marga	1	0	1	15	0	15	68	4	72	139	27	166
Ditjen Cipta Karya	1	0	1	7	0	7	27	8	35	44	32	76
BP Konstruksi	1	0	1	5	0	5	22	5	27	50	11	61
Balitbang	1	0	1	3	2	5	34	8	42	70	31	101
Kementerian PU	12	1	13	69	4	73	320	54	374	663	234	897

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.11 Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011
(Status: 21 Juni 2011)**

Satminkal	Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sekretariat Jenderal	38,46	7,69	46,15	13,70	0,00	13,70	9,89	4,81	14,71	10,93	5,24	16,16
Inspektorat Jenderal	7,69	0,00	7,69	6,85	1,37	8,22	0,80	0,27	1,07	0,45	0,67	1,11
Penataan Ruang	7,69	0,00	7,69	6,85	1,37	8,22	6,95	1,07	8,02	4,24	3,68	7,92
Sumber Daya Air	7,69	0,00	7,69	26,03	0,00	26,03	27,54	1,60	29,14	24,53	5,24	29,77
Bina Marga	7,69	0,00	7,69	20,55	0,00	20,55	18,18	1,07	19,25	15,50	3,01	18,51
Cipta Karya	7,69	0,00	7,69	9,59	0,00	9,59	7,22	2,14	9,36	4,91	3,57	8,47
BP Konstruksi	7,69	0,00	7,69	6,85	0,00	6,85	5,88	1,34	7,22	5,57	1,23	6,80
Balitbang	7,69	0,00	7,69	4,11	2,74	6,85	9,09	2,14	11,23	7,80	3,46	11,26
Kementerian PU	92,31	7,69	100,00	94,52	5,48	100,00	85,56	14,44	100,00	73,91	26,09	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.12 Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Jenis Kelamin
Tahun 2011
(Status: 21 Juni 2011)**

Satminkal	Golongan 4			Golongan 3			Golongan 2 atau kurang			Jumlah
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sekretariat Jenderal	132	46	178	565	335	900	307	71	378	1.456
Inspektorat Jenderal	40	16	56	97	79	176	15	5	20	252
Ditjen Penataan Ruang	45	12	57	241	202	443	90	28	118	618
Ditjen Sumber Daya Air	291	24	315	2.333	736	3.069	3.827	798	4.625	8.009
Ditjen Bina Marga	241	17	258	2.021	748	2.769	3.440	991	4.431	7.458
Ditjen Cipta Karya	110	21	131	774	534	1.308	699	244	943	2.382
BP Konstruksi	39	6	45	234	131	365	67	15	82	492
Balitbang	130	51	181	550	284	834	247	45	292	1.307
Kementerian PU	1.028	193	1.221	6.815	3.049	9.864	8.692	2.197	10.889	21.974

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.13 Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Jenis Kelamin
Tahun 2011
Status: 21 Juni 2011**

Satuan Kerja	Golongan 4			Golongan 3			Golongan 2 atau kurang		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	10,81	3,77	14,58	5,73	3,40	9,12	2,82	0,65	3,47
Inspektorat Jenderal	3,28	1,31	4,59	0,98	0,80	1,78	0,14	0,05	0,18
Ditjen Penataan Ruang	3,69	0,98	4,67	2,44	2,05	4,49	0,83	0,26	1,08
Ditjen Sumber Daya Air	23,83	1,97	25,80	23,65	7,46	31,11	35,15	7,33	42,47
Ditjen Bina Marga	19,74	1,39	21,13	20,49	7,58	28,07	31,59	9,10	40,69
Ditjen Cipta Karya	9,01	1,72	10,73	7,85	5,41	13,26	6,42	2,24	8,66
BP Konstruksi	3,19	0,49	3,69	2,37	1,33	3,70	0,62	0,14	0,75
Balitbang	10,65	4,18	14,82	5,58	2,88	8,45	2,27	0,41	2,68
Kementerian PU	84,19	15,81	100,00	69,09	30,91	100,00	79,82	20,18	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.14 Jumlah SDM Kementerian PU
Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
(Status: 21 Juni 2011)**

Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pegawai		
	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4
SLTA atau kurang	9.664	2.326	11.990
D1 - D3	875	393	1.268
D4/ S1	4.473	2.329	6.802
S2	1.467	386	1.853
S3	56	5	61
Jumlah	16.535	5.439	21.974

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.15 Persentase SDM Kementerian PU
Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
(Status: 21 Juni 2011)**

Pendidikan yang Ditamatkan	Persentase Pegawai		
	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4
SLTA atau kurang	43,98	10,59	54,56
D1 - D3	3,98	1,79	5,77
D4/ S1	20,36	10,60	30,95
S2	6,68	1,76	8,43
S3	0,25	0,02	0,28
Jumlah	75,25	24,75	100,00

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

**Tabel 8.16 Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun 2006 – 2010**

Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Total
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	2	3	4	5	6
2006	72	72,00%	28	28,00%	100
2007	175	71,72%	69	28,28%	244
2008	180	72,58%	68	27,42%	248
2009	187	75,40%	61	24,60%	248
2010	112	65,50%	59	34,50%	171
Jumlah	726	71,81%	285	28,19%	1011

Sumber: Pusdata Kementerian PU